



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAROS

# LPPD

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAROS



**BUPATI MAROS**  
DR. H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., MH



**WAKIL BUPATI MAROS**  
HJ. SUHARTINA BOHARI, S.E

# 2023

TAHUN ANGGARAN 2024



## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan berbagai limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros Tahun 2023 tahun anggaran 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD serta menginformasikan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat.

Selain itu, laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

##### 1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros
- b. Data Geografis Kabupaten Maros
- c. Jumlah Penduduk
- d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
- f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022



- 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
  - b. Visi dan Misi
  - c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026
  - d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2023
- 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

## **BAB II      CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 2.1. Capaian Kinerja Makro
  - a. Indeks Pembangunan Manusia
  - b. Angka Kemiskinan
  - c. Angka Pengangguran
  - d. Pertumbuhan Ekonomi
  - e. Pendapatan Per Kapita
  - f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
- 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
  - 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
  - 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
  - 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
  - a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023
  - b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023
  - c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Tahun 2023
  - d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
  - e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan



Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

- f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

### **BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros
- 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

### **BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

- 4.1. Urusan Pendidikan
- 4.2. Urusan Kesehatan
- 4.3. Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4. Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6. Urusan Sosial

### **BAB V PENUTUP**

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bahan evaluasi, informasi, dan referensi bagi pemerintah pusat serta sebagai acuan dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi pengembangan daerah dimasa yang akan datang. Di sisi lain, penyusunan LPPD ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Maros untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat dalam terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Maros. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh Masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Maros, 21 Maret 2024

BUPATI MAROS,



H. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	2
a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros .....	3
b. Data Geografis Pembentukan Kabupaten Maros.....	6
c. Jumlah Penduduk.....	7
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	10
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	24
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 .....	33
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	55
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	58
b. Visi dan Misi .....	58
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2016-2021.....	60
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2020 .....	82
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	85
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	90
2.1. Capaian Kinerja Makro .....	90
a. Indeks Pembangunan Manusia .....	91
b. Angka Kemiskinan.....	91
c. Angka Pengangguran.....	92
d. Pertumbuhan Ekonomi.....	92
e. Pendapatan Per Kapita .....	93
f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....	94





2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	94
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	96
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	171
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Usuran Pemerintahan .....	205
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	209
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	210
b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	213
c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Tahun 2022 .....	283
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	285
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	286
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	292
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>314</b>
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros .....	314
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros .....	315
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>317</b>
A. Urusan Pendidikan.....	317
B. Urusan Kesehatan .....	329
C. Urusan Pekerjaan Umum.....	335
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	339
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	343
F. Urusan Sosial .....	352
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>366</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat.

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang





berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari geografis wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan



perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.581,50 Ha.

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan zikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km<sup>2</sup>, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km<sup>2</sup> atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

#### **a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros**

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama



lain daerah ini yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh duasuku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Distrik Turikale      | Dipimpin oleh Karaeng  |
| 2. Distrik Marusu        | Dipimpin oleh Karaeng  |
| 3. Distrik Simbang       | Dipimpin oleh Karaeng  |
| 4. Distrik Bontoa        | Dipimpin oleh Karaeng  |
| 5. Distrik Lau'          | Dipimpin oleh Karaeng  |
| 6. Distrik Tanralili     | Dipimpin oleh Karaeng  |
| 7. Distrik Sudiang       | Dipimpin oleh Gelarang |
| 8. Distrik Moncongloe    | Dipimpin oleh Gelarang |
| 9. Distrik Bira          | Dipimpin oleh Gelarang |
| 10. Distrik Biringkanaya | Dipimpin oleh Gelarang |
| 11. Distrik Mallawa      | Dipimpin oleh Arung    |
| 12. Distrik Camba        | Dipimpin oleh Arung    |



- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 13. Distrik Cendrana           | Dipimpin oleh Arung |
| 14. Distrik Laiya              | Dipimpin oleh Arung |
| 15. Distrik Wanua Waru         | Dipimpin oleh Arung |
| 16. Distrik Gantarang Matinggi | Dipimpin oleh Arung |

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disamping itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki



menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah Tingkat II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

## **b. Data Geografis Kabupaten Maros**

### **1. Batas Administratif**

Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara  $40^{\circ} 45'$  -  $50^{\circ} 07'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 205'$ -  $129^{\circ} 12'$  Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Di sebelah Utara : Dengan Kabupaten Pangkep;

Di sebelah Timur : Dengan Kabupaten Bone;

Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa;

Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;

Di sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

### **2. Topografi**

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai



kemiringan lereng diatas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat pada kecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa.

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute, Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili.

Iklm Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148 hari Interval suhu udara antara 23,4<sup>0</sup>C sampai 33,3<sup>0</sup>C, dengan kelembaban rata- rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot.

### c. Jumlah Penduduk

Hingga akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat sebanyak 398.866 jiwa yang terdiri dari laki-laki 198.708 jiwa, perempuan 200.158 jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 51.272 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 12.851 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2023 telah mencapai **2,46** jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.615 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawayaitu 54,47 jiwa per km<sup>2</sup>.

Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



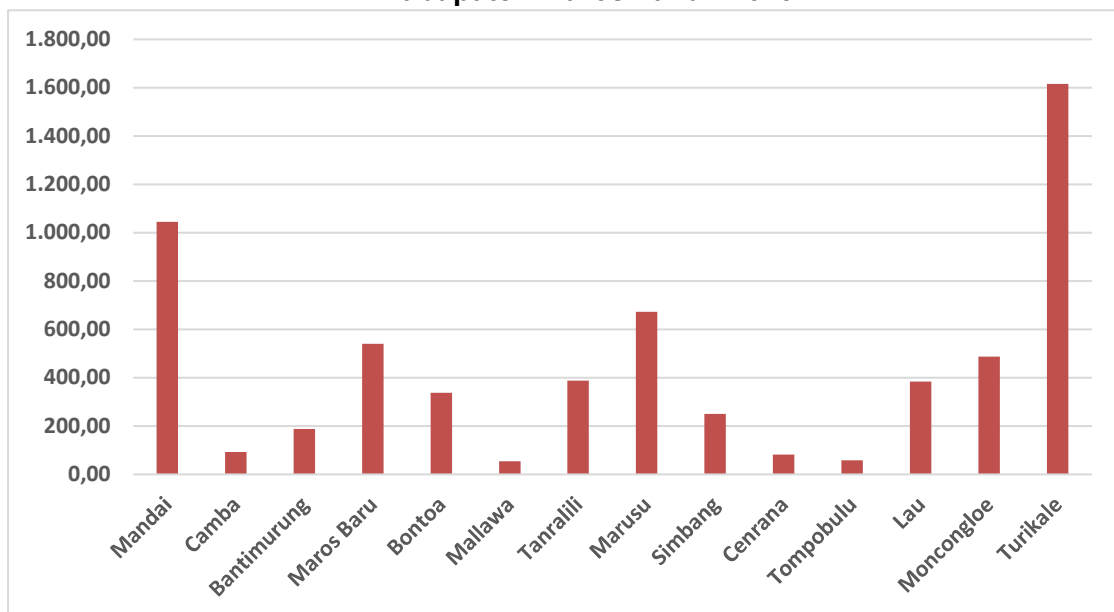
### Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mandai	25.574	25.698	51.272	49.11	1.044,02
2	Camba	6,515	6.911	13.426	145.36	92,36
3	Bantimurung	16.067	16.581	32.648	173.70	187,96
4	Maros Baru	14.625	14.411	29.036	53.76	540,10
5	Bontoa	15.634	15.919	31.553	93.52	337,39
6	Mallawa	6.371	6.480	12.851	235.92	54,47
7	Tanralili	17.491	17.126	34.617	89.45	387,00
8	Marusu	17.955	18.143	36.098	53.73	671,84
9	Simbang	13.145	13.163	26.308	105.31	249,81
10	Cenrana	7.243	7.505	14.748	180.97	81,49
11	Tompobulu	8.554	8.239	16.793	287.66	58,38
12	Lau	14.013	14.296	28.309	73.83	383,43
13	Moncongloe	11.535	11.314	22.849	46.87	487,50
14	Turikale	23.986	24.372	48.358	29.93	1.615,70
<b>JUMLAH</b>		<b>198.708</b>	<b>200.158</b>	<b>398.866</b>	<b>1.619,12</b>	<b>6.191,47</b>

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini.

#### Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Maros Tahun 2023





**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Mandai	15.249	
2	Camba	4.778	
3	Bantimurung	10.266	
4	Maros Baru	8.761	
5	Bontoa	9.571	
6	Mallawa	4.482	
7	Tanralili	11.166	
8	Marusu	11.115	
9	Simbang	8.420	
10	Cenrana	5.001	
11	Tompobulu	5.381	
12	Lau	8.715	
13	Moncongloe	6.976	
14	Turikale	14.447	
<b>TOTAL</b>		<b>109.881</b>	

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2023**

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0 – 4	34.057	27.791	31.961	32.907	33.770
5 – 9	37.249	37.589	37.532	37.961	38.646
10 – 14	36.225	36.955	35.693	36.854	37.758
15 – 19	37.175	29.233	34.697	31.227	26.639
20 – 24	32.965	34.291	34.239	34.135	35.236
25 – 29	31.780	32.473	32.598	32.351	33.218
30 – 34	30.520	30.953	30.757	30.974	31.582



<b>35 – 39</b>	28.028	28.418	28.631	28.684	29.619
<b>40 – 44</b>	25.829	26.372	26.295	26.371	26.870
<b>45 – 49</b>	25.378	24.835	24.850	24.424	24.836
<b>50 – 54</b>	20.621	22.337	22.244	23.264	24.076
<b>55 – 59</b>	15.650	16.049	15.971	17.022	18.554
<b>60 – 64</b>	10.827	12.854	12.467	13.095	13.762
<b>65 – 69</b>	7.544	8.205	8.095	8.723	9.443
<b>70 – 74</b>	4.960	5.761	5.446	5.794	6.439
<b>75+</b>	5.875	6.319	7.262	7.703	8.418
<b>Jumlah</b>	<b>384.682</b>	<b>388.330</b>	<b>388.738</b>	<b>391.489</b>	<b>398.866</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 2023 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 38.646 orang atau 9,68 % dari total jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun dengan persentase penduduk sebesar 9,46 % atau 37.758 orang, kemudian diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk 35.236 orang atau 8,83 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros tahun 2023 sebanyak 288.692 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 264.392 orang atau 88,46% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu



dengan luas 287,66 km<sup>2</sup> atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km<sup>2</sup> atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros.

**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros**

NO	KECAMATAN	JUMLAH		LUAS (Km <sup>2</sup> )
		DESA	KELURAHAN	
1	Mandai	4	2	49,11
2	Moncongloe	5	0	46,87
3	Maros Baru	4	3	53,76
4	Lau	2	4	53,73
5	Turikale	0	7	29,93
6	Marusu	7	0	73,83
7	Bontoa	8	1	93,52
8	Bantimurung	6	2	173,70
9	Simbang	6	0	105,30
10	Tanralili	7	1	89,45
11	Tompobulu	8	0	287,66
12	Camba	6	2	145,36
13	Cenrana	7	0	180,97
14	Mallawa	10	1	235,92
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>23</b>	<b>1.619.12</b>

Sumber data: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2024

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH (UNIT)		TOTAL RUMAH (UNIT)
		LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	
1	Turikale	11.763	1.795	13.558
2	Maros Baru	3.853	2.665	6.518
3	Mandai	4.964	1.905	6.869
4	Moncongloe	3.808	1.122	4.930
5	Camba	1.322	1.422	2.744



6	Cenrana	1.538	2.093	3.631
7	Bantimurung	2.527	2.426	4.953
8	Simbang	2.500	2.757	5.257
9	Marusu	4.889	1.760	6.649
10	Lau	3.275	2.396	5.671
11	Bontoa	2.709	3.046	5.755
12	Tanralili	3.467	2.330	5.797
13	Tompobulu	2.007	2.428	4.435
14	Mallawa	1.574	1.594	3.168
<b>JUMLAH</b>		<b>50.196</b>	<b>29.739</b>	<b>79.935</b>

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 13.558 unit rumah tempat tinggal, dimana 11.763 unit rumah diantaranya layak huni dan 1.795 unit rumah tergolong tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada di ibukota Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan perekonomian berpusat di wilayah ini.

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup besar adalah kecamatan Mandai dengan 6.869 unit rumah. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Mandai adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan dekat dengan kota Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan ini.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat potensial untuk kegiatan pada 12 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2023 sebesar **260.929** ton yang dipanen dari areal padi seluas 44,178 Ha dan Padi ladang



seluas 125 Ha atau rata-rata **58,89** Kwintal/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung dengan luas panen sekitar 11.131 Ha dan jumlah produksi sebesar **88,249,06** ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar **152** ton dari luas panen 90 Ha, kacang tanah dengan produksi **2,257,7** ton dari luas panen 777 Ha, Kacang Hijau dengan produksi **26,46** Ton dengan luas panen 158 Ha, ubi kayu dengan produksi sebesar **8.625,48** ton dari luas panen 364 Ha, dan ubi jalar dengan luas panen 42 Ha yang mampumenghasilkan produksi sebesar **4.902** ton. Produksi bawang merah sebesar **2,4** ton cabe rawit dengan jumlah produksi **238,6** ton, cabe besar dengan produksi **407,5** ton. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, populasi ternak terbesar di Kabupaten Maros adalah sapi potong dengan populasi mencapai **43.552** ekor. Selain sapi potong ternak lain yang memiliki populasi cukup besar adalah kambing dengan populasi **53.723** ekor, kuda dengan populasi **9.246** ekor dan kerbau dengan populasi **847** ekor. Adapun produksi daging sapi untuk sapi potong tahun 2023 sebesar **506.784** Kg, Kerbau **3.603** Kg, Kuda **2.377** Kg, Ayam pedaging **33.188.727** Kg, dan itik **3.717** Kg, serta itik manila **168** Kg. Selain itu produksi telur untuk ternak dengan jenis unggas adalah ayam buras dengan jumlah **709.300** Kg, ayam ras petelur dengan jumlah **30.090.772** Kg dan itik dengan jumlah **3.508.585** Kg, serta produksi telur itik manila **22.443** Kg.

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar **26.072,3** ton dan perikanan budidaya dengan produksi sebesar **29.825** ton. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPI Labuang berlokasi di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit Unggul kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 25 Kelompok Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit ikan nila sebanyak 10.000 ekor. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Maros juga memberikan hibah bibit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Maros, bantuan yang diberikan yaitu lele sebanyak 12 kelompok masing-masing 12.000 ekor, ikan nila sebanyak 4 kelompok masing-masing



7.000 ekor, udang sebanyak 4 kelompok masing-masing 200.000 ekor, bandeng sebanyak 2 kelompok masing-masing 80.000 ekor, nila sebanyak 6 kelompok masing-masing 14.000 ekor, kepiting sebanyak 2 kelompok masing-masing 1.500 ekor, dan budidaya sistem polikultur (udang dan bandeng) sebanyak 20 kelompok masing-masing 240.000 ekor.

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya adalah potensi wisata alam Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa.

Kawasan permandian alam Bantimurung. Terletak di lembah bukit kapur dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia. Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar 150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah.

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro'). Di kawasan ini selain terdapat stalaktit yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan. Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota Kabupaten Maros.

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahankan kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranya adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah



gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis Maccala Maura yang sudah langka.

Air terjun Bonto Somba Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar. Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba.

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili. Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas areal 150 Ha yang dipersiapkan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah, utamanya wisatawan mancanegara.

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga perlu untuk segera dikembangkan.

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m<sup>2</sup>. Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa dijadikan tujuan wisata.



**Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

No	NAMA OBYEK	KATEGORI	LOKASI
1	Jarie	Situs	Kecamatan Simbang
2	Tampuang	Situs	Kecamatan Simbang
3	Saripa	Situs	Kecamatan Simbang
4	Karrasa	Situs	Kecamatan Simbang
5	Kado	Situs	Kecamatan Simbang
6	Burung 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
7	Burung 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
8	Pangie	Situs	Kecamatan Bantimurung
9	Sampeang	Situs	Kecamatan Bantimurung
10	Ulu Leang	Situs	Kecamatan Bantimurung
11	Ambe Paco	Situs	Kecamatan Bantimurung
12	Elle Pusae	Situs	Kecamatan Bantimurung
13	Bettue	Situs	Kecamatan Bantimurung
14	Uluwae	Situs	Kecamatan Bantimurung
15	Pajae	Situs	Kecamatan Bantimurung
16	Pettae	Situs	Kecamatan Bantimurung
17	Pettakere	Situs	Kecamatan Bantimurung
18	Tinggi Ada	Situs	Kecamatan Bantimurung
19	Baratedong 1	Situs	Kecamatan Bantimurung



20	Baratedong 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
21	Alla Birang	Situs	Kecamatan Bantimurung
22	Pallenge	Situs	Kecamatan Bantimurung
23	Bara Jarang	Situs	Kecamatan Bantimurung
24	Pabbuno Juku	Situs	Kecamatan Bantimurung
25	Lompoa	Situs	Kecamatan Bantimurung
26	Bembe	Situs	Kecamatan Bantimurung
27	Timpuseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
28	Batu Karope	Situs	Kecamatan Bantimurung
29	Bulu Tungke'e	Situs	Kecamatan Bantimurung
30	Barugayya	Situs	Kecamatan Bantimurung
31	Pa'limukang	Situs	Kecamatan Bantimurung
32	Tanre	Situs	Kecamatan Bantimurung
33	Balang	Situs	Kecamatan Bantimurung
34	Jing	Situs	Kecamatan Bantimurung
35	Sengkae	Situs	Kecamatan Bantimurung
36	Bata-battae	Situs	Kecamatan Bantimurung
37	Pacce-pacce	Situs	Kecamatan Bantimurung
38	Bulu Buttue	Situs	Kecamatan Bantimurung
39	Boddong	Situs	Kecamatan Bantimurung
40	Canggoreng	Situs	Kecamatan Bantimurung



41	Samongkeng 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
42	Samongkeng 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
43	Samongkeng 3	Situs	Kecamatan Bantimurung
44	Samongkeng 4	Situs	Kecamatan Bantimurung
45	Lambatorang	Situs	Kecamatan Bantimurung
46	Pucu	Situs	Kecamatan Bantimurung
47	Wanue	Situs	Kecamatan Bantimurung
48	Tenggae	Situs	Kecamatan Bantimurung
49	Bulu Kamase	Situs	Kecamatan Bantimurung
50	Panampu 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
51	Panampu 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
52	Bungaeja 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
53	Bungaeja 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
54	Maddauseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
55	Botto	Situs	Kecamatan Bantimurung
56	Batu Tianang	Situs	Kecamatan Bontoa
57	Karama/Akkrasa	Situs	Kecamatan Bontoa
58	Pasaung		Kecamatan Bontoa
59	Sipong 1		Kecamatan Bontoa
60	Sipong 2		Kecamatan Bontoa
61	Sipong 3		Kecamatan Bontoa



62	Monroe		Kecamatan Bontoa
63	Cempae		Kecamatan Bontoa
64	Wajan Raksasa		Kecamatan Turikale
65	Beduk tertua		Kecamatan Turikale
66	Pedang V.O.C		Kecamatan Turikale
67	Kerangka Manusia Leang		Kecamatan Simbang
68	Bendungan Batu Bassi		Kecamatan Simbang
69	Gudang mesiu		Kecamatan Simbang
70	Prasasti Jepang		Kecamatan Simbang
71	Bunker Jepang		Kecamatan Mandai
72	Makam La Makkulau Arung		Kecamatan Bantimurung
73	Makam Arung Macege		Kecamatan Camba
74	Makam Karaeng Bontoa		Kecamatan Bontoa
75	Makam Kareang Lalang		Kecamatan Bontoa
76	Makam Nahkoda		Kecamatan Bontoa
77	Balla Lompoa		Kecamatan Turikale
78	Kantor Pengadilan Lama		Kecamatan Turikale
79	Kantor Kejaksaan Lama		Kecamatan Turikale
80	Rumah Sakit Lama		Kecamatan Turikale
81	Penjara Lama		Kecamatan Turikale
82	Rumah Kodok		Kecamatan Turikale



83	Kantor Pemerintah Belanda		Kecamatan Turikale
----	---------------------------	--	--------------------

Sumber data :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata Alam Bantimurung.

Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi unggulan bertajuk Apkasi Expo 2023 (AOE2023) terselenggara sebanyak 1 kali yang dilaksanakan di Jakarta

**Daftar Penyelenggaraan Expo**

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket.
1.	Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE2023)	1 (satu) kali	Terlaksana

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati panorama alam Kabupaten Maros.

**DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2019-2023**

TAHUN	TARGET KUNJUNGAN	REALISASI KUNJUNGAN	PERSENTASE
2019	391.700	518.635	132%
2020	402.000	238.456	59,32%
2021	282.033	65.507	23,22%
2022	500.000	584.016	116,80%
2023	550.000	598.526	108,00%

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

**JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANADI DALAM NEGERI**

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
-----	---------------	--------	------------



1.	Pemilihan Duta Pelajar	1 (Satu) Kali	
2.	Lomba Mancing (Kolam PTB Maros)	1 (Satu) Kali	
3.	Tourism Exploring for Student	1 (Satu) Kali	
4.	Oad Show UMKM Kreatif 14 Kecamatan	1 (Satu) Kali	
5.	Rammang-Rammang Tourism Exhibition	1 (Satu) Kali	
6.	Lomba Desain Landscape Spot Pariwisata	1 (Satu) Kali	
7.	Youth Democracy Festival	1 (Satu) Kali	
8.	Kompetisi Bulutangkis Mania (c)	1 (Satu) Kali	
9.	Festival Carnival Desa 2023	1 (Satu) Kali	
10.	Kejuaraan Enduro Competition Tingkat Provinsi Sulsel	1 (Satu) Kali	
11.	Katto Boko	1 (Satu) Kali	
12.	Pemilihan Duta Genre Desa	1 (Satu) Kali	
13.	Julu Siri Trail	1 (Satu) Kali	
14.	Geonite With Karts Jazz	1 (Satu) Kali	
15.	Festival Spirit Ramadhan II	1 (Satu) Kali	
16.	Job Fair Bursa Kerja	1 (Satu) Kali	
17.	Festival Beduk	1 (Satu) Kali	
18.	Festival Ramadhan	1 (Satu) Kali	
19.	Ramahdhan Fair Geopark	1 (Satu) Kali	
20.	Anugerah Desa Wisata Kab. Maros	1 (Satu) Kali	
21.	Maros Youth Sulawesi	1 (Satu) Kali	
22.	Maros Pangkep Orienteering Competition	1 (Satu) Kali	
23.	Ma'seli Geopark dan celebes Explorer 2023	1 (Satu) Kali	
24.	Kejuaraan Futsal	1 (Satu) Kali	



25.	Trail Forkopimda	1 (Satu) Kali	
26.	Rewa Run	1 (Satu) Kali	
27.	May Day Festival Turnamen Futsal Mobile Legend Dialog Ketenagakerjaan	1 (Satu) Kali	
28.	May day Dialog Ketenagakerjaan	1 (Satu) Kali	
29.	Fun Education Camp Geopark Area	1 (Satu) Kali	
30.	Ubur Ubur Trail Run	1 (Satu) Kali	
31.	Lomba Desain Busana Pakaian Berbahan Eco Print	1 (Satu) Kali	
32.	Pemilihan Duta Wisata Dara & Daeng	1 (Satu) Kali	
33.	Kejuaraan Bulutangkis	1 (Satu) Kali	
34.	Fun Bike Geopark	1 (Satu) Kali	
35.	Pertandingan Sepak Takraw	1 (Satu) Kali	
36.	Kompetisi Sepak Bola	1 (Satu) Kali	
37.	Geopark half Marathon	1 (Satu) Kali	
38.	Trail Wisata Adventure	1 (Satu) Kali	
39.	Adventure Wisata Offroad dan Speed Offroad Piala Bupati Maros	1 (Satu) Kali	
40.	Tomtrack Hard Enduro	1 (Satu) Kali	
41.	Kirab Budaya Mannapu Ase Lolo	1 (Satu) Kali	
42.	Camara Jeep Adventure Offroad	1 (Satu) Kali	
43.	Temu Literasi	1 (Satu) Kali	
44.	Bupati Cup	1 (Satu) Kali	
45.	Festival Rakyat Geopark maros Pangkep	1 (Satu) Kali	
46.	Pesta rakyat Geopark maros Pangkep	1 (Satu) Kali	
47.	Tudang Sipulung Kebudayaan	1 (Satu) Kali	
48.	Pacuan Kuda	1 (Satu) Kali	
49.	Panahan Berkuda	1 (Satu) Kali	





50.	Pemilihan Duta Genre Maros	1 (Satu) Kali	
51.	Gepark Fun Bike	1 (Satu) Kali	
52.	Pemilihan dara Daeng Cilik	1 (Satu) Kali	
53.	Maudu Ada	1 (Satu) Kali	
54.	Pemilihan Duta Anti Narkoba	1 (Satu) Kali	
55.	Duta Demokrasi	1 (Satu) Kali	
56.	Jambore Geopark Maros Pangep	1 (Satu) Kali	
57.	Lomba Apresiasi Alat Musik Tradisional Koleksi Museum	1 (Satu) Kali	
58.	Pameran Temporer	1 (Satu) Kali	
59.	Appalili	1 (Satu) Kali	
60.	Field Trip Nasional GENPI 2023	1 (Satu) Kali	
61.	Festival Film Koleksi Museum	1 (Satu) Kali	
62.	Kejuaraan renang	1 (Satu) Kali	

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

**JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA  
MASYARAKAT**

No.	Uraian	Jumlah Yang Terlibat	Keterangan
1.	Kawasan Wisata Kuliner PTB	100	Pedagog
2.	Kawasan Wisata Alam Bantimurung	38	Pedagog
<b>JUMLAH</b>		138	

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros, berawal pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat Kuliner Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan merupakan hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara kekeluargaan dan hingga saat ini Pusat kuliner Maros terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena adanya inovasi-inovasi kreatif dari Kepala Daerah untuk menghadirkan suatu kawasan yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian bagi Masyarakat Sosial Kabupaten Maros.

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya. Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa.

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk



mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing urusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>OPD KABUPATEN</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH PERSONIL (PNS)</b>
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	181
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Maros	52
Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Maros	73
Dinas Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.014
	Dinas Kesehatan	859
	Dinas Sosial	46
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62
	Dinas Komunikasi dan Informatika	55
	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perhubungan dan Pertanahan	157
	Dinas Perumahan, Kawasan	92



	Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	60
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	207
	Dinas Perikanan	72
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	78
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48
Rumah Sakit Daerah	RSU La Palaloi	377
Kecamatan	Kecamatan Mallawa	27
	Kecamatan Cenrana	24
	Kecamatan Camba	20
	Kecamatan Simbang	29
	Kecamatan Bantimurung	29
	Kecamatan Turikale	23
	Kecamatan Maros Baru	24
	Kecamatan Lau	24
	Kecamatan Bontoa	24
	Kecamatan Mandai	28
	Kecamatan Marusu	30
	Kecamatan Moncongloe	28
	Kecamatan Tanralili	28
	Kecamatan Tompobulu	30
Lembaga Teknis Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	52
	Badan Kesbang dan Politik	27
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57
	Badan Keuangan dan Asset Daerah	60
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38



	Badan Pendapatan Daerah	57
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	110
<b>TOTAL</b>		<b>6.666</b>

Sumber data : Data BKPSDM Kab. Maros dan Data Kepegawaian OPD terkait, 2024

Adapun pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 berupa prestasi / penghargaan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pelaksanaan JKN – KIS atas tercapainya Cakupan Semesta Kabupaten Maros tahun 2019;
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori PRATAMA;
3. BKN Award, Kategori Penilaian Tingkat Kabupaten / Kota Tipe B;
4. APDESI Award;
5. TPAKD sebagai Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP, Sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan;
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lima kali berturut- turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s/d 2019;
7. Penghargaan Swasti Saba Wistara ( Pengembangan ) Penghargaan tertinggi Kab/Kota Sehat dengan cakupan Wilayah sebanyak 14 Kecamatan 103 Desa/Kelurahan;
8. Piagam penghargaan sebagai Kategori Humas Kab/Kota dengan Publikasi Media Internal terbaik pada Event Humas Sul – Sel Expo 2019;
9. Pelayanan Publik Terbaik 2019;
10. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
11. Penghargaan Atas Prestasi dan Kinerja Pengolahan Sistem Informasi dan Program ( SIKP) selama Periode 2019 se- Sulawesi Selatan;
12. Adiwiyata Mandiri 2019;
13. Bantimurung Bulusaraung National Park;
14. Kabupaten yang melaksanakan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan sebagai Desa Percontohan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
15. Pemenang Lomba Kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu



Berprestasi.

16. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
17. Piagam penghargaan atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka berbasis digital dalam era pandemi covid-19
18. Piagam penghargaan sebagai kabupaten penerima anugerah parahita ekapraya tahun 2020 kategori utama.
19. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan "literacy camp" pada tanggal 27-28 agustus 2021
20. Piagam penghargaan terbaik 1 dalam pengelolaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Prov. Sulawesi Selatan tahun 2020 pada tahun 2021
21. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 pada tahun 2021.
22. Piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak peringkat PRATAMA tahun 2021.
23. Piagam Penghargaan pemerintah kabupaten dengan implementasi Qris dalam Rangka mendukung ekosistem Transaksi digital.
24. Keterbukaan Informasi badan publik tahun 2021 kategori pemerintah kabupaten/kota sebagai badan publik CUKUP INFORMATIF dalam Implementasi UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
25. Piagam Penghargaan atas dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN pemerintah kabupaten Maros.
26. Penghargaan Penyelesaian Program Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022.
27. Sebagai Provinsi dengan desa Wisata Terbanyak Pada Anugerah desa Wisata Indonesia 2022.
28. KPID Award 2022, sebagai kepala daerah peduli Penyiaran
29. Penghargaan FKPTPI (Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Indonesia) dalam kiprahnya Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian Daerah.
30. LPM Award 2022, Sebagai Kepala daerah Kontributif terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
31. Penghargaan tertinggi Nugra jasa Dharma Pustaloka kategori Pejabat Publik, atas dedikasi dan peran aktif terhadap pengembangan perpustakaan.
32. Terbaik III Nasional Komunitas Peduli Sungai (Komunitas Anak Sungai Rammang2 Sulawesi selatan BBWS Pompengan Jeneberang).

---

**33. SMART CITY**



34. Satya Lancana Dharma Aditya karya Mahatva Yodha, Atas Karya bakti dan pengabdian sosial yang telah dilakukan bersama2 dan berkolaborasi dengan karang taruna.
35. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik , Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kabupaten Maros sebagai Badan Publik Cukup Informatif.
36. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022
37. GenPI (Gerakan Pesona Indonesia ) Pada Kegiatan *Leader Talks- Digital Transform & digital Innovation Four Tourism* dalam Rangka rakornas Gerakan Pesona Indonesia 2022
38. PKH AWARD Kategori penghargaan bagi pemerintah Daerah Kab/ kota atas dukungan Alikasi Dana Sharing APBD II Tertinggi IV Untuk Pelaksanaan PKH Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022
39. Anugerah Meritokrasi, Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat BAIK
40. Penghargaan Piala ADIPURA Kategori Kota Kecil Tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
41. Penghargaan dari Kemenkumham Republik Indonesia atas Dukungan dan Bantuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Pada Wilayah Kerja Kabupaten Maros dengan memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat pada Tahun 2023
42. Piagam Penghargaan Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2023
43. Piagam Penghargaan dari Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan terhadap Prestasi Kabupaten Maros yang mencapai target Non AFP (Acute Flaccid Polio) Pada tahun 2023
44. Penghargaan dari BPJS Kesehatan dalam pencapaian UHC (Universal Health Coverage) Tahun 2023
45. Penghargaan Piala ADIPURA 2022 pada Tahun 2023
46. Piagam atas Prestasi Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintahan Daerah (EPPD 2022) dengan Skor 2,68 pada tahun 2023



47. Piagam Penghargaan sebagai Lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dari LAN pada tahun 2023
48. Opini WTP yang ke 11 Atas laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 pada Tahun 2023
49. Juara Harapan II Atas Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten /Kota Lokus Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
50. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 (Desa wisata Rammang- Rammang kecamatan Bontoa kabupaten Maros sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia Pada Acara Penganugerahan Desa
51. Kabupaten Layak Anak tahun 2023, kategori NINDYA
52. Piagam Penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Peran Aktif dalam Membangun dan Melindungi Serta Mendukung Program Kekayaan Intelektual di Provinsi Sulawesi Selatan
53. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan harapan II Kabupaten Maros, Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
54. Juara V (Lima) Besar sebagai Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori Daya Tarik Pengunjung Desa Wisata Terbaik.
55. Penghargaan Atas Dukungan Dalam Pelaksanaan Integritas Pelayanan Kesehatan Primer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023
56. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Atas Inovasi POS PHBS (Pengolahan Data dan Informasi Perilaku Hidup Bersih dan sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Berbasis Aplikasi KOBO Collect Di Puskesmas Moncongloe) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023
57. Unesco Global Geopark Maros - Pangkep (as Global Geopark Network Institutional Member For the Period 2023 -2026
58. Penghargaan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia Atas Inovasi dan





Kreasi Pelibatan Masyarakat Terbaik Tahun 2023 Pada Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS

59. Penghargaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai For Outstanding Support Of Indonesia Literature ang The Digital Library Movenment For Young Indonesians Tahun 2023
60. Penghargaan Proklim Kategori Proklim Lestari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2023
61. Piagam APKASI
62. STUNTING AWARD 2023, Kategori Kawasan Tanpa Rokok, Atas Kontribusi dalam mendukung Pencapaian Bebas Stunting di kabupaten Maros dari Kementerian Desa PDDT , BKKBN, ADINKES
63. Piagam Gubernur Sulawesi Selatan sebagai ategori Kabupaten dengan Komitmen Tinggi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender, Anak, dan Disabilitas
64. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023
65. Penghargaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) pada tahun 2023
66. Penghargaan Atas Partisipasi, Kolaborasidan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pertanian2023 dari Kepala BPS Sulsel
67. Penghargaan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 2023, KATEGORI MADYA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
68. Penghargaan Sebagai Partisipasi Mitra Terbanyak, pada Seminar Nasional dan Expo Program Matching Fund Kedaireka dari Universitas Hasanuddin Tahun 2023
69. Penghargaan Kemenag Sulsel Atas Perhatian dan Dedikasinya dalam layanan Pendidikan keagamaan di Kabupaten Maros Tahun 2023
70. Penghargaan Anugerah IQRO IKA BKPRMI Mosque Literacy Award Dengan



Kategori Muwahid Utama Literasi Masjid dari Pangdam XIV Hasanuddin Tahun 2023

71. Piagam dari Ketua Umum Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia Sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya, Atas jasa Kepedulianya terhadap Pengembangan Koperasi.
72. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, Atas Rekor Kompetisi Domino Oleh Peserta Terbanyak dari Museum Rekor Dunia Indonesia Tahun 2023
73. Piagam Kepala Balai Pengelola Kereta api Sulawesi Selatan atas Dukungan dan Komitmen dalam percepatan pembangunan Kereta Api Sulawesi Selatan tahun 2023
74. Penghargaan Ketua Yayasan dana Islamic Centre IMMIM Sebagai Tokoh Literasi atas jasanya dalam mendorong Kecakapan Literasi tahun 2023
75. Piagam Ketua KPID Sulawesi Selatan atas Anugerah Penyiaran Sulawesi Selatan XVIII KPID Award 2023, Digitalisasi Penyiaran Menopang Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan, Sebagai Kepala Daerah Penggerak FMPPS KPID AWARDS 2023
76. Piagam Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara (LIPAN INDONESIA) Sebagai Pemerhati Bidang Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Maros
77. Penghargaan Atas Peran Aktif dalam Membangun, Melindungi dan Mendukung Kekayaan Intelektual SulSel Pada Agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kemenkumham RI
78. Penghargaan Kinerja Berupa alokasi Intensif Fiskal Kinerja Tahun berjalan TA.2023 Kategori Percepatan Belanja Daerah dan Penggunaan Produk dalam Negeri Pada Rapat Koordinasi Nasional (P2DD) tahun 2023
79. Piagam Kementerian Agama Republik Indonesia Atas Partisipasi dan Kontribusi dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam Tahun 2023
80. Anugerah Penghormatan dan Penghargaan Atas Kontribusi, Dedikasi dan Loyalitasnya Pada Organisasi Darul Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Tahun 2023.



**f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023**

Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.485.038.399.072,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.470.052.018.011,28 atau sebesar 98,99%. Adapaun rincian target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :

**f.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**f.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain PAD yang Sah. Target peningkatan PAD harus diikuti dengan analisis yang tepat terutama dampaknya terhadap kegiatan- kegiatan perekonomian pada masyarakat secara menyeluruh. Meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan dalam APBD masih tergolong sangat kecil. namun PAD masih merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dari waktu ke waktu masih sangat potensial untuk bisa mengalami peningkatan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, PAD dianggarkan sebesar Rp. 307.532.402.823 terealisasi sebesar Rp. 312.458.644.282,03 atau mencapai 101,60% dari target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1.1

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	307.532.402.823	312.458.644.282,03	101,60
1	Pajak Daerah	176.180.000.000	197,549.578.336,00	112,13
2	Retribusi Daerah	20.685.000.000	18.244.987.544,14	88,20
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.483.898.863	10.483.898.863	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	100.183.503.960	86.180.179.538,89	86,02

Sumber : BPKAD, 2024

Dari keempat komponen PAD Retribusi Daerah dan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang capaiannya 100 persen dan melebihi 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melihat belum mencapainya target 100 persen secara keseluruhan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2023, maka perlu adanya optimalisasi pemenuhan target pendapatan yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menggali obyek potensial yang baru

**a. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2023 meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral bukan Logam; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 176.180.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 197,549.578.336,00 atau 101,60%. Pencapaian Pajak Daerah yang



mencapai target tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang berangsur baik pasca Pandemi COVID-19. Hal ini memicu semua sektor perekonomian mengalami peningkatan karena tidak adanya lagi pembatasan kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut diatas juga dipicu oleh kerja maksimal yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan yang secara maksimal memanfaatkan kondisi yang ada untuk melaksanakan tugas dalam mengelola pajak daerah. Rincian anggaran dan realisasi hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>176.180.000.000</b>	<b>194.980.064.546,00</b>	<b>110,67</b>
1	Pajak Hotel	3.000.000.000	3.308.837.544,00	110,29
2	Pajak Restoran	19.500.000.000	20.802.986.531,00	106,68
3	Pajak Hiburan	1.000.000.000	934.712.973,00	93,47
4	Pajak Reklame	1.350.000.000	1.281.464.828,00	94,92
5	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	33.319.487.607,00	107,48
6	Pajak Parkir	12.000.000.000	13.217.605.800,00	110,15
7	Pajak Air Tanah	800.000.000	813.110.240,00	101,64
8	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	9.765.000,00	32,55
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.500.000.000	11.502.005.155,00	53,50
10	Pajak Bumi dan Bangunan	35.000.000.000	38.100.660.954,00	108,86



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pedesaan dan Perkotaan			
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000	74,258.941.704,00	145,61

Sumber: BPKAD, 2024

Sebagian besar jenis pajak daerah yang direncanakan dapat direalisasikan diatas target, kecuali pajak hiburan (93,47%), Pajak Reklame (94,92%), Pajak Sarang Burung Walet sebesar (32,55%), dan Pajak Mineral bukan Logam sebesar (53,50%), kemudian diikuti oleh Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan persentase realisasi sebesar (108,86%). Persentase penerimaan pajak tertinggi berada pada sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar (145,61%) disusul oleh Pajak Hotel sebesar (110,29%), dan Penerimaan pajak Parkir menempati urutan ketiga dengan persentase realisasi penerimaan sebesar (110,15%).

#### b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Maros meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 20.685.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.18.244.987.544,14 atau 88,20 %. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>20.685.000.000</b>	<b>18.244.987.544,14</b>	<b>88,20</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.000.000	52.187.000	61,40
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000	102.850.000	103,85
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000	213.200.000	106,60
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.400.000.000	2.383.569.015	70,10
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000	395.415.000	394,42
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000	298.800.000	85,37
7	Retribusi Tempat Pelelangan	300.000.000	253.548.000	84,52
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.100.000.000	993.954.000	90,36
8	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	250.000.000	650.000,00	0,26
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000	260.200.000	86,73
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	6.500.000.000	4.900.461.500	75,39
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	8.000.000.000	8.389.153.029,14	104,86

Sumber: BPKAD, 2024

Retribusi tempat parkir khusus yang hanya ditargetkan sebesar Rp. 1.100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 993.954.000 atau sebesar 90,36 %. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 8.389.153.029,14 atau 104,86 %. Demikian halnya dengan retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp 350.000.000 atau sebesar 85,37%. Sedangkan retribusi dengan realisasi



tertinggi adalah retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar 395.415.000 atau 394,42 %.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100%, dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 10.483.898,863,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.483.898,863,00.

**Tabel 1.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>10.483.898,863,00</b>	<b>10.483.898,863,00</b>	<b>100,00</b>
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.483.898,863,00	10.483.898,863,00	100,00

Sumber: BPKAD, 2024

**d. Lain-Lain PAD Yang Sah**

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan BLUD; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 100.183.503.960 dan terealisasi sebesar Rp. 86.180.179.538,89 atau sekitar 86,02 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.





**Tabel 1.5**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Lain-lain PAD Yang Sah</b>	<b>100.183.503.960</b>	<b>85.802.732.582,12</b>	<b>85,65</b>
1	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000	3.984.496.050,98	79,69
2	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.500.000.000	63.895.000	4,26
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	900.000.000	720.506.000	80,06
4	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000	2.419.805.276,36	806,60
5	Pendapatan BLUD	77.983.503.960	77.859.765.228	99,84
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.500.000.000	1.131.711.983,55	7,80

Sumber : BPKAD, 2024

Capaian realisasi atas lain-lain PAD yang sah tersebut dikarenakan sumber pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan tidak terealisasi. Hanya Pendapatan dari Pengembalian yang terealisasi sebesar 806,60%, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 99,84%. Sedangkan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terselasisasi hanya sebesar 4,26% atau Rp. 63.895.000 dari target sebesar Rp. 1.500.000.000.

#### **f.1.2 Pengelolaan Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer initerdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan



pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Rincian pendapatan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

**Tabel. 1.6**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.001.908.589.115</b>	<b>1.000.922.185.847,00</b>	<b>99,90</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	16.201.266.115	19.455.112.163	120,08
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	695.261.651.000	701.936.309.200	100,96
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.026.463.000	100.590.633.464	96,70
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	186.419.209.000	178.940.131.020,00	95,99

Sumber : BPKAD, 2024

## 1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

### a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 16.201.266.115 dan terealisasi sebesar Rp. 19.455.112.163 atau sekitar 120,08 %. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari penerimaan Bagi hasil pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan yaitu sebesar Rp. 6.671.404.163 atau 197,15 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 3.383.958.000. Sedangkan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak terealisasi sebesar Rp. 331.576.000,00 atau sebesar 100%. Bagi Hasil cukai tembakau terealisasi sebesar Rp 952.038.000,00 atau sebesar 96,59 %. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel. 1.7**  
**Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak**  
**Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>16.201.266.115</b>	<b>19.455.112.163</b>	<b>120,08</b>
1	pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan	3.383.958.000	6.671.404.163	197,15
2	Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pajak 29 Wajib Pajak	331.576.000	331.576.000	100
3	Dana Bagi Hasil Pasal 21	7.915.548.000	7.915.548.000	100
4	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	985.638.115	952.038.000	96,59
5	DBH Minyak Bumi	3000	3000	100
6	DBH Gas Bumi	221.811.000	221.811.000	100
7	DBH Mineral dan Batu Bara (Landrent)	4.573.000	4.573.000	100
8	DBH Mineral dan Batu Bara (Royalty)	1.895.192.000	1.895.192.000	100
9	DBH Kehutanan	38.273.000	38.273.000	100
10	DBH Perikanan	1.424.694.000	1.424.694.000	100

Sumber: BPKAD, 2024

#### **b. Bagi Hasil Bukan Pajak**

Bagi hasil bukan pajak terdiri atas lima komponen yaitu; Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

Penerimaan dari Bagi bukan Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp **3.584.546.000** dan terealisasi sebesar Rp **3.584.546.000** atau sebesar 100 %. Rincian pendapatan dari bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut :



**Tabel. 1.8**  
**Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak**  
**Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>3.584.546.000</b>	<b>3.584.546.000</b>	<b>100</b>
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	38.273.000	38.273.000	100
2	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.424.694.000	1.424.694.000	100
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3000	3000	100
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	221.811.000	221.811.000	100
5	Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara Royalty	1.895.192.000	1.895.192.000	100
6	Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara Landerent	4.573.000	4.573.000	100

Sumber: BPKAD, 2024

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari DAU pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 659.108.296.000 dan terealisasi sebesar Rp. 658.690.796.000 atau 99,94 %. Rincian anggaran dan realisasi DAU Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel. 1.9**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>659.261.651.000</b>	<b>701.936.309.200</b>	<b>100,96</b>
1	Dana Alokasi Umum	659.261.651.000	701.936.309.200	100,96

Sumber: BPKAD, 2024

### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

#### a. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Untuk Tahun 2023 DAK Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK fisik terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan, Rumah Sakit dan Keluarga Berencana), DAK Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Perpustakaan), DAK Bidang Perhubungan, DAK Bidang Perumahan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Industri Kecil dan menengah, DAK Bidang Lingkungan Hidup. Namun dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, maka pada tahun 2023, DAK Fisik bidang perhubungan dan Bidang Pendidikan sub bidang perpustakaan dihapus. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel. 1.10**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Fisik**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>104.026.463.000</b>	<b>100.590.633.464</b>	<b>96,70</b>
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	104.026.463.000	100.590.633.464	96,70

Sumber : BPKAD, 2024

#### **b. DAK Non Fisik**

Untuk Tahun 2023 DAK Non Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK Bantuan operasional PAUD, DAK tunjangan porfesi guru, DAK tambahan penghasilan guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Bantuan Operasional KB, DAK tunjangan khusus guru, DAK dana pelayanan Administrasi kependudukan, DAK Non fisik bidang pariwisata, DAK Non fisik bantuan operasional Pendidikan kesetaraan. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 1.11**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>186.419.209.000</b>	<b>178.940.131.020</b>	<b>95,99</b>
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	186.419.209.000	178.940.131.020	95,99

Sumber : BPKAD, 2024

#### **f.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel. 1.12

**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0

Sumber: BPKAD, 2024

**f.1.4 Pendapatan Transfer antar Daerah**

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, bagi hasil dari pajak rokok, Rincian penerimaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel. 1.13

**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi  
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>79.446.823.134</b>	<b>100.898.150.823,02</b>	<b>127,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak	64.146.823.134	64.146.823.134	100
2	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.549.060.000	20.440.507.334	176,99
3	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.148.000.000	16.712.627.804	137,58
4	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.871.953.000	38.499.744.146,02	215,42
5	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	95.000.000	260.462.132	274,17



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
6	Bagi Hasil Pajak Rokok	22.482.810.134	21.025.311.407	93,52

Sumber: BPKAD, 2024

### f.1.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi akuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja daerah akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah seperti *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

#### 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun 2023 berpedoman kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan





bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 adalah:

1. Upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. Belanja daerah dititik beratkan kepada prioritas pembangunan daerah.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.

## 2. Target dan Realisasi Belanja

Secara deskriptif belanja daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: **1) Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, **2) Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.604.151.161.593 dan realisasi sebesar Rp. 1.521.188.018.818 atau sebesar 94,83 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.



### 3. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. **1.604.151.161.593** dan terealisasi sebesar 94,82% atau senilai Rp. **1.521.013.274.022,08**. Rincian anggaran dan realisasi belanja Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.14**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.604.151.161.593</b>	<b>1.521.013.274.022,08</b>	<b>94,82</b>
1	Belanja Pegawai	621.601.203.152	589.945.690.927	94,91
2	Belanja Barang dan Jasa	385.952.572.965	360.573.910.153,08	93,42
3	Belanja Hibah	46.245.920.032	46.092.951.026	99,67
4	Belanja Bantuan Sosial	835.691.400	544.000.000	65,10

Sumber: BPKAD, 2024

#### a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2023, belanja pegawai Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 621.601.203.152 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 589.945.690.927 atau 94,91%. Komposisi terbesar pada belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun rincian komposisi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.15**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Belanja Pegawai (BTL)</b>	<b>605.101.876.840</b>	<b>569.611.005.635</b>	<b>94,13</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	451.397.910.939	425.331.845.293	94,23
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	40.691.913.387	40.598.930.545	99,77



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.514.837.720	102.125.938.596	95,88
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.370.466.782	14.964.602.488	97,36
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.562.454.324	1.483.254.484	94,93
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000	801.600.000	100
7	Belanja Pegawai BLUD	5.262.020.000	4.658.811.327	88,54

Sumber: BPKAD, 2024

#### b. Belanja Hibah

Pada tahun 2023 belanja hibah Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 46.245.920.032 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.092.951.026 atau 99,67 %. Komposisi belanja yang terealisasi terdapat pada belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar 99,19%, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 100 %, dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar 102,05%.

**Tabel 1.16**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Belanja Hibah</b>	<b>46.245.920.032</b>	<b>45.972.951.026</b>	<b>99,41</b>
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	37.914.254.980	37.607.951.801	99,19
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	849.143.515	849.143.515	100



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
3	Belanja Hibah Dana BOS	7.482.521.537	7.635.855.710	102,05

Sumber: BPKAD, 2024

#### c. Belanja Transfer

Pada tahun 2023, belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. **150.035.036.600** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **150.035.036.600** atau sebesar 100%. Realisasi belanja tersebut, terdiri dari realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 150.035.036.600, atau sebesar 100%, Rincian anggaran dan realisasi Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.17**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Desa</b>	<b>150.035.036.600</b>	<b>150.035.036.600</b>	<b>100</b>
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	150.035.036.600	150.035.036.600	100

Sumber: BPKAD, 2024

#### d. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2023, belanja tidak terduga Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000 dan hanya terealisasi sebesar 60,60 % atau sebesar Rp. 1.817.892.203.

### 4. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. **1.054.635.387.54**, dan terealisasi sebesar Rp. **997.175.843.912,08** atau 94,55 % dari total anggaran



yang direncanakan. Rincian realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.18**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.054.635.387.549</b>	<b>997.175.843.912,08</b>	<b>94,55</b>
1	Belanja Pegawai	621.601.203.152	589.945.690.927	94,91
2	Belanja Barang dan Jasa	385.952.572.965	360.573.910.153,08	93,42
3	Belanja Modal	396.480.737.444	371.984.501.307	93,82

Sumber : BKAD, 2024

**a. Belanja Pegawai**

Pada tahun 2023, belanja pegawai pada belanja langsung Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 621.601.203.152 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 589.945.690.927 atau 94,91%. Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan sebesar Rp. 40.691.913.387 dan terealisasi sebesar Rp. 40.598.930.545 atau 99,77%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Maros tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.19**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>621.601.203.152</b>	<b>589.964.982.733</b>	<b>94,91</b>
1	Honorarium PNS	7.157.798.000	6.795.994.136	94,95
2	Tambahan Penghasilan ASN	40.691.913.387	40.598.930.545	99,77
3	Belanja Pegawai BLUD	5.262.020.000	4.658.811.327	88,54

Sumber: BPKAD, 2024

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2023 belanja barang dan jasa Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 385.952.572.965 dan terealisasi sebesar Rp. 358.836.931.155 atau 92,97 %. Komposisi belanja barang dan jasa dengan persentase realisasi tertinggi pada Belanja Sewa Tanah dan Bantuan Sosial yang terealisasi sebesar 100%.

**Tabel 1.20**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pers en (%)
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>385.952.572.965</b>	<b>360.573.910.153,08</b>	<b>93,42</b>
1	Belanja Bahan Pakai Habis	78.736.854.018	70.749.289.497	89,86
2	Belanja Bahan/Material	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	88.936.351.268	84.935.807.298	95,50
4	Belanja Premi Asuransi	25.990.658.298	25.981.949.459	99,97
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.073.110.400	1.955.640.697	63,64
6	Belanja Sewa Tanah	25.108.000	25.108.000	100
7	Belanja Sewa Bangunan dan Gedung	2.047.188.500	1.663.015.000	81,23
8	Belanja Sewa Asset Lainnya	67.500.000	67.000.000	99,26
9	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	1.915.637.200	1.537.941.500	80,28
10	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.362.510.000	1.238.493.000	90,90
11	Belanja Jasa Ketersediaan layanan	125.725.370	121.725.236	96,82
12	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.128.809.000	2.082.871.000	66,57
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.000.000	46.875.000	80,82
14	Belanja	5.849.887.873	4.903.999.935	83,83



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pers en (%)
	Pemeliharaan			
15	Belanja Perjalanan Dinas	40.031.299.924	35.514.663.215	88,72
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.384.370.000	3.018.240.000	89,18
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	43.258.311.960	41.635.465.383	95,25
18	Belanja barang dan jasa BLUD	87.961.251.154	85.094.453.337,60	96,74
19	Belanja Hibah	46.245.920.032	46.092.951.026	99,67
20	Belanja Bantuan Sosial	835.691.400	544.000.000	65,10

Sumber: BPKAD, 2024

### c. Belanja Modal

Pada tahun 2023 belanja modal Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 396.480.737.444 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 371.984.501.307 atau 93,82%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.21**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Maros**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Persen (%)
	<b>BELANJA MODAL</b>	396.480.737.444	371.984.501.307	93,82

Sumber : BPKAD, 2024

### f.1.6 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang



bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Maros adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

## 2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 tidak terealisasi atau 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 119.112.762.521. Rincian target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 1.22

**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>119.112.762.521</b>	<b>119.112.762.521</b>	<b>100</b>
1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	119.112.762.521	119.112.762.521	100
	Penggunaan Silpa	119.112.762.521	119.112.762.521	100
2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28.190.977.519</b>	<b>28.190.977.519</b>	<b>100</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	28.175.991.403	28.175.991.403	100
	Sisa Dana BOS	14.986.116	14.986.116	100

Sumber: BPKAD, 2023

Untuk penerimaan pembiayaan daerah capaian realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi.

**1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuktikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, dan berorientasi pada



kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang komprehensif, adaptif serta sinergis, dan penyusunannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan ; (1) Pertumbuhan yang tinggi, (2) Pemerataan, (3) Partisipatif, (4) Pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*), (5) Pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*), dan (6) Berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros disusun sebagai perwujudan dari amanat kedua Undang-Undang tersebut. Kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2016-2021(Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2016).

Dalam menyusun RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Daerah ini juga mengacu pada RPJP Kabupaten Maros, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah:

1. Menyajikan program dan kegiatan turunan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan prioritas utama;
2. Menyajikan gambaran tentang arah kebijakan umum yang wajib diikuti oleh semua pejabat daerah dan DPRD dalam menyusun RKPDP, KUA, PPAS, RKA-SKPD serta R-APBD dan DPA pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026 adalah :

1. Kesiapan Kebijakan dan Program Pembangunan dalam skala periode yang lebih jelas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan

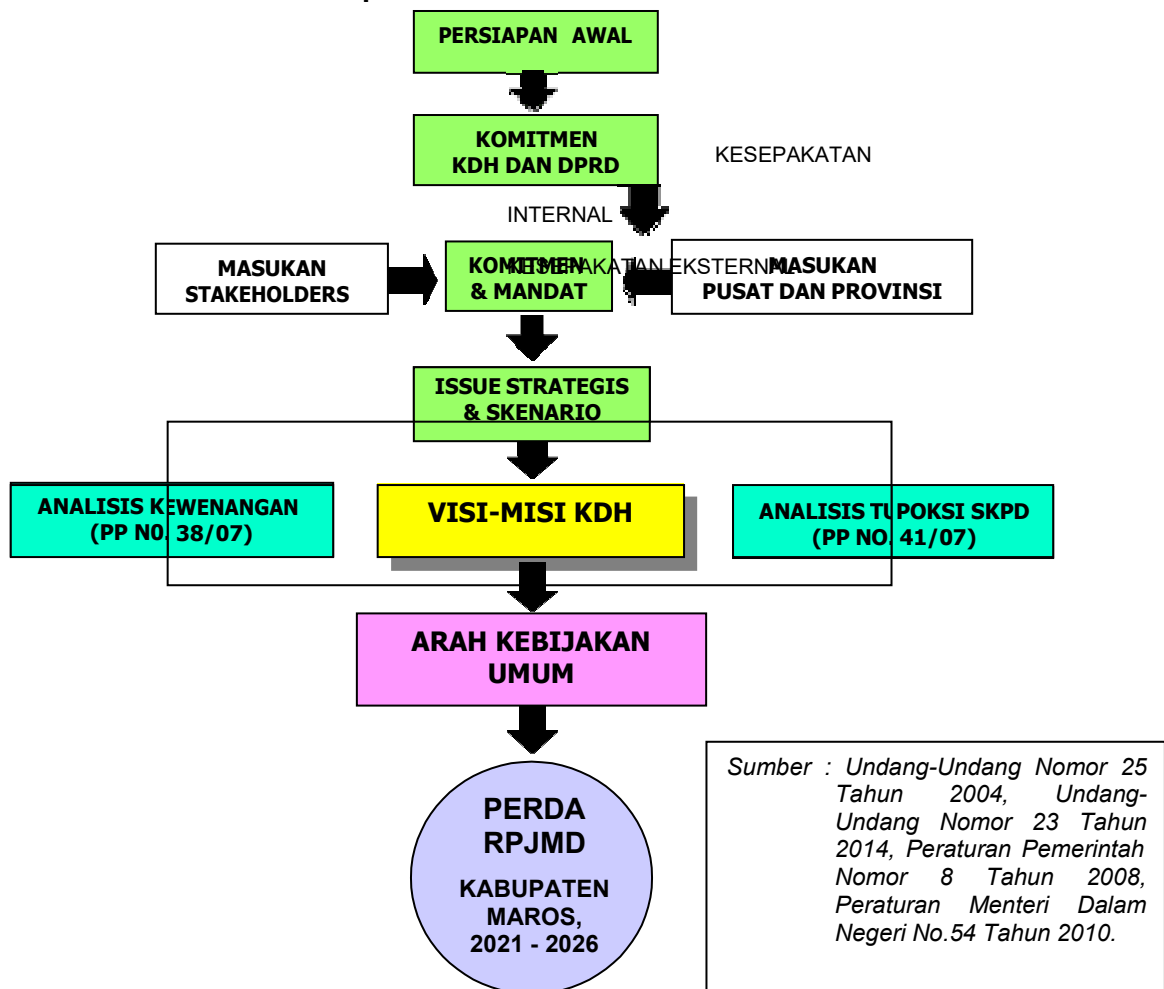


dan pengawasan pembangunan.

2. Ketersediaan rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD.
3. Merupakan persetujuan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros serta masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar I.1.

**Gambar I.1**  
**Pola Pikir dan Proses Penyusunan**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**  
**Kabupaten Maros Tahun 2021-2026**



Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen RPJMD juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan



penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Maros.

**a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Maros digambarkan melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Gambaran umum kinerja Kabupaten Maros tidak semua menggambarkan penurunan capaian, namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan Kabupaten Maros dengan dasar bahwa Kabupaten Maros sudah tidak lagi mentolelir kondisi-kondisi minor seperti angka kemiskinan, pemukiman kumuh dan kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Maros secara umum dapat terpilah pada kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu di tingkatkan.

**b. Visi dan Misi**

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Namun proses pembangunan yang dilakukan selama ini, tidak hanya menghasilkan kemajuan dan keberhasilan, tetapi juga menyisakan dampak berupa permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ragam permasalahan tersebut menuntut perhatian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan. Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan



kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Dibutuhkan pula sebuah Visi menyangkut kemana daerah dan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan rumusan umum dan gambaran mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Maros, dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Maros 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJM Nasional, serta dinamika lingkungan strategis maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yaitu:

**“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”**

Yang dimaksud sejahtera menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi Masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2023 yang **lebih baik** dari kondisi sebelumnya pada seluruh sektor kehidupan Masyarakat yang ditandai dengan :

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.
2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good*



*Governance And Clean Government.*

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada



prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program - program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan dan pengendalian.

Untuk mendukung visi “**MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING**” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

## 6.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan ataulangkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih darisatu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Maros periode tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik**
  - Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi
  - Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan



pemerintahan daerah.

Sasaran 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas

Strategi: Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

## 2. Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

- Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Strategi : Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan keagamaan Strategi: Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektifgender

Strategi: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

## 3. Misi 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif

- Tujuan 3: Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat

Sasaran 6: Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat

Strategi : Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan





pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.

Sasaran 7: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat

Strategi : Peningkatan\_kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM

#### 4. Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

- Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulansumberdaya ekonomi daerah

Sasaran 8: Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB Strategi : Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib.

Sasaran 9: Menurunnya jumlah pengangguran

Strategi : Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor –sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalinya Laju Inflasi.

Strategi : Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.

Sasaran 11: Menurunnya jumlah masyarakat miskin

Strategi : Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha



Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

**5. Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah**

- Tujuan 5: Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiapwilayah

Sasaran 12: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat

Strategi : Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.

**6. Misi 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

- Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan

Strategi: Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Tujuan 7: Menurunkan resiko bencana

Sasaran 14: Menurunnya resiko akibat bencana

Strategi : Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi dalam RPJMD periode 2021 – 2026, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran  
dan Strategi Kabupaten  
Maros**

<b>VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>		
<b>MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik</b>				
1	Menciptakan tatakelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
	2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas		
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia</b>				
2	Menciptakan kualitas sumber dayamanusia	3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
		4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat
	masyarakat yang berdaya saing	5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektif gender	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
<b>MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif</b>				



3	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	6	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
		7	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM



**MISI 4:** Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah	8	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB	Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
		9	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerjanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.
		10	Terkendalnya Laju Inflasi	Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.
		11	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
<b>MISI 5:</b> Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah				



5	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah	12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
<b>MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>				
6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	13	Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
7	Menurunkan resiko bencana	14	Menurunnya resiko akibat bencana	Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten. berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut



adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Maros sebagaimana digambarkan berikut ini:

**Tema Pembangunan Kabupaten Maros Periode tahun 2021 – 2026**

TEMA TAHUN 2022	TEMA TAHUN 2023	TEMA TAHUN 2024	TEMA TAHUN 2025	TEMA TAHUN 2026
Meningkatkan Daya Saing melalui ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan SDM secara Inklusif	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial Masyarakat melalui infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan wilayah dan pengembangan SDM	Percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan pemerataan wilayah	Meningkatkan pembangunan Manusia yang produktif dan berkarakter

Strategi dan arah kebijakan daerah dimaksudkan sebagai landasan operasional pembangunan Kabupaten Maros agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan mencakup seluruh aspek dan bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2021 - 2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Maros memiliki strategi untuk mencapai sasaran dari **misi pertama**, yaitu :

1. Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua



wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
3. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
6. Peningkatan\_kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM.
7. Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib.
8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalinya Laju Inflasi.
9. Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui





optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.

10. Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
11. Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
12. Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
13. Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.



**Tabel 1.23**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2021 – 2026 Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi pada setiap Misi**

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			TAHUN 2023		
<b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>					
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja
					Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.
					Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.
					Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan
					Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2023	
				<p>Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.</p> <p>Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.</p> <p>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.</p> <p>Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar</p> <p>Pendelegasian kewenangan terkait pelaksanaan pelayanan publik</p>
	2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas		
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia</b>				
				<p>Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan</p>



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2023
2	3	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi	kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)
			Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah
			Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.
			Penghapusan iuran komite sekolah.
			Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa
			Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat
			Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat
			Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budaya pendidikan
			Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan
			Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi
			Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB
			Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit
			Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan
			Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan
Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.			
Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpul data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan			
	Meningkatnya		





VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2023						
					<p>Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi</p> <p>Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya padasektor formal</p>				
<b>MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif</b>									
3	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	6	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat				
					Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.				
					Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.				
					Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatanhari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat				
					Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja				
					Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini				
			7	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)			
						Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan			
						Pemenuhan standar pelayanan kesehatan			
						Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari - hari			
						Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik			
						Pemenuhan standar pelayanan			



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2023
			penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
			Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
			Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana
			Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
			Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
			Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.
			Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar
			Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah
			Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			TAHUN 2023		
				Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanan dasar	
<b>MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal</b>					
4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah	8	Meningkatnya kontribusi lapanganusaha Daerah terhadap PDRB	Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan
					Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
					Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
					Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi
					Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro
					Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital
					Peningkatan kualitas produksi terutamapada komoditi yang berpeluang ekspor
					Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan
					Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional
					Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama





VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2023
			Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
			Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital
			Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif
			Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif
			Peningkatan populasi pelaku usaha digital
			Pengembangan maros creative center
			Perluasan aktivitas ekonomi kreatif
			Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital
			Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.1
9	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
			Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja
			Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan
			Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja
			Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.
			Pengembangan tenaga kerja pemuda berbasis teknologi informasi dan kebutuhan pasar kerja
10	Terkendalinya Laju Inflasi	Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi	Peningkatan ketersediaan komoditas pangan
			Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik
			Penguatan kerjasama dengan institusi lain



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2023
		melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.	<p>Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antara petani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern. Optimalisasi peran TPID</p> <p>Penguatan sistem informasi dan peningkatan akses pemasaran</p>
	11	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	<p>Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.</p> <p>Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan</p> <p>Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga</p> <p>Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta kemitraan usaha</p> <p>Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha</p> <p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p> <p>Percepatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.</p> <p>Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.</p> <p>Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru</p> <p>Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan</p> <p>Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS</p> <p>Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi</p>



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2023
			Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat
<b>MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah</b>			
5	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah	12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat
			Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
			Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.
			Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
			Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
			Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
			Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi
			Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
			Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
			Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
			Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa
Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.			
Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.			
Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan			
<b>MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana</b>			
6			Peningkatan integrasi antara pencegahan,
			Penyediaan status mutu udara Daerah
			Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah
			Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.
			Pengendalian kualitas emisi dari berbagai macam sumber
			Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.
Penerapan Car Free Day			



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			TAHUN 2023
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	13	Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	penanggulangan, dan pemulihan
			Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif
			Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
			Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.
			Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.
			Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
			Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran airutamanya yang berdomisili di sekitar sungai
			Penyuluhan melalui jalurpendidikan-pendidikan formal atau sekolah
			Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air
			Pemantauan kualitas tanah
			pengendalian dan pengawasan pemanfaatanair limbah untuk aplikasi pada tanah
			Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat
			Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan
Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutananaman.			
Penetapan izin lingkungan			
Peningkatan sistem ketahanan bencana			Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah
			Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.
			Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.
			Integrasi kajian resiko bencana



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			TAHUN 2023		
7	Menurunkan resiko bencana	14	Menurunnya resiko akibat bencana	yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.	kedalam RTRW
					Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
					Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana
					Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan
					Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.
					Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana
					Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.
					Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
					Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.
					Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
					Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang					



VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			TAHUN 2023	
			diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana	
			Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan	
			Pengembangan Desa tangguh bencana dangerakan Desa hebat.	

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2023**

Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Maros pada tahun 2023, secara umum dapat dikatakan sangat tinggi, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 103,13 persen. Dari keseluruhan indikator kinerja utama Kabupaten Maros, hanya ada dua indikator yang tidak masuk kategori sangat tinggi, yakni persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan capaian 40,57 persen (Sangat Rendah), dan indikator Indeks kapasitas dengan capaian 73,26 (Sedang). Gambaran capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator	2023		CAPAIAN
		Target	Realisasi	
1	2	9	10	11
1	Nilai SAKIP	65,00	64,08	98,58
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	3,50	107,69
3	Indeks Pendidikan	63,47	64,26	101,24
4	Indeks Kesehatan	75,96	76,07	100,14
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan	3,25	3,55	109,23
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,12	3,64	113,19
7	Indeks Pembangunan Gender	90,04	89,20	99,07



No	Indikator	2023		CAPAIAN
		Target	Realisasi	
1	2	9	10	11
8	Inflasi	3,14	2,89	108,65
9	Indeks Harga Konsumen	107,24	113,35	94,61
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat	3,25	3,28	100,92
11	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	5,62	2,28	40,57
12	PDRB Per Kapita	51,03	64,69	126,77
13	Angka kemiskinan	8,81	9,65	91,30
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,25	3,24	99,69
15	Indeks Kualitas Udara	87,40	88,74	101,53
16	Indeks Kualitas Air	50,30	53,64	106,64
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,32	53,71	102,66
18	Indeks Ancaman Bencana	16,65	16,4	98,50
19	Indeks Kerugian	6,65	6,81	97,72
20	Indeks Kapasitas	0,86	0,63	73,26
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>103,13</b>

Pada Tahun 2023, Kabupaten Maros telah melaksanakan 99 program dengan total anggaran sebesar Rp 987.385.702.239,00 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Secara Umum, besaran anggaran pada tahun 2023 berdasarkan sasaran tiap-tiap misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Setiap Misi RPJMD**

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD		Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	739,210,591,704.00
		2	Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	8,138,220,120.00
2	Meningkatkan Pembangunan Sumber	1	Meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat	61,664,485,518.00



No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD		Anggaran (Rp)
	Daya Manusia	2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan	2,507,773,700.00
		3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender	282,610,000.00
3	Meningkatkan Keterjangkauan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Dasar Secara Inklusif	1	Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Konsumsi Masyarakat	297,269,450.00
		2	Terpebihinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat	45,049,550,261.00
4	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	1	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB	18,297,999,195.00
		2	Menurunnya Jumlah pengangguran	3,400,000.00
		3	Terkendalinya Laju Inflasi	1,972,415,450.00
		4	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin	77,630,841,241.00
5	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Pemerataan Wilayah	1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat	29,818,342,700.00
6	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Menurunnya Resiko Akibat Bencana	2,512,202,900.00
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				<b>987,385,702,239.00</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024





### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Latar Belakang

Konsep Otonomi Daerah memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh Pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.



Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.



## b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada



masyarakat.

4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis.

### c. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-



SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **d. Arah Kebijakan**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Pelayanan Publik.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).



### a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 71,00 dan tahun 2023 sebesar 71,63 dengan perubahan sebesar 0,63%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros  
Tahun 2022 – 2023**

KOMPONEN IPM	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Angka Harapan Hidup	69,28	69,45	
Rata-rata Lama Sekolah	8,02	8,03	
Harapan Lama Sekolah	13,30	13,50	
<b>IPM</b>	<b>71,00</b>	<b>71,63</b>	<b>1,008%</b>

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

### b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 9,43 persen dan tahun 2023 sebesar 9,65 persen dengan perubahan sebesar 1,02%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Kemiskinan Kabupaten Maros  
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Angka Kemiskinan %	9,43	9,65	1,02%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini masih menjadi target dan upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah sehingga dapat menekan angka kemiskinan kedepannya. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

**c. Angka Pengangguran**

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 5,04% dan pada tahun 2023 sebesar 3,64% dengan perubahan sebesar 0,72%.

Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Pengangguran Kabupaten Maros  
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Angka Pengangguran %	5,04	3,64	0,72%.

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto





menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari target pada RPJMD Kabupaten Maros. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yakni 9,13% dan pada tahun 2023 sebesar 5,00 persen dengan perubahan sebesar 0,54%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros  
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi %	9,13	5,00.	0,54%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

**e. Pendapatan Per Kapita**

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2022 PDRB perkapita sebesar 58,55 dan terakhir pada tahun 2023 sebesar 64,69 yang artinya bahwa kondisi kemakmuran Masyarakat mengalami tren peningkatan yang positif.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**PDRB Perkapita Tahun 2022-2023  
Kabupaten Maros**

Uraian	2022	2023	Perubahan %
Nilai PDRB ( Juta Rp.)	23.544.300	26.389.000	
Jumlah Penduduk (jiwa)	391.489	410.699	
PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa)	58,55	64,69	1,10%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

**f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2022 sebesar 0,362 dan tahun 2023 sebesar 0,372 dengan perubahan sebesar 1,027%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros  
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) %	0,362	0,372	1,027%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

**2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan



menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentraliasisi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.



## 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	243 PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6000 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	720 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	358 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	122 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	312	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	19.746 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.998 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.287 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7.532 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.217 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.335 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.079 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.047 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	264 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	240 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	499 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	262 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	287 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	696 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	194 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	48 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	137 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	84 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	110 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	77 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	71 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	194 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	7 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	KESEHATAN	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2 RS Rujukan	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS Rujukan	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6.168	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	444	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6.168	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	444	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6.168	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	444	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6004	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	444	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28.094	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	2.661	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	62.647	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.674	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	164.945	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	569	DINAS KESEHATAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	31.353	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	569	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14.464	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	522	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.960	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	522	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	884	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	78	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5.895	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	306	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7.490	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	513	DINAS KESEHATAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
3	PEKERJAAN UMUM	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
			i. Bangunan perkuatan tebing (m)				
ii. Tanggul sungai (m)							
iii. Kanal banjir (m)							
iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)							
v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)							
vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)							
vii. Breakwater (m)							
viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)							



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
			ii. Tanggul sungai (m)		
			iii. Kanal banjir (m)		
			iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)		
			v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)		
			vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)		
			vii. Breakwater (m)		
			viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) X100%	81,56%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Panjang jaringan irigasi primer (m) 97.496 X100%		
			121.032		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) X100 % Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 54.279 X100 % 69.402	78,20%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) X100 % Panjang jaringan irigasi tersier (m) 0 X100 % 0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN Irigasi Tersier merupakan kewenangan Provinsi
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak Ada	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	99.784	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.042	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	101.826	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	21	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	101.826	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">94.528                      X100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">99.249</p>	97,99%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">0                                      X100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">0</p>	0%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">275                                      X100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">6.704</p>	5,36%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">1.464                                      X100 %</p> <hr/> <p style="text-align: center;">90.907</p>	3,97%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan	$\sum$ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	DINAS PEKERJAA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}}{2} \times 100\%$	100%	N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			$\frac{2}{2} \times 100\%$			
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	20 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			$\frac{6}{50} \times 100\%$			
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	5,36%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			$\frac{275}{6.704} \times 100\%$			
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot (m)}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	0,02%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			$\frac{15}{94.528} \times 100\%$			
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			$\frac{4.778}{4.778} \times 100\%$			
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	9.817		PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3.666 Bangunan	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	28 Unit Bangunan	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.238,57 Km	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang dibangun	1,34 Km	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				HAN	
		Panjang jembatan yang dibangun	88,94 Meter	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Panjang jalan yang Ditingkatkan (struktur/fungsi)	46,65 Km	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	7,2 Meter	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Panjang jalan yang dipelihara	17,21 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di		PEKERJAA N UMUM, PENATAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		wilayah kabupaten/kota	3	RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	71	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	261	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	8	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	2	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	71	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	71	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	7	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihitepatan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	38	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihitepatan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	38	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBU NGAN DAN PERTANA HAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	7	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	38	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PERUMAHAN RAKYAT	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Belum ada relokasi sesuai rencana aksi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2023
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2023
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	17,07 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	272 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	6,21 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah di kab/kota	91.432 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit PK RTLH	272 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	29.739 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	606 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$ $\frac{89.628}{91.432} \times 100\%$	98,03%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah rumah pembangunan baru	35.098 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1.315	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	86		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.598		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	53		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 PPNS		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	136		POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$ $\frac{91.235}{91.235} \times 100\%$	23,52%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			387.984			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan <u>dokumen yang disusun</u> X100%</p> <p>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</p> <p><u>1</u> X100%</p> <p>1</p>	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan <u>dokumen yang disusun</u> X100%</p> <p>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</p> <p><u>0</u> X100%</p> <p>0</p>	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	Belum memiliki Rencana Kontijensi Bencana sehingga belum dibuat dokumen Renkon
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<p>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut <u>pelatihan</u> X100%</p> <p>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</p> <p><u>125</u> X100%</p> <p>398.866</p>	0,03%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<p>Jumlah warga negara yang ikut <u>pelatihan</u> X100%</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p><u>0</u> X100%</p> <p>398.866</p>	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	Pada tahun 2023 BPBD Kab. Maros tidak menganggarkan kegiatan pelatihan untuk Warga Negara
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<p>Jumlah warga negara yang mendapat layanan <u>pusdalops</u> X100%</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p><u>41.250</u> X100%</p> <p>398.866</p>	10,34%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan <u>peralatan perlindungan</u>	<p>Jumlah warga negara yang mendapat layanan <u>peralatan perlindungan</u> X100%</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>398.866 X100%</p> <p>398.866</p>	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status	<p>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB X100%</p>	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA	Tidak Ada Penetapan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		KLB	Jumlah seluruh penetapan status KLB		DAERAH	Status Darurat Bencana
			0	X100%		
			0			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	X100%	100 %	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	X100%		
			2	X100%		
			2			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	X100%	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	X100%		
			131	X100%		
			131			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	X100%	0,02%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	X100%		
			9	X100%		
			41.056			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	224 Jenis Pelayanan		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 7 Sektor		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	60		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Petugas Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada Kelurahan/ Desa di Kab. Maros Tahun 2021 belum tersedia ataupun dibentuk
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	235	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada 208 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Ada 181 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6	SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	238	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	4 Tim	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	275	DINAS SOSIAL	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	245	DINAS SOSIAL	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	248	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	30	DINAS SOSIAL	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	DINAS SOSIAL	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Jumlah penyandang		DINAS	
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	31	SOSIAL	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	275	DINAS SOSIAL	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	31	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	275	DINAS SOSIAL	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	31	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	31	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	2.019	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	2.019	DINAS SOSIAL	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL	UPT Rumah Penampungan Trauma Center
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	6	DINAS SOSIAL	paket permakanan khusus bagi kelompok rentan
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	6	DINAS SOSIAL	korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	30	DINAS SOSIAL	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
	<b>TENAGA KERJA</b>	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi Indikator - Target Indikator	X100%	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			Realisasi	X100%		
			0	0		
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan Program PBK kualifikasi KKNi atau Okupasi pada tahun n	X100%	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			Keseluruhan Program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	X100%		
			0	0		
	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur yang bersertifikat pada tahun n	X100%	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Instruktur Seluruhnya Pada Tahun n	X100%			
		133	133			
	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur pada tahun n	X100%	7,03%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	X100%			
		133	1.892			
	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	X100%	18,18%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah seluruh LPK pada tahun n	X100%			
		4	22			
		Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	X100%	72,73%	DINAS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		memiliki perizinan	memiliki perizinan pada tahun n Jumlah LPK yang terdata pada tahun n  16 22	X100%		PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
		Jumlah penganggur yang dilatih	1.892 Orang		-	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n Jumlah orang yang dilatih pada tahun n  3.466 3.466	X100% X100%	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
		Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan pada tahun n  600 600	X100% X100%	100%	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIG RASI
		Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n  45 45	X100% X100%	100%	DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIG RASI
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\Sigma$ CPMI dilatih $\Sigma$ CPMI terdaftar  15 15	X100% X100%	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	15 Orang			DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIG RASI
		Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n Jumlah Perusahaan n pada tahun n  491	X100% X100%	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			491			
		Data Tingkat Produktivitas Total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)		-192,73%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n X100% Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih <u>119</u> X100% 272		43,75%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n X100% Jumlah Persahaan yang memiliki serikat Pekerja/ Serikat Buruh <u>51</u> X100% 4		1275%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	4			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n X100% Jumlah Perusahaan n pada tahun n <u>429</u> X100% 270		159%	DINAS PENANAMA N NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n X100% Jumlah Perusahaan n pada tahun n <u>265</u> X100% 491		53,97%	DINAS PENANAMA N NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$	1,83%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah mogok kerja	0		DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Jumlah penutupan perusahaan	0		DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perselisihan PHK	9		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	207		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	8 Kali		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 Kali		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase	Jumlah perusahaan		DINAS	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n			
			Jumlah Perusahaan n pada tahun n		33,33%	
			3	X100%		
			9			
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.493		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2.399		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus(BKK) wilayah kab/kota	1		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	600		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antarkerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	22		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	600		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	100 %	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			$\frac{15}{15} \times 100\%$			
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	15		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	100 %	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	1 Orang
			$\frac{1}{1} \times 100\%$			
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	100 %	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			$\frac{15}{15} \times 100\%$			
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rasio tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	45 OPD		DP3ADALDUK	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	254		DP3ADALDUK	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2		DP3ADALDUK	Forum Anak
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab./kota $\frac{54}{54} \times 100\%$	100%	DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1		DP3ADALDUK	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	70		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	19		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan			DP3ADALDUK	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1			
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1		DP3ADALDUK	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan		100%	DP3ADALDUK
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			
			$\frac{12}{12} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
10	PERTANAHAN	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi		
			0 X100%		
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee) X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek)		
			0 X100%		
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkansbagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		
			0 X100%		
		Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun		
			0 X100%		
Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun				
	0 X100%				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
11	LINGKUNGAN HIDUP	Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)  IKA = 53,64 IKU = 88,74 ITH = 53,71	67,87 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	88,74%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}}{\text{40}} \times 100\%$	100 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
				$\frac{\text{40}}{\text{40}} \times 100\%$			
				40			
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada	$\frac{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{0}} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
				$\frac{\text{0}}{\text{159.545}} \times 100\%$			
	159.545						
Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui	$\frac{\text{Jumlah usulan MHA}}{\text{0}} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
		$\frac{\text{0}}{\text{0}} \times 100\%$					
		0					
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah MHA yang ada}}{\text{0}} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
		$\frac{\text{0}}{\text{0}} \times 100\%$					
		0					

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$ 0 X100% 0	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$ 0 X100% 0	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	$\frac{74}{74}$		
		Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	$\frac{8}{8}$		
		Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peristiwa kematian yang dilaporkan	$\frac{2.613}{2.613}$		X100%			
Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam <u>satun tahun</u> 2 tahun	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	$\frac{2}{2}$	X100%				

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	80 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Ada
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Semua Desa di tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	540	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PKK dan Posyandu
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	36 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	118 Kelompok Binaan PKK di 36 Desa





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 Buku	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	27,24 Tahun	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f \times k}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun $b_i = 443$ $p_i^f \times k = 15.398$	28,79 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) X100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) $\frac{364.160}{364.160} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	38 Stakeholders		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP X100% Jumlah faskes $\frac{31}{31} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif X100% Jumlah PUS $\frac{8.454}{39.948} \times 100\%$	21,16 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	24 Pokja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	<p>Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode <u>kontrasepsi cara modern</u> X100%</p> <p>Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan</p> <p><u>4.957</u> X100%</p> <p>4.957</p>	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		42,72 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<p>Jumlah peserta KB pada <u>Keluarga Penerima PBI</u> X100%</p> <p>Jumlah Keluarga PBI</p> <p><u>16.913</u> X100%</p> <p>47.662</p>	35,49 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	X100%	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	X100%		
			$\frac{1}{1}$			
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	X100%	38,61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah kendaraan wajib uji	X100%		
	$\frac{178}{461}$					
Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
	Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	X100%				
	$\frac{0}{0}$					
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	X100%	82,5 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	X100%				
	$\frac{99}{120}$					
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota	X100%	0,825%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
	Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota	X100%				
	$\frac{99}{120}$					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh <u>Dinas Kominfo</u>	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah Perangkat Daerah			
			<u>39</u>	X100%		
			39			
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas <u>Kominfo</u>	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah Perangkat Daerah				
		<u>39</u>	X100%			
		39				
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ya, 181		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan instansi Penyelenggara Negara domain dan sub domain sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.5 <u>Tahun 2015</u>	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah				
		<u>8</u>	X100%			
		8				
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web <u>yang sesuai standar</u>	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah perangkat daerah				
		<u>50</u>	X100%			
		50				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			50		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<p>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Jumlah perangkat daerah</p> <p>21</p> <p>X100%</p>	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<p>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>Jumlah layanan</p> <p>181</p> <p>X100%</p>	3620 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<p>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>Jumlah layanan</p> <p>5</p> <p>X100%</p>	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah sistem elektronik</p> <p>34</p> <p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<p>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</p> <p>181</p> <p>X100%</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data	<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> <p>X100%</p>	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		pemerintah	Jumlah perangkat daerah 21	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan <u>data di pusat</u> Jumlah perangkat daerah 21	X100% X100%	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			39			
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis <u>datanya</u> Jumlah perangkat daerah 19	X100% X100%	48,72%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			39			
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat <u>berbagi pakai</u> Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah 19	X100% X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			19			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <u>smart city</u> Jumlah perangkat daerah 5	X100% X100%	12,82 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			39			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas <u>kominfo</u> Jumlah ASN Pengelola TIK 22	X100% X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			22			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: <input type="checkbox"/> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran <input type="checkbox"/> Penganggaran <input type="checkbox"/> Strategi <input type="checkbox"/> Peta Jalan <input type="checkbox"/> Arah Kebijakan		3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<p>1 Cetak biru teknis/Peta rencana strategi</p> <p>2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penugasan pejabat</li> <li>- Kewenangan</li> <li>- Tugas dan tanggung jawab</li> </ul>	Ada	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	<p>Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan <u>pemerintah</u> X100%</p> <p>Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><u>69</u> X100%</p> <p>69</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<p>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi <u>komunikasi (STRAKOM)</u> X100%</p> <p>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p><u>7</u> X100%</p> <p>7</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<p>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan <u>SOP</u> X100%</p> <p>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik</p> <p><u>7</u> X100%</p> <p>7</p>	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	X100%	157,14 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam			
			$\frac{77}{246}$	X100%		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tahun yang dilaporkan	X100%	100%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	X100%		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	X100%	21,91 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah koperasi yang ada	X100%		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	X100%	21,91 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	X100%					
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	X100%	21,51%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
	Jumlah koperasi yang ada	X100%				
Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	X100%	1,48 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
	Jumlah koperasi yang ada	X100%				





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9.960			
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{251} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{41}{251} \times 100\%$	16,33 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{251} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{55}{251} \times 100\%$	21,91%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{55}{251} \times 100\%$	21,91%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{2}{251} \times 100\%$	0,80%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	X100%	82,56 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah wirausaha yang ada	X100%		
			961	X100%		
			1.164			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	X100%	32,19 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro yang ada	X100%		
			9.125	X100%		
			28.351			
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	X100%	72,28%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro yang ada	X100%		
			20.492	X100%		
			28.351			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	X100%	52,02 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	X100%		
			11.036	X100%		
			21.213			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	X100%	11,63%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	X100%		
			2.953	X100%		
			25.398			
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	X100%	20,26%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro yang ada	X100%		
			1.876	X100%		
			9.125			
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga Pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan	X100%	20,26 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah usaha mikro yang ada	X100%		
			5.744	X100%		
			28.351			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada Fasilitas/Insentif	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	Naskah Akademik Perda Telah disusun Tahun 2023 dan Perdanya sudah dibuat 2023 Namun sampai dengan saat ini belum selesai
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada, 6 SOP	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal per tahun	2	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Ada, 6 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	
		Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	172 Konsultasi	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	6.948 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKE RJAAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

		Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	90.007.3 13.942.2 70	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Ada, 12 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	144 Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	6 Permintaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	6.396 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	3.846 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	5.813 Orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	863 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	157 Orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1 Cabang Olah raga	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Tersedianya buku profil daerah	Ada, 1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	26		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	26		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4			5	6
21	PERSANDIAN	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan <u>strategis teramankan</u>	X100%	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kegiatan strategis yang ada	<u>0</u>	X100%			
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada	<u>34</u>			
Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah Sistem Elektronik (SE) atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko <u>kategori rendah</u>	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada	<u>34</u>				X100%	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	<u>Jumlah titik teramankan</u>	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah titik pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	<u>50</u>	X100%			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan	346 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	244 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	244 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi+ Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – JumlahCB dihapuskan	75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar  Jumlah CB diselamatkan = Jumlah CB diamankan = Jumlah CB dizonasi = Jumlah CB dipelihara = Jumlah CB dipugar =	346 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	90 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	51 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah CB diteliti = 0 Jumlah CB direvitalisasi = 0 Jumlah CB diadaptasi = 0			
		Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	244 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah koleksi museum dikelola = 5 Jumlah koleksi museum diamankan = 4 Jumlah koleksi museum dikembangkan = 4 Jumlah koleksi museum dimanfaatkan = 4			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	2.869 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah partisipasi dalam pengelolaan museum	2.579		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	250		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	15 Tim	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	5 Tim Ahli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	5 Orang Ahli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>		<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah SDM Museum	5 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	5 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Sarana dan prasarana CB Sarana dan Prasarana Museum	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	18 Kegiatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
23	PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) X100%	89,82 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)				
			358.244 X100%				398.866
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan secara online maupun onsite X100%	3,27 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) X100%				
			13.031 X100%				398.866
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya X100%	0,03%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) X100%				
			126 X100%				398.866
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan X100%	0,07 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya X100%							
297 X100%	398.866						
Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	63,12		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	37		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip <u>1.255</u>	X100% X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip <u>3.357</u>	X100% X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip <u>106</u>	X100% X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN <u>0</u>	X100% X100%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		1.352	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah		1.424	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik		106	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>		<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
		menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		AN DAN KEARSIPAN	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
25	PERIKANAN	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	26 Rumah Tangga	DINAS PERIKANAN	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	DINAS PERIKANAN	
			100%		
			$\frac{1}{1} \times 100\%$		
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada	DINAS PERIKANAN	Semua izin usaha di Kabupaten Maros diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	859 Orang	DINAS PERIKANAN	
Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	285.350 Ekor	DINAS PERIKANAN			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
26	PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Entitas		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	44		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota	219 Tanda Daftar Usaha		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6.373 Orang		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)	62 Kali	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/ kota	Tidak Ada		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	13		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	X100%	22,68 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	315			
				1.389			
Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	X100%	7,69%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	280				X100%	
		3.640					
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 Lokasi		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Kecamatan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
27	PERTANIAN	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	1.900		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Prasarana pertanian yang digunakan	30		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi izin usaha pertanian	23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah prasarana yang dibangun				
			30	X100%			
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
usulan usaha pertanian							
23	X100%						
Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	X100%	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	Luas area terkena bencana						
	83.721,30	X100%					
		83.721,30					





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
28	PERDAGANGAN	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :  a. Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	X100 %	100 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	X100 %		
			3	3		
			Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	X100 %		
		Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	X100 %			
		3	3			
		Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	X100 %	23%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah permohonan penerbitan TDG	X100 %			
		Persentase penerbitan TDG	7	30		
			Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	X100 %	47%
Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota	X100 %					
14	30					
Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :  a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	X100 %	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	X100 %				
	0	0				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	0%	
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$	0%	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah KA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya            a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p>	75%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) a = 0 b = 0		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	3,997%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$x = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b=Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c= RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			a = 21.277	44,72%	
			b = 22.535,1		
			c = 25.039		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<p>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah potensial UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab./kota <math>\times 100\%</math></p> <p><math>\frac{1.161}{994}</math></p>	117%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<p>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku <math>\times 100\%</math></p> <p>Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan <math>\times 100\%</math></p> <p><math>\frac{92}{92}</math></p>	100%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
29	PERINDUSTRIAN	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	0	0%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	<p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIK</p> <p>Tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%)</p> <p>b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK(20%)</p> <p>c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)</p> <p>d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)</p> <p>e) Penetapan Perda RPIK (10%)</p> <p>Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK</p>		100%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	1.293	1.293	100%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	0	0	0%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Ada Izin Perluasan Industri yang diterbitkan 2023
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota			0		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab./Kota yang masuk dalam SIINas			9,13%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	Total populasi perusahaan industri  $\frac{118}{1.293} \times 100\%$	PERDAGANGAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
30	TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	6	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	150	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBERDATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di <u>satuan PAUD</u>	X100%	96,28 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	X100%		
			<u>14.820</u>			
			15.392			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di <u>sekolah dasar</u>	X100%	105,66 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	X100%				
		<u>48.845</u>				
		46.225				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di <u>sekolah menengah pertama</u>	X100%	103,06 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	X100%				
		<u>22.797</u>				
		22.120				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan <u>kesetaraan</u>	X100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	X100%				
		<u>273</u>				
		273				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan	X100%	1,2761 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota				
			$\frac{509}{398.866}$	X100%			
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	X100%	100%	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah anak usia 7-12 Jumlah RS di Kabupaten / Kota				
			$\frac{16}{16}$	X100%			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	X100%	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota				
			$\frac{6.168}{6.168}$	X100%			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	X100%	100%	DINAS KESEHATAN	
Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota							
$\frac{6.168}{6.168}$	X100%						
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	X100%	100%	DINAS KESEHATAN			
	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota						
	$\frac{6.004}{6.004}$	X100%					
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	X100%	100 %	DINAS KESEHATAN			
	Jumlah Balita di Kabupaten / Kota						
	$\frac{28.094}{28.094}$	X100%					
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	X100%	100%	DINAS KESEHATAN			





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<p>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota</p> <p style="text-align: right;"><math>\frac{62.647}{62.647} \times 100\%</math></p>		
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota <math>\times 100\%</math></p> <p style="text-align: right;"><math>\frac{164.945}{164.945} \times 100\%</math></p>	100 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten / Kota <math>\times 100\%</math></p> <p style="text-align: right;"><math>\frac{31.353}{31.353} \times 100\%</math></p>	100%	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten / Kota <math>\times 100\%</math></p> <p style="text-align: right;"><math>\frac{14.464}{14.464} \times 100\%</math></p>	100 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah penderita DM di Kabupaten / Kota <math>\times 100\%</math></p> <p style="text-align: right;"><math>\frac{2.960}{2.960} \times 100\%</math></p>	100 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten / Kota <math>\times 100\%</math></p> <p style="text-align: right;"><math>\frac{884}{884} \times 100\%</math></p>	94,489 %	DINAS KESEHATAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar X100%	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota <u>5.895</u> X100% 5.895			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar X100%	100 %	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita di Kabupaten / Kota <u>7.490</u> X100% 7.490			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten
			$\frac{0}{1} \times 100\%$			
			$\frac{0}{1} \times 100\%$			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)}} \times 100\%$	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten
$\frac{0}{1} \times 100\%$						
$\frac{0}{1} \times 100\%$						
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kotaluas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN			
	$\frac{6.081}{6.081} \times 100\%$					
	$\frac{6.081}{6.081} \times 100\%$					
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$	98,49%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN			
	$\frac{87.527}{87.527} \times 100\%$					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
			88.870				
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$	100 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			$\frac{101.826}{101.826} \times 100\%$				
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			$\frac{9.817}{9.817} \times 100\%$				
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	77,14 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			$\frac{925.401}{1.238.567} \times 100\%$				
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	85,44 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			$\frac{487}{570} \times 100\%$				
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			$\frac{260}{260} \times 100\%$				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
4	PERUMAHAN RAKYAT	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	X100%	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n				
			57	X100%			
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	X100%	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak ada program kegiatan terkait pada Tahun 2023
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	X100%			
			0	X100%			
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	X100%	60,74%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	X100%			
			10,37	X100%			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	X100%	32,132 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	X100%			
			29.379	X100%			
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	X100%	100 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Jumlah unit rumah kab/kota	X100%					
	31.898	X100%					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			$\frac{86}{86} \times 100\%$			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			$\frac{53}{53} \times 100\%$			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	398.866 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	217.776 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	41.250 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas}}{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<p>Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</p> <hr/> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota <math>\frac{222}{222} \times 100\%</math></p>		
		Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	<p>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran</p> <hr/> <p>1.914 222</p>	8,62 Menit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	100%	DINAS SOSIAL	
			$\frac{275}{275} \times 100\%$			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100\%$	100%		
			$\frac{2.019}{2.019} \times 100\%$			





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	X100%	100 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten			
			$\frac{3}{3}$	X100%		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	X100%	44,27 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan			
			$\frac{6.334}{14.309}$	X100%		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	X100%	184.422.391.501.85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah tenaga kerja			
			$\frac{26.389.000.000.000}{14.309}$	X100%		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	X100%	89,81 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Perusahaan			
			$\frac{441}{491}$	X100%		
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	X100%	25,01 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	Jumlah pencaker yang terdaftar					
	$\frac{600}{2.339}$	X100%				

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD}} \times 100\%$	38,39 %	DP3ADALDUK	
			$\frac{525.732.372.278}{1.369.335.090.015} \times 100\%$			
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	100%	DP3ADALDUK	
			$\frac{54}{54} \times 100\%$			
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	8,56 %	DP3ADALDUK	
			$\frac{12}{140.106} \times 100\%$			

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan X100%		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah kebutuhan pangan 1.061,53 X100%	224,37 %		
			473,11			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi					
			1.260.507,53	X100%				
				1.260.507,53				
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum					
			19.082	X100%				
				19.082				
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			Luas izin lokasi yang diterbitkan					
			613.168,86	X100%				
				613.168,86				
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			Jumlah penerima tanah obyek landreform					
			2.250	X100%				
				2.250				
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
			Luas izin membuka tanah yang diterbitkan					
836.236	X100%							
		836.236						
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN				
	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan							
	51	X100%						
		51						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan IKA = 53,64 IKU = 88,74 IKL = 53,71		67,87 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$	64,18 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			$\frac{102.405}{159.545} \times 100\%$			
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	0 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	$\frac{0}{14} \times 100\%$					

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	X100%	98,74 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas			
			$\frac{277.829}{281.360}$	X100%		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	X100%	30,08 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	X100%		
			$\frac{36.520}{121.405}$			
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	X100%	88,04 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	X100%		
			$\frac{114.757}{130.336}$			
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	X100%	41,67 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah OPD	X100%		
			$\frac{5}{12}$			

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	X100%	100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			
			1	X100%		
		1				
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	X100%	330,76 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)					
	43	X100%				
13						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
14	PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,13 Per Perempuan Usia 15 -49 tahun		DP3ADALDUK		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	X100%	62,40 %	DP3ADALDUK	
			Jumlah Pasangan Usia Subur				
			39.548	X100%			
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need))	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani	X100%	14,29 %	DP3ADALDUK			
	Jumlah Pasangan Usia Subur						
	9.05	X100%					
		63.380					



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = Bobot angkutan jalan = 0,8 IK2 = 7 Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan = 0,3	0,85	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,46		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
			Jumlah OPD					
			39	X100%				
				39				
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
			Jumlah layanan publik					
			11	X100%				
				11				
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	X100%	70,01%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
Jumlah penduduk								
185.100	X100%							
		264.392						

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
17	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, <u>volume usaha dan aset</u> X100%	53,17 %	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah seluruh koperasi			
		67 X100%	19,54%			
		251				
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha X100%	19,54%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah usaha mikro keseluruhan					
5.539 X100%						
28.351						

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	<b>PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota X100%		DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
			Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota <u>58.112.755.494.568</u> X100%	182,202 %		
			31.894.558.447.702			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	X100%	6,80 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			6.396	94.000		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	X100%	7,54%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			7.093	94.000		
Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		6 Medali	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	X100%	100 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah OPD			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan pembangunan daerah	X100%	100 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Jumlah OPD			

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi X100%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Jumlah area penilaian	52,40%		
			<u>338</u> X100%			
			645			



## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Terlestariannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	X100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah cagar budaya yang terdata	98,48 %		
			195	X100%		
			198			





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	63,12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) . UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan            UPLM 2 = Ketercukupan koleksi            UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan . UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan            UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP            UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan            UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p> $\text{Masyarakat} = \frac{\sum \text{UPLM}}{\text{AM}} \times 100$ <p>UPLM 1= 0,6260            UPLM 2= 0,4436            UPLM 3= 0,7801            UPLM 4= 1,0000            UPLM 5= 1,0000            UPLM 6= 1,0000            UPLM 7= 1,0000</p>	83,57 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip            a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip            i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip            s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik            j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p>a = 1.107            i = 2.545            s = 98            j = 0</p>	75%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK            b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK            g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK            a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK            c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK            i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p> <p>m = 100            b = 100            g = 100            a = 100            c = 100            i = 0</p>	83,33 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>		<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>
<b>25</b>	<b>PERIKANAN</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dariseluruh kabupaten/kota di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	55.897,3 Ton 34.127 Ton	163,79 Ton	DINAS PERIKANAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1	X100%	198,08 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Jumlah wisatawan tahun n-1				
			4.235	X100%			
				2.138			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1	X100%	1,77 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Jumlah wisatawan tahun n-1				
(592.153 - 581.878)	X100%						
		581.878					
Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	X100%	76,25 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	Jumlah kamar yang tersedia						
	149.750	X100%					
		196.370					
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		0,75%		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		9,29%		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	X100%	628,50 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
			Luas panen					
			$\frac{360.213.48}{56.865}$	X100%				
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	X100%	99,88 %	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya								
$\frac{(9.626 - 4.840)}{1.018}$	X100%							



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
28	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan X100%	0,82%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota				
			75 X100%				
					9.125		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi X100%	84,97%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			RDKK				
			21.277 X100%				
					25.039		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan X100%	116,80 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota							
1.161 X100%							
			994				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
29	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022}}{\text{Jumlah IKM 2022}} \times 100\%$	229,846 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			$\frac{901}{392} \times 100\%$		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	82,65 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	93,47%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			$\frac{844}{903} \times 100\%$		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	$\frac{0}{1} \times 100\%$				
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)		DINAS KOPERASI, UKM		

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		terkini	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</li><li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li></ul> 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li><li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li></ul> Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) 1) Keterkinian informasi industri = 5% 2) Kelengkapan informasi industri = 5%	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			100%		





**2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$		15,47 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			$\frac{525.732.372.278}{1.521.013.274.022,1} \times 100\%$			
		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$		20,686%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			$\frac{312.458.644.282,03}{1.521.013.274.022,1} \times 100\%$			
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level 3	INSPEKTORAT
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level 3	INSPEKTORAT
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$		62,49%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	$\frac{950.538.892.886,08}{1.521.013.274.022,1} \times 100\%$					
Opini Laporan Keuangan	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	DISCLAIMER WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022}}{\text{Jumlah kontrak infrastruktur}} \times 100\%$		22,11%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			$\frac{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023}}{52.194.547.658,37} \times 100\% = \frac{122.115.190.519,81}{52.194.547.658,37}$		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{5.203} \times 100\% = \frac{241}{5.203}$	4,63%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{1.369.335.190.015} \times 100\% = \frac{409.447.452.241}{1.369.335.190.015}$	29,90%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)-Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{192.641.088.637,75} \times 100\% = \frac{481.668.649.540,43}{192.641.088.637,75}$	250,03 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{2.856} \times 100\% = \frac{1.962}{2.856}$	68,69%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{1.962} \times 100\%$	16,42 %	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
		kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		AN SUMBER DAYA MANUSIA		
			$\frac{469}{2.856} \times 100\%$				
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi		45,84%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
		$\frac{215}{469} \times 100\%$					
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1 \times 100\%$	8,4427 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
			Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =	1.521.013.274.022,1			
			Total belanja APBD =	1.604.151.161.593			
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} - 1 \times 100\%$	1,60%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
			Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =	312.458.644.282,03			
			Total PAD dalam APBD =	307.532.402.823			
		Asset Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya			
			3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya			
			4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya			
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	7,67 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	$\frac{108.529.053.450,97}{1.413.651.866.266} \times 100\%$						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCIKELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda X100%	94,46%	KOMINFO	
			Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda <u>1.394.923.355.759</u> X100% 1.476.774.282.105.000			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda X100%	66,66%	KOMINFO	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci <u>8</u> X100% 12			



### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan: (1) Arahan Presiden terkait permasalahan efisiensi, (2) Permasalahan dalam manajemen kinerja, (3) Perubahan paradigma manajemen kinerja, (3) Program logik dan cascading kinerja, (4) Arti nilai hasil akuntabilitas kinerja, (5) Capaian efisiensi anggaran, (6) Penerapan manajemen kinerja, dan (7) E-Sakip Reviu.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2023 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Utama Kabupaten Maros tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) X 100%**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2021-2026. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2023 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.

**Tabel 2.1****Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

**a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros 2021 - 2026. Ini berarti, dokumen RKPD Tahun 2023 merupakan tahun pertama penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021 -2026.

Sejumlah sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maros dapat dicapai melalui pencapaian target indikator program dan kegiatan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2023 melaksanakan 178 (seratus tujuh puluh delapan) program prioritas. Adapun sasaran dan indikator sasaran serta indikasi program dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 meliputi :



**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Pemerintah Kabupaten Maros**

<b>MISI 1</b>			
<b>MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Prioritas Pembangunan 1 : Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang professional, bersinergi, dan berkinerja tinggi</b>			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (65) nilai Level
2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (3,25) nilai indeks
<b>MISI 2</b>			
<b>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
<b>Prioritas Pembangunan 2 : menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	63,47 nilai Indeks
		Indeks Kesehatan	76,07 Nilai Indeks
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	B (3,25) Nilai Indeks
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	90,04 Nilai Indeks
<b>MISI 3</b>			
<b>MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF</b>			
<b>Prioritas Pembangunan 3 : mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Indeks harga konsumen	107,24
2	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B (3,25) Nilai Indeks
<b>MISI 4</b>			
<b>MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL</b>			



<b>Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	5,62 Persen
		PDRB Perkapita	51,03 Rp/Jiwa
2	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	4,12 Persen
3	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	3,14 Persen
4	Menuunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	8,81
<b>MISI 5</b>			
<b>MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH</b>			
<b>Prioritas Pembangunan 5 : Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat ditiap wilayah</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	B (3,25) Nilai Indeks
<b>MISI 6</b>			
<b>MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA</b>			
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Prioritas pembangunan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>			
1	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	87,40 Nilai Indeks
		Indeks kualitas Air	50,30 Nilai Indeks
		Indeks kualitas Lahan	52,32 Nilai Indeks
<b>Prioritas pembangunan 7: menurunkan resiko bencana</b>			
2	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana	16,65 Nilai Indeks
		Indeks Kerugian	6,65 Nilai Indeks
		Indeks kualitas kapasitas	0,86 Nilai Indeks





## b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

### ➤ Capaian Kinerja Sasaran

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilan serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

### 2.3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kabupaten Maros Tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan pembangunan Tahun ke-3 dalam periode RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026, yang diukur berdasarkan Indikator Utama Kabupaten Maros dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2023 diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja Indikator Utama yang telah ditetapkan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2021 - 2026. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2023 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.



## MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Maksud dari Misi meningkatkan perekonomian daerah adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan, yaitu: kelembagaan, perencanaan, keuangan, proses bisnis, SDM aparatur, dan pengendalian yang diselenggarakan melalui mekanisme kerja yang sinergis, inovatif, responsif, dan produktif sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sekaligus berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Tujuan dari Misi 1 adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersinergi dan berkinerja tinggi. Sedangkan sasaran dari Misi 1 adalah; (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (2) Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Capaian masing-masing tujuan dan sasaran dari Misi 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Realisasi SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 64,08 dengan predikat “ B “. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “ Baik “, yang berarti implementasi AKIP pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama sudah baik. Walaupun nilai SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2023 meningkat dibandingkan Tahun 2022, namun realisasi SAKIP tahun 2023 belum dapat memenuhi target dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 pelaksanaan tahun 2023 (65,00) serta target dalam RPJMN tahun 2020-2024 (80-90). Karena capaian masih dibawah target, maka kinerja pada Sasaran 1 Misi 1 sebesar 94,95 persen dengan predikat kinerja **SANGAT TINGGI**.



**Tabel 2.2**  
**Target, Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai SAKIP	Poin	63,48	65,00	64,08	94,95	68,00	80-90

Sumber : Kemenpan RB, 2023

Perolehan nilai SAKIP sebesar 64,08 pada Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan RB diperoleh dari hasil evaluasi komponen-komponen sebagai berikut:

**TABEL 2.3**  
**Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2023**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,88
2	Pengukuran Kinerja	30	18,19
3	Pelaporan Kinerja	15	10,29
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,72
<b>Naili Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>64,09</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

Sumber : Kemenpan RB, 2023

Realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sedikit menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan perumusan tujuan dan sasaran strategis pada level pemerintah daerah sudah cukup baik, IKU telah memiliki definisi operasional pengukuran kinerja, pelaporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu, telah dilaksanakan evaluasi internal terhadap implemementasi SAKIP.

Walaupun telah menunjukkan peningkatan namun belum mengubah predikat kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

**a. Perencanaan Kinerja**

- Masih terdapat rumusan kinerja yang belum berorientasi hasil/outcome pada dokumen perencanaan di level Perangkat Daerah
- Cascading/penjenjangan kinerja yang disusun Perangkat Daerah belum memperhatikan prinsip penyusunan dan belum



mempertimbangkan *Logical Framework dan Critical Success Factor (CSF)*

- Cascading/penjenjangan kinerja yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi

**b. Pengukuran Kinerja**

- Dokumen Indikator Kinerja (IKU) pada sebagian Perangkat Daerah belum spesifik dan detail memberikan informasi defenisi operasional dari setiap indikator kinerja maupun formulasi perhitungan
- Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum mengisi data capaian kinerja ke dalam aplikasi sehingga datanya belum *terupdate*
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi belum dilakukan

**c. Pelaporan Kinerja**

- Pada laporan kinerja level pemerintah daerah terdapat beberapa indikator yang realisasinya di bawah 75 persen.
- Laporan kinerja level pemerintah daerah belum sepenuhnya spesifik dan detail dalam menjelaskan capaian kinerja.
- Laporan kinerja belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional
- Pelaporan Kinerja pada sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengikuti format pelaporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Lاپiran Kinerja Instansi Pemerintah, serta belum cukup menyampaikan informasi yang memadai terkait capaian kinerja

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

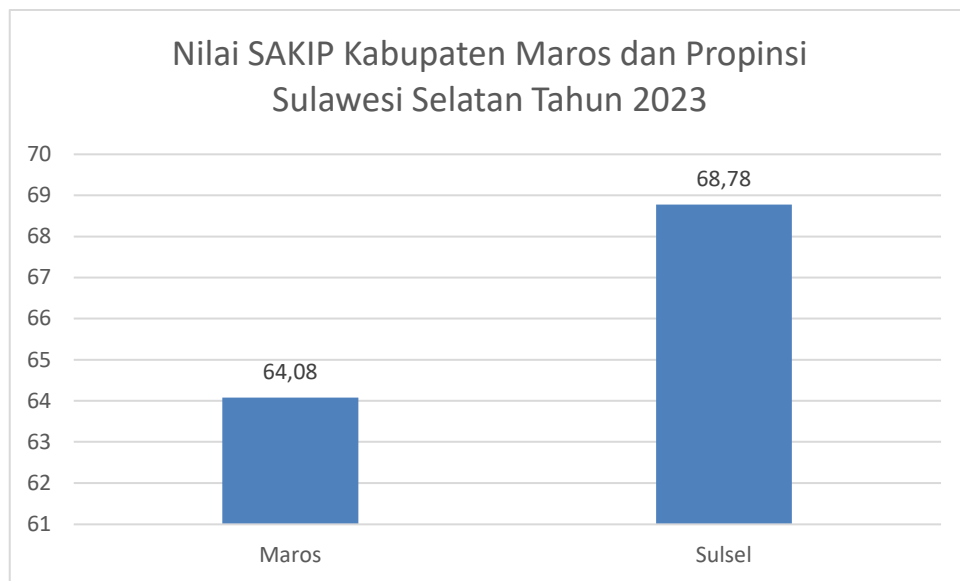
- Monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah belum dilakukan oleh inspektorat secara berkala



- Belum terdapat kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai SAKIP Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 64,08 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (68,78).

**Grafik 2.1**  
**Perbandingan Nilai Sakip Kabupaten Maros dan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber : Kemenpan RB, 2023

## 2. Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Pelayanan berkualitas adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros maka digunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2023 Pencapaian IKM Kabupaten Maros menunjukkan capaian yang cukup baik dengan realisasi IKM sebesar 3,50 dengan kategori IKM "**SANGAT BAIK**".



**Tabel 2.4**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Pelayanan Publik Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	3,23	3,25	3,50	107,69	3,26	-

**Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024**

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Maros Tahun 2023 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan nilai capaian 107,69 persen dengan kategori capaian kinerja “ **SANGAT BAIK** “. Hal ini menunjukkan Realisasi nilai IKM pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, bahkan telah melampaui target akhir periode RPJMD pada Tahun 2026.

Pencapaian ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan birokrasi pelayanan dan perijinan di Kabupaten Maros. Dengan adanya MPP ini, segala bentuk pelayanan terkait perijinan dapat lebih cepat. Selain itu pelayanan terkait KTP sudah dapat dilaksanakan di beberapa kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor Disdukcapil.

Walaupun capaian pelayanan publik sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan terkait pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya adalah pelayanan pada fasilitas kesehatan utamanya Rumah Sakit yang masih memerlukan peningkatan, dimana keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit menyebabkan masih adanya antrian yang cukup panjang bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan.

## **MISI 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Maksud dari Misi 2 adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, empati, religius, energik, dan memiliki keterampilan serta keahlian sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan yang disertai dengan kemampuan menjunjung nilai – nilai kehidupan bermasyarakat.

Tujuan dari misi 2 adalah Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia



Masyarakat Yang Berdaya Saing, dengan sasaran (1) meningkatnya kualitas hidup masyarakat, (2) Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas layanan keagamaan dan (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender. Capaian dari masing masing tujuan dan sasaran pada Misi 2 adalah sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat**

Peningkatan kualitas hidup yang dimaksud dalam hal ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat, dengan harapan ketika masyarakat telah memiliki pendidikan yang memadai serta derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat tersebut dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya masing-masing.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran 1 pada Misi 2 adalah Indeks Pendidikan dan Indeks kesehatan. Indeks Pendidikan merupakan hasil presentasi dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan Indeks kesehatan adalah hasil presentasi dari umur harapan hidup. Indeks Pendidikan memperlihatkan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh seseorang, sedangkan Indeks kesehatan memperlihatkan proyeksi umur dari seseorang dihitung sejak orang tersebut lahir.



**Tabel 2.5**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pendidikan	Nilai Indeks	63,78	63,47	64,26	101,24	65,97	69,01
2	Indeks Kesehatan	Nilai Indeks	75,82	75,96	76,07	100,14	76,45	-

Sumber : BPS Kab. Maros, 2024

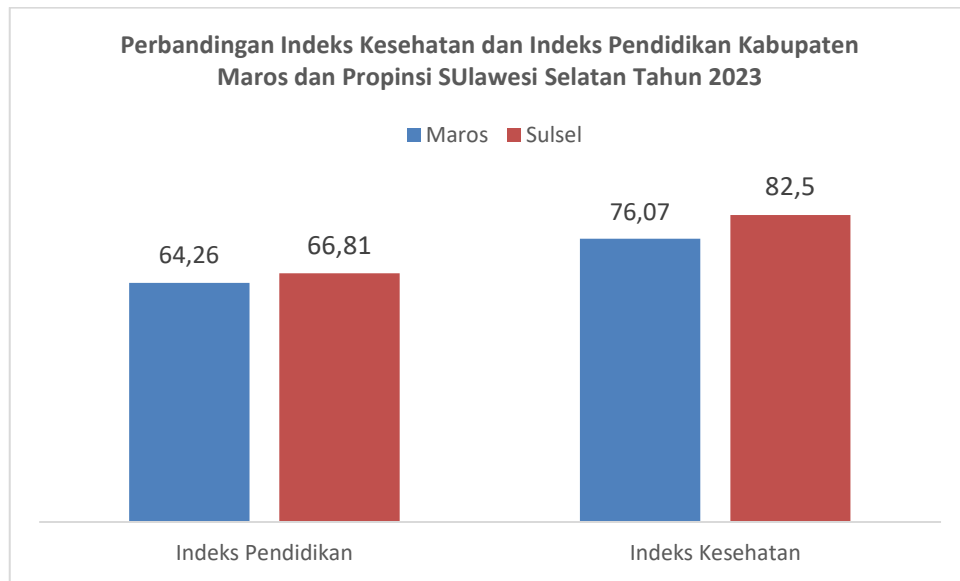
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi Indeks Pendidikan dan Indeks kesehatan Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Indeks Pendidikan pada Tahun 2023 sebesar 64,26 persen meleweati target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 tahun pelaksanaan 2023 (63,47), dengan demikian capaian kinerja dari Indeks pendidikan adalah 101,24 persen dengan kategori capaian kinerja “ **SANGAT BAIK** ”. Seperti halnya Indeks Pendidikan, realisasi Indeks kesehatan sebesar 76,07 juga melewati target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maros (75,96), dengan capaian kinerja Indeks Kesehatan sebesar 100,14 persen dengan kategori capaian kinerja “ **SANGAT BAIK** “.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, indikator yang memiliki target Tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah Indeks Pendidikan, dengan target pada tahun 2023 adalah 69,10. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN, maka Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Maros belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Realisasi Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik 3.2 dibawah, Indeks kesehatan dan Indeks Pendidikan Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.





**Grafik 2.2**  
**Perbandingan Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan**  
**Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**

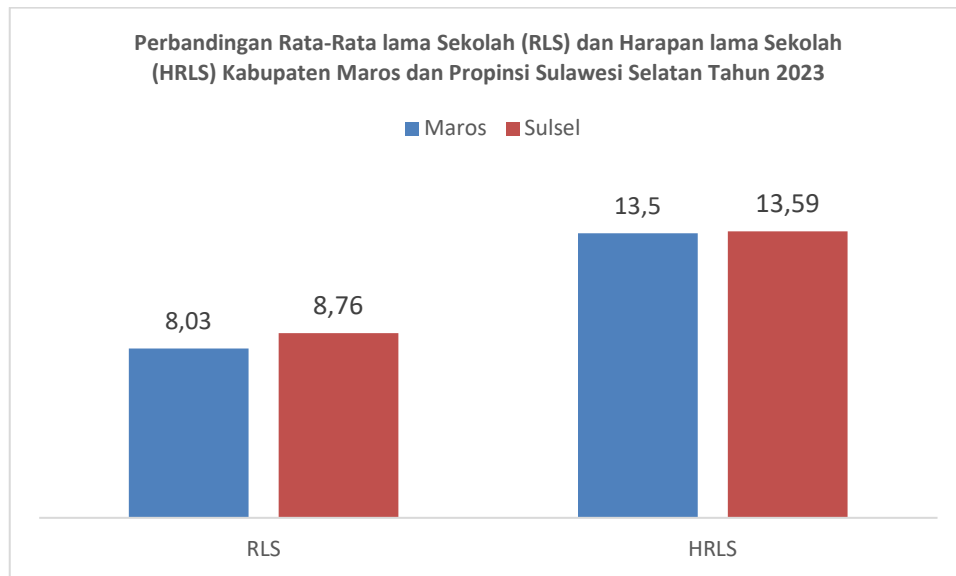


**Sumber : BPS Kab. Maros(Diolah), 2023**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Capaian Indeks Pendidikan sangat dipengaruhi oleh capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRLS) penduduk Kabupaten Maros. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), RLS Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 8,03 tahun atau setingkat SMP, sedangkan HRLS sebesar 13,50 tahun atau setingkat SMA, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Maros pada Tahun 2023 rata-rata memiliki tingkat pendidikan paling tinggi adalah SMP atau setara, dan diharapkan penduduk yang lahir pada Tahun 2023 memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA.



**Grafik 2.3**  
**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HRLS) Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



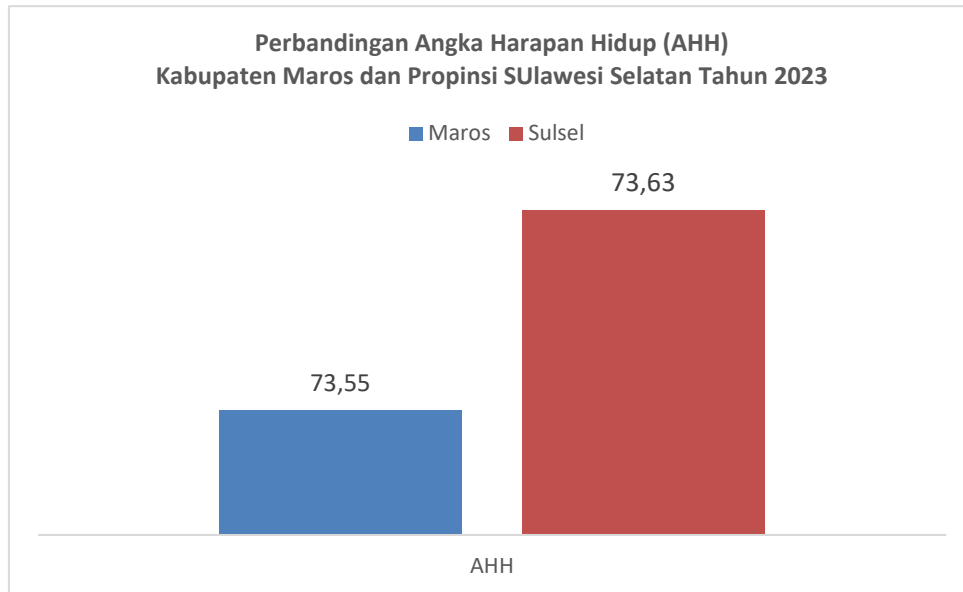
**Sumber : BPS Kab. Maros, 2023**

Rendahnya RLS Kabupaten Maros disebabkan masih banyak anak usia sekolah, utamanya pada tingkatan umur 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini dipengaruhi faktor budaya dan ekonomi masyarakat. Selain itu masih kurangnya fasilitas pendidikan menengah atas juga menjadi salah satu permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maros untuk meningkatkan Indeks Pendidikan diantaranya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan wewenang kabupaten (PAUD, SD dan SMP), mengintensifkan pendataan terkait anak yang putus dan tidak sekolah hingga ke desa dan kelurahan, pengadaan bantuan seragam sekolah bagi seluruh murid sekolah dasar dan menengah pertama, serta mengintensifkan program dan kegiatan Paket A, B dan C bagi penduduk usia lanjut.

Indeks Kesehatan Kabupaten Maros telah menunjukkan capaian yang cukup baik, hal ini dapat terlihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kabupaten Maros yang mencapai 73,55 Tahun yang berarti penduduk Kabupaten Maros yang lahir pada Tahun 2023 diharapkan memiliki rata-rata umur 73,55 tahun.



**Grafik 2.4**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Walaupun memiliki capaian yang cukup baik, namun terdapat beberapa masalah terkait pencapaian Indeks kesehatan, yaitu masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). Selain itu masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara teratur dan lengkap di fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya Indeks kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Maros melalui instansi terkait telah melakukan sosialisasi secara intensif dengan bantuan kader-kader posyandu dan kader PKK terkait kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, balita dengan melakukan imunisasi lengkap, selain itu peningkatan sarana prasarana kesehatan juga telah dilakukan baik di tingkat puskesmas, puskesmas pembantu maupun pada tingkat rumah sakit daerah.

## 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan

Layanan terhadap keagamaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak setiap masyarakat dan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Untuk mengukur kualitas pelayanan terkait keagamaan yang dilakukan pemerintah digunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan



Keagamaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan terkait keagamaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terkait keagamaan.

Realisasi IKM Layanan Keagamaan pada tahun 2023 sebesar 3,55 poin (sangat puas), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (3.50 poin). Realisasi IKM Pelayanan Keagamaan Tahun 2023 juga melampaui target RPJMD yaitu 3,26 poin. Dengan demikian capaian sasaran 2 Misi 2 RPJMD Periode 2021-2026 adalah 109,23 persen dengan capaian kinerja **SANGAT TINGGI**.

**Tabel 2.6**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Layanan Keagamaan Kabupaten Maros Tahun 2023**

	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keagamaan	Nilai Indeks	3,50	3,25	3,55	109,23	3,26	-

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

### 3. Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan. Untuk mengukur pencapaian PUG maka digunakan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan



perempuan.

Realisasi IPG Kabupaten Maros tahun 2023 sebesar 89,20, sama dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan pada Tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) belum melakukan publikasi Realisasi IPG Tahun 2023. Realisasi IPG tahun 2023 sebesar 89,46, belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 90,04 poin dan target dalam RPJMN pada Tahun 2023 yaitu sebesar 91,28 poin. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 3 misi 2 sebesar 99,07 persen dengan kategori capaian **SANGAT TINGGI**.

**Tabel 2.7**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

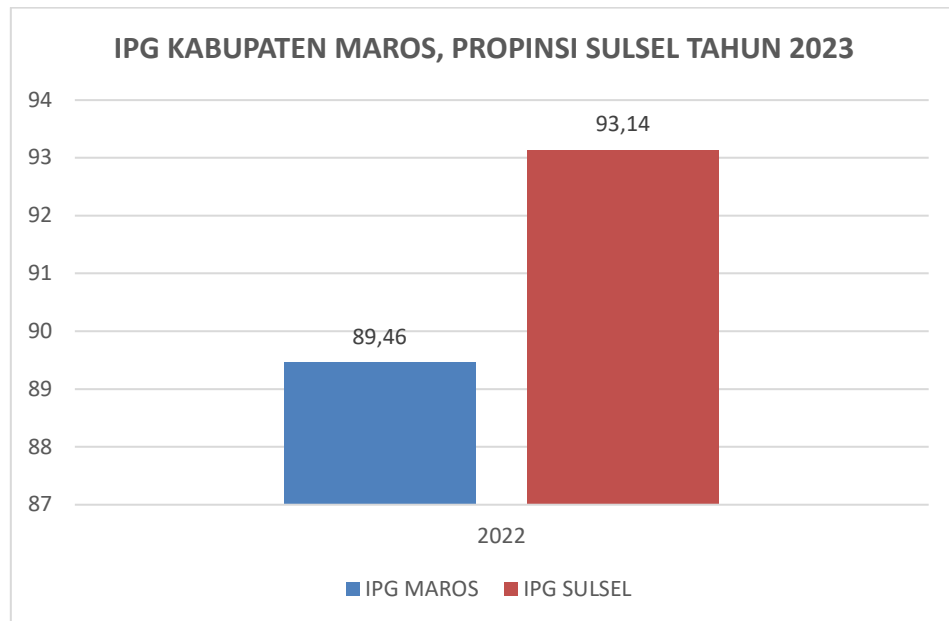
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	89,20	90,04	89,20	99,07	90,85	91,28

Sumber : Kemen PPA, 2023

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, maka IPG Kabupaten Maros rendah dibandingkan IPG Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Maros lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.



**Grafik 2.5**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Gender**  
**Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



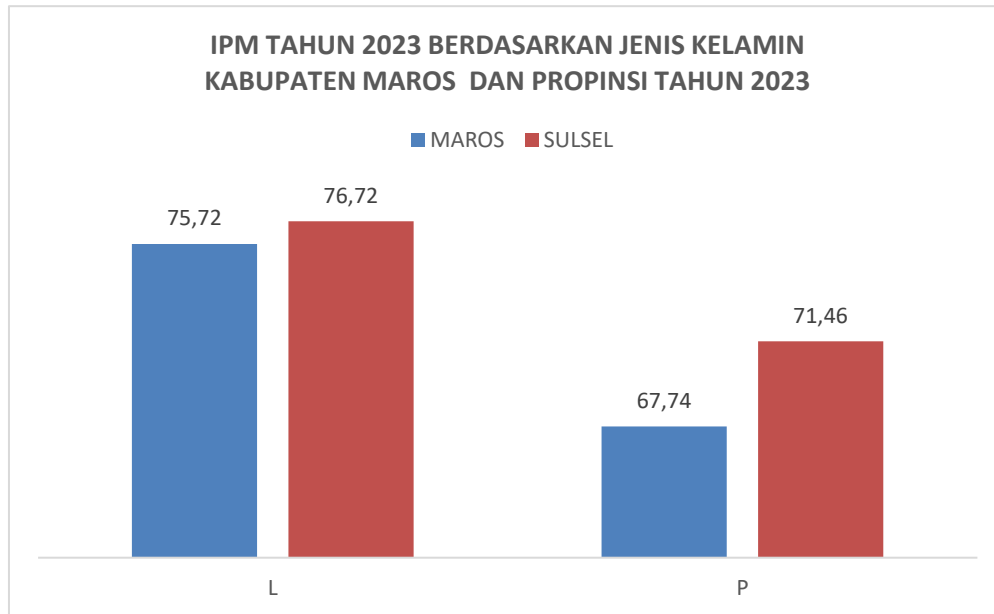
**Sumber : Kemen PPA, 2023**

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, IPG merupakan perbandingan antara IPM Penduduk Laki-laki dan IPM Penduduk Perempuan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa hal yang menyebabkan masih rendahnya IPG Kabupaten Maros adalah masih tingginya ketimpangan antara pembangunan manusia/penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. IPM Penduduk laki-laki Kabupaten Maros tahun 2023 sebesar 75,32 poin, sedangkan IPM Perempuan hanya sebesar 67,74 poin.

Rendahnya IPG Kabupaten Maros disebabkan budaya sebagian masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan pendapatan sendiri, karena laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan akan mencari nafkah. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian IPG tahun 2023 antara lain banyaknya organisasi pemerintah dan swasta yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Periode 2021-2026, pemberdayaan dan pembangunan gender merupakan salah satu prioritas pembangunan dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Maros.



**Grafik 2.6**  
**Perbandingan IPM Lak-Laki dan IPM Perempuan**  
**Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber : Kemen PPA, 2023

### **MISI 3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Maksud dari misi 3 adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar (mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan) dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta layanan sosial). Tujuan dari misi 3 adalah Mengoptimalkan Pemenuhan Layanan Dasar dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah; (1) meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat dan (2) Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat. Capaian dari sasaran pada Misi 3 adalah sebagai berikut :

#### **1. Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat**

Untuk mengukur ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat digunakan Indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). Indikator ini merupakan ukuran untuk menentukan harga sekelompok barang yang paling umum digunakan. Dalam membandingkan harga sekelompok barang dan jasa, diterapkan prinsip secara relatif terhadap harga



sekelompok barang dan jasa yang sama. IHK dapat menggambarkan jumlah serta ketersediaan barang maupun jasa.

Untuk IHK Kabupaten Maros tidak langsung melakukan sendiri, melainkan mengikut ke Kabupaten atau Kota terdekat, yang dalam hal ini Kota Makassar. Realisasi IHK Kabupaten Maros Tahun Maros Tahun 2023 sebesar 113,35 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (107,82 poin). Seiring dengan meningkatnya nilai IHK, maka Realisasi IHK Tahun 2023 juga tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 107,24 poin. Meskipun demikian, capaian kinerja IHK Tahun 2023 sebesar 94,61 persen dengan kategori kinerja **SANGAT BAIK**.

Meningkatnya IHK Tahun 2023 banyak disebabkan oleh kenaikan indeks harga yaitu Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 1,19 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen.

**Tabel 2.8**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Harga Konsumen**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Harga Konsumen	Nilai Indeks	107,92	107,24	113,35	94,61	98,91	-

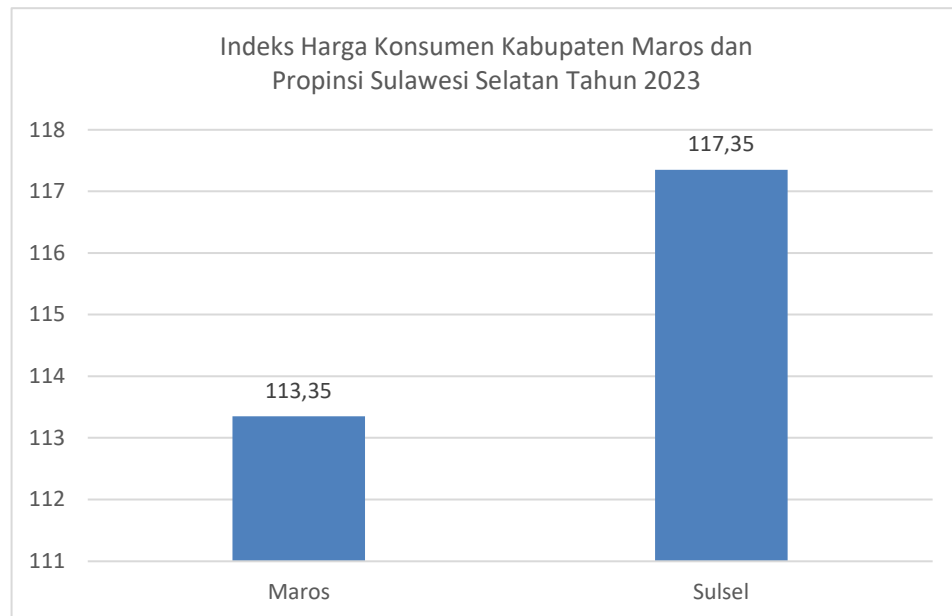
Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2023

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Realisasi IHK Kabupaten Maros masih lebih rendah sehingga dapat dikatakan harga-harga komoditi di Kabupaten Maros baik makanan maupun non makanan masih lebih stabil dibandingkan harga komoditi Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.





**Grafik 2.7**  
**Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK)**  
**Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber : BPS Prop. Sulsei, 2023

## 2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Untuk mengukur pelayanan pemerintah terkait pemenuhan SPM, maka digunakan indikator IKM Layanan Minimum Masyarakat. Pengukuran dilakukan terhadap bidang-bidang SPM yaitu; Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan ketertiban Umum, serta Bidang Perumahan. IKM Pelayanan SPM tahun 2023 sebesar 3,28 poin, lebih tinggi dari target dalam RPJMD, yaitu 3,26 poin. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam IKM maka realisasi IKM Tahun 2023 masuk dalam kategori "**SANGAT BAIK**". Sedangkan capaian kinerja pelayanan standar pelayanan minimal Tahun 2023 sebesar 100,92 persen dengan kategori kinerja **SANGAT TINGGI**.



**Tabel 2.9**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**Layanan Minimum Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat	Nilai Indeks	3,24	3,25	3,28	100,92	3,26	-

**Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024**

Realisasi IKM sebesar 3,28 poin diperoleh berdasarkan rata-rata nilai IKM dari masing-masing bidang SPM, yang dapat dilihat sebagai berikut :

**a. Bidang Pendidikan**

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang pendidikan dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) Pelayanan pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pelayanan Pendidikan Dasar dan (Pelayanan Pendidikan Kesetaraan A, B, C). Realisasi IKM bidang pendidikan sebesar 3,63 dengan predikat “ SANGAT BAIK “

**Tabel 2.10**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Pelayanan Pendidikan anak usia dini	1.535	3,77	94,29	A	SANGAT BAIK
Pelayanan pendidikan dasar	1.582	3,75	83,72	A	SANGAT BAIK
Pelayanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C)	628	3,36	83,96	B	BAIK
<b>Total Nilai rata-rata</b>		<b>10,88</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,63</b>		
<b>IKM</b>				<b>90,65</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

**Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024**

Berbagai Peraturan Daerah (Perda) terkait pelaksanaan dan pelayanan pendidikan telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Kebijakan tersebut diantaranya Perda No. 14 tahun 2016



mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Perda nomor 15 tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan anak usia dini bernilai SANGAT BAIK dengan nilai kepuasan sebesar 94,26 poin dan nilai rata-rata 3,77. Begitu pun dengan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dasar memperoleh kinerja SANGAT BAIK berdasarkan opini masyarakat. Nilai untuk aspek pendidikan dasar sebesar 93,72 dengan nilai rata-rata 3,75.

Meski telah bernilai sangat baik, 2 (dua) layanan Pendidikan yang disebutkan di atas, masih terdapat 1 (satu) unsur layanan yang mendapat penilaian BAIK yaitu unsur pelayanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang hanya mendapatkan nilai 83,96 dengan nilai rata-rata 3,36. Secara keseluruhan, aspek pelayanan bidang Pendidikan di Kabupaten Maros mendapatkan total nilai 90,65 dengan nilai indeks pelayanan di angka 3,63. Artinya bahwa masyarakat sudah menilai SANGAT BAIK atas pelayanan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros.

#### **b. Bidang Kesehatan**

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang kesehatan dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) pelayanan kesehatan ibu hamil; (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, (4) Pelayanan Kesehatan balita; (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dsar (6) Pelayanan kseahatan pada usia produktif, (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis (TBC), (12) Pelayanan penyakit virus. Realisasi IKM Bidang Kesehatan sebesar 3,54 poin dengan kategori “ SANGAT BAIK “



**Tabel 2.11**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.494	3,92	98,03	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.488	3,91	97,64	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.481	3,92	97,95	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan balita	1.476	3,92	97,88	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.334	3,61	90,14	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.363	3,54	88,50	A	SANGAT BAIK
BAIK Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1.335	3,57	89,23	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1.344	3,56	88,89	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1.222	3,56	89,07	A	SANGAT BAIK
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	564	3,44	85,98	B	BAIK
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC)	852	3,63	90,64	A	SANGAT BAIK
Pelayanan penyakit virus (Cth. Covid-19)	1.393	3,66	91,40	A	SANGAT BAIK
<b>Total Nilai rata-rata</b>		<b>44,21</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,54</b>		
<b>IKM</b>				<b>90,65</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Maros menjadi faktor utama kepuasan masyarakat terkait pelayanan SPM. Terdapat dua rumah sakit yakni satu rumah sakit umum milik pemerintah dan satu rumah sakit khusus milik TNI/POLRI. Selain itu, Kabupaten Maros memiliki 14 Puskesmas dari 14 Kecamatan, memiliki 53 praktik mandiri dokter umum perorangan, 28 praktik mandiri dokter gigi perorangan, 5 praktik mandiri dokter spesialis perorangan, dan 48 tempat bidan praktik mandiri yang tersebar di hampir semua kecamatan. Selain itu, terdapat sarana kesehatan penunjang berupa 23 klinik Pratama yang terdiri dari 8 milik



TNI/POLRI, 2 Milik BUMN, dan 13 Milik Swasta. Ketersediaan berbagai fasilitas tersebut menunjang kualitas pelayanan dasar di bidang Kesehatan di Kabupaten Maros. Hal tersebut terkonfirmasi dalam survei opini publik yang dilaksanakan pada pertengahan September 2023, pelayanan Kesehatan di Kabupaten Maros mendapatkan kinerja SANGAT BAIK dengan nilai kepuasan sebesar 88,43 dan Indeks nilai kepuasan 3,54. Pelayanan dasar di bidang Kesehatan ini mendapatkan angka kepuasan kedua tertinggi dari seluruh bidang pelayanan yang dinilai oleh responden.

Dari keduabelas indikator dalam Tabel 3.11 di atas hanya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan predikat kinerja BAIK dengan nilai 85,98. Hal tersebut disebabkan karena masih belum tersedianya rumah sakit khusus untuk pelayanan pasien gangguan jiwa. Namun, puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros maupun beberapa klinik menyediakan fasilitas pelayanan psikologi untuk masyarakat.

### c. Bidang Pekerjaan Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Pekerjaan Umum dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) Kualitas pelayanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari, (2) Kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi IKM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 sebesar 3,00 poin dengan kategori kinerja BAIK.

**Tabel 2.12**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Kualitas pelayanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari	1.161	2,82	70,62	C	KURANG BAIK
Kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik	1.225	3,17	79,13	B	Baik
<b>Total Nilai rata-rata</b>		<b>5,99</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,00</b>		
<b>IKM</b>				<b>74,87</b>	<b>BAIK</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Berdasarkan hasil survei, kualitas pelayanan dasar bidang



pekerjaan umum di Kabupaten Maros mendapatkan predikat BAIK dengan nilai kepuasan 74,87 dan indeks pelayanan di angka 3,00. Indikator kunci dari bidang pelayanan ini adalah akses pelayanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari yang masih kurang memadai hingga dianggap tidak memuaskan bagi masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan penyediaan penanganan limbah domestik mendapatkan indeks pelayanan sebesar 3,17 dengan nilai kepuasan 79,13.

Faktor yang menyebabkan masih kurangnya kepuasan masyarakat pada sektor air minum disebabkan masih belum maksimalnya pelayanan air minum di wilayah pesisir (Bontoa, Marusu, Lau) dikarenakan kondisi geografis pada ketiga kecamatan tersebut yang tidak memiliki sumber air tawar. Selain itu untuk beberapa wilayah kecamatan yang pasokan airnya melalui bendungan Lekopancing juga mengalami kesulitan terkait konsistensi suplai air serta kebersihan air. Hal ini disebabkan bendungan Lekopancing juga merupakan penyuplai utama air bersih bagi Kota Makassar, sedangkan debit air juga semakin hari semakin berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa intervensi berupa pemasangan pipa dari Bantimurung dan pembangunan stasiun penyuplai di Kecamatan Bontoa, selain itu melalui bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disediakan mobil tangki air yang digunakan untuk melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang memerlukan.

#### **d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Capaian IKM bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar 3,28 dengan kategori kinerja SANGAT BAIK.



**Tabel 2.13**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	767	3,38	84,47	B	SANGAT BAIK
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	480	3,18	79,47	B	BAIK
<b>Total Nilai rata-rata</b>		<b>6,56</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,28</b>		
<b>IKM</b>				<b>81,97</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

**Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024**

Nilai Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar di bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup adalah 81,97 dengan nilai indeks pelayanan sebesar 3,28 poin. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten Maros di bidang tersebut mendapatkan penilaian SANGAT BAIK dari masyarakat. Hal ini disebabkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, utamanya masyarakat tidak mampu merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Maros, selain itu adanya alokasi anggaran aspirasi dari DPR RI, serta dana transfer daerah juga sangat membantu dalam penyediaan rumah layak huni. Namun yang menjadi faktor penghambat adalah beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian teknis yang informasinya tidak tersampaikan ke daerah, seperti diwajibkannya daerah untuk membuat Surat keputusan Kepala Daerah (SK BUPATI) terkait wilayah-wilayah rawan bencana setiap tahunnya. Apabila SK tersebut tidak tersedia maka kegiatan yang dilakukan terkait penyediaan rumah bagi korban bencana akan dianggap tidak ada/tidak berkinerja.

**e. Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) ketentraman dan Ketertiban Umum, dan (2) Pelayanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, (3) Penyediaan



informasi rawan bencana, (4) Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, (5) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian IKM Bidang Ketentraman dan perlindungan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 3,29 poin dengan ketgori kinerja SANGAT BAIK.

**Tabel 2.14**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketentraman dan ketertiban umum	1.496	3,63	90,78	A	SANGAT BAIK
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	992	3,21	80,26	B	BAIK
Penyediaan informasi rawan bencana	1.030	3,16	78,99	B	BAIK
Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1.046	3,22	80,46	B	BAIK
Penyelamatan evakuasi korban bencana	936	3,21	80,14	B	BAIK
<b>Total Nilai rata-rata</b>		<b>16,43</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,29</b>		
<b>IKM</b>				<b>82,13</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Secara umum kinerja bidang ketentraman dan perlindungan masyarakat sudah sangat baik, namun yang perlu mendapat perhatian adalah pelayanan penyelamatan pemadam kebakaran, utamanya mobil damkar. Kekurangan tersebut menyebabkan pelayanan korban bencana tidak dapat segera dilakukan apabila terjadi bencana kebakaran pada wilayah kecamatan yang berada di pegunungan dikarenakan waktu tempuh yang sangat jauh dan lama. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan Kabupaten Maros agar dapat memberikan bantuan apabila terjadi bencana kebakaran.

#### f. Bidang Sosial

Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan SPM bidang Sosial dilakukan dengan mengukur kepuasan masyarakat pada; (1) Rehabilitasi penyandang disabilitas, (2) Rehabilitasi anak terlantar, (3) Rehabilitasi lanjut usia, (4) Rehabilitasi gelandangan dan pengemis, (5) Perlindungan dan





jaminan sosial korban bencana daerah. Capaian IKM Bidang Sosial Tahun 2023 sebesar 3,12 poin dengan ketgori kinerja BAIK.

**Tabel 2.15**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Rehabilitasi penyandang disabilitas	584	3,28	82,02	B	BAIK
Rehabilitasi anak terlantar	606	3,05	76,13	C	KURANG BAIK
Rehabilitasi lanjut usia	714	3,17	79,33	B	BAIK
Rehabilitasi gelandangan dan pengemis	588	2,80	70,00	C	KURANG BAIK
Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana daerah	804	3,32	83,06	B	BAIK
<b>Total Nilai rata-rata</b>		<b>15,62</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,12</b>		
<b>IKM</b>				<b>78,11</b>	<b>BAIK</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Indikator pelayanan bidang sosial di Kabupaten Maros sepatutnya menjadi fokus dan prioritas dalam perbaikan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis, seluruh indikator mendapatkan predikat kinerja BAIK serta KURANG BAIK. Perhatian pemerintah daerah juga perlu lebih difokuskan pada indikator pelayanan dalam program rehabilitasi gelandangan dan pengemis. Dari seluruh indikator pelayanan yang telah disurvei kepada masyarakat, indikator pelayanan rehabilitasi gelandangan dan pengemis serta anak terlantar memperoleh kinerja pelayanan terendah di nilai 70 dan 76,13 dengan kinerja KURANG BAIK. Data opini publik terhadap pelayanan di bidang sosial ini juga menunjukkan bahwa kinerja bidang sosial Kabupaten Maros perlu ditingkatkan lagi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah terkait pelayanan sosial adalah memfokuskan pada program rehabilitasi terutama pada anak terlantar dan pengemis yang mencakup akses pendidikan, pelatihan keterampilan serta dukungan psikososial. Program rehabilitasi sosial untuk anak terlantar dan pengemis bertujuan untuk memulihkan dan



mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

#### **MISI 4. MENINGKATKATNYA KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL**

Maksud dari Misi 4 adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok – kelompok ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik dan menjadi sektor unggulan daerah serta mampu mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari Misi 4 adalah Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumberdaya Ekonomi Daerah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah; (1) Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB, (2) Menurunnya Jumlah Pengangguran, (3) Terkendalinya laju Inflasi, dan (3) Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin. Capaian dari tujuan dan sasaran Misi 4 adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB**

Pertumbuhan sektor unggulan daerah diukur berdasarkan pertumbuhan sektor lapangan usaha PDRB yang dapat diintervensi perkembangannya oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini terdapat 15 sektor lapangan usaha dalam PDRB yang menjadi sektor unggulan. Sedangkan PDRB perkapita adalah PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Untuk menghitung kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB maka digunakan indikator persentase pertumbuhan sektor unggulan serta PDRB Perkapita. Reliasi pertumbuhan sektor unggulan daerah pada Tahun 2023 sebesar 2,28 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya (1,92 persen). Walaupun meningkat, persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 5,28 persen. Capaian kinerja persentase sektor unggulan daerah Tahun 2023 sebesar 40,57 persen dengan kategori SANGAT RENDAH

Sedangkan untuk Realisasi PDRB Perkapita pada Tahun 2023 sebesar 64,69 juta rupiah/ jiwa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya



(58,31 juta rupiah/ jiwa). PDRB Perkapita Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 51,03 juta rupiah/ jiwa, dengan demikian capaian PDRB Perkapita Tahun 2023 sebesar 126,77 persen dengan kategori kinerja SANGAT BAIK

**Tabel 2.16**  
**Target, Realisasi dan Capaian Persentase Sektor Unggulan Daerah serta PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2023**

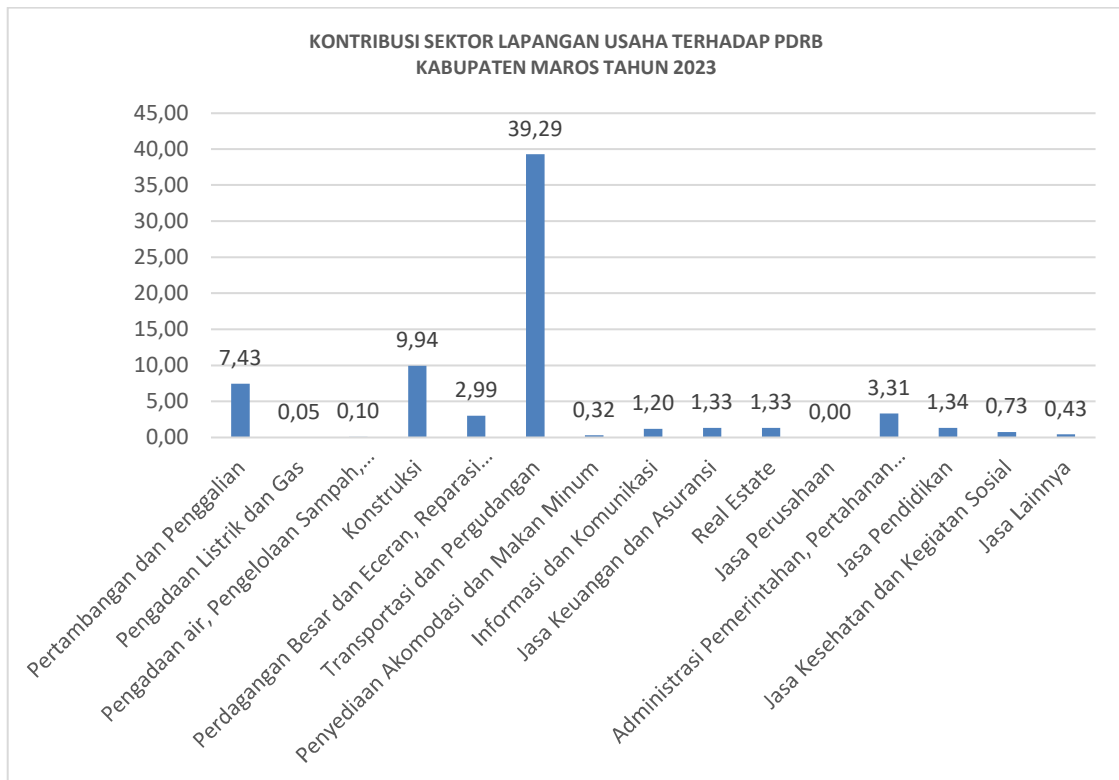
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Nilai Indeks	1,92	5,62	2,28	40,57	7,79	-
2	PDRB Perkapita	Juta Rp/jiwa	58,31	51,03	64,69	126,77	57,44	-

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2023

Rendahnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disebabkan peranan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor industri pengolahan sangat dominan terhadap PDRB Kabupaten Maros. Sektor transportasi dan pergudangan sangat dominan akibat adanya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sedangkan pada sektor industri pengolahan akibat adanya pabrik Semen Bosowa serta Pabrik Teh Cap Orang Tua. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi pada kedua sektor lapangan usaha tersebut.



**Grafik 2.8**  
**Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

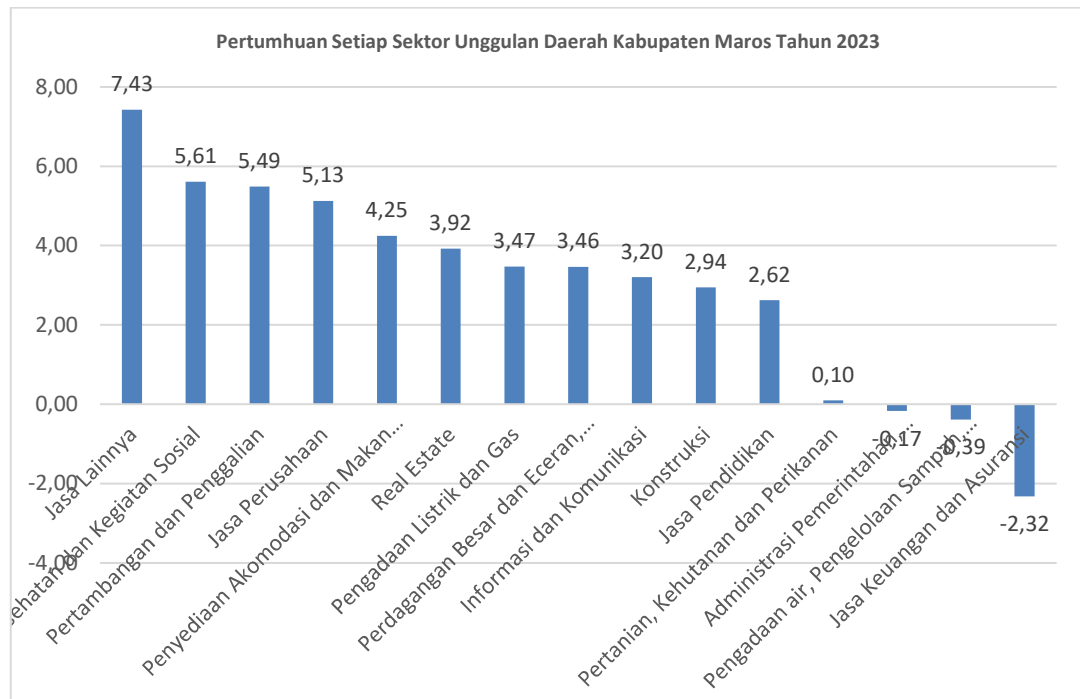


Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sektor unggulan yang dimaksud dalam hal ini adalah 15 sektor lapangan usaha dalam PDRB. Pertumbuhan setiap sektor tersebut memiliki capaian yang bervariasi, namun apabila dilihat dari pertumbuhan, maka sektor yang memiliki pertumbuhan paling tinggi Tahun 2023 adalah jasa lainnya, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,43 persen, kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,61 persen. Untuk sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian dan kehutanan dengan pertumbuhan 0,10 persen. Pada tahun 2023 terdapat 3 sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu administrasi pemerintahan dengan kontraksi -0,17 persen, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur dengan kontraksi pertumbuhan -0,39 persen kemudian sektor jasa keuangan dan asuransi dengan kontraksi sebesar -2,32 persen



**Grafik 2.9**  
**Pertumbuhan Setiap Sektor Unggulan Daerah**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2023

Demikian pula dengan PDRB perkapita, walaupun telah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya serta melampaui target dalam RPJMD, namun realisasi PDRB perkapita masih memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, serta pertumbuhan sektor transportasi yang cukup pesat tidak diikuti oleh sektor lainnya.

## 2. Menurunnya Jumlah Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2023, TPT Kabupaten Maros sebesar 3,64 persen, menurun sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (5,04 persen). Realisasi TPT Tahun 2023 juga melewati target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 4,12 persen dan target RPJMN sebesar 4,50 persen. Capaian kinerja TPT tahun 2023 sebesar 113,10 persen dengan kategori kinerja SANGAT TINGGI



**Tabel 2.17**  
**Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Tingkat Pengguran terbuka (TPT)	Persen	5,04	4,12	3,64	113,19	3,52	4,50

Sumber BPS Kab. Maros 2023

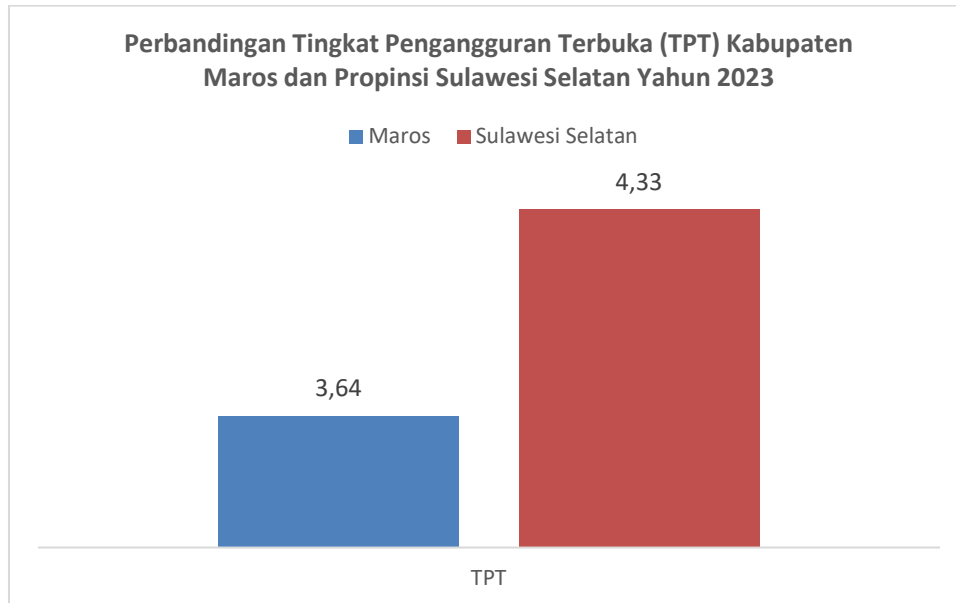
Penurunan TPT dari tahun sebelumnya disebabkan bergeliatnya kembali sektor pariwisata setelah PPKM dicabut. Berjalannya kembali roda perekonomian utamanya pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Maros. Seiring dengan itu, usaha kecil menengah pun tumbuh dengan pesat sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar. Beberapa program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja seperti penyelenggaraan *Job Fair* serta event-event regional lainnya juga memiliki peran penting dalam penurunan tingkat pengangguran selama tahun 2023. Selain itu tumbuhnya beberapa investasi di Kabupaten Maros oleh beberapa PMDN juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Walaupun telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, kualitas tenaga kerja yang ada masih menjadi permasalahan tersendiri. Tingkat pendidikan merupakan masalah utama, dimana rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja berada pada tingkat SMA ke bawah sehingga level pekerjaan yang dapat diisi adalah level pekerja menengah ke bawah. Tingkat keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia juga menjadi permasalahan, dimana rata-rata tenaga kerja belum memiliki sertifikat keahlian atau profesi sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sifatnya *Full Time*. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2023 yaitu sebesar 61,45 persen, apabila dilihat dengan persentase TPT yang semakin menurun, maka dapat dikatakan bahwa banyak tenaga kerja Kabupaten Maros yang terserap di luar Kabupaten Maros, utamanya di Kota Makassar.

Realisasi TPT Kabupaten Maros sebesar 3,64 jauh lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 4,33 persen.



**Grafik 2.10**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023**



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2023

### 3. Terkendalinya Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari suatu periode ke periode selanjutnya. Kenaikan harga setiap periode atau terus menerus ini adalah kondisi yang disebut inflasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros tidak menghitung inflasi sehingga untuk inflasi digunakan data Kota Makassar sebagai Kota/Kabupaten terdekat.

Laju inflasi Tahun 2023 sebesar 2,89 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (5,99 persen). Hal ini menunjukkan pada Tahun 2023 kondisi inflasi lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 yang berdampak terhadap kondisi perekonomian yang lebih stabil. Realisasi laju inflasi Tahun 2023 berada diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD (3,14) namun berada dibawah target RPJMN. Capaian kinerja laju inflasi Tahun 2023 sebesar 108,65 persen dengan kategori kinerja SANGAT BAIK

**Tabel 2.18**  
**Target, Realisasi dan Capaian Laju Inflasi Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Laju Inflasi	Persen	5,99	3,14	2,89	108,65	3,00	2,80

Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2023



Laju inflasi pada tahun 2023 banyak dipengaruhi oleh dampak ekonomi global yang sedang tidak baik, dimana terjadi kenaikan harga sedangkan permintaan barang, utamanya kebutuhan pokok sangat tinggi di pasaran. Kenaikan harga komoditi makanan sangat memberikan andil terkait kenaikan inflasi.

Dalam rangka menekan laju inflasi Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa intervensi, diantara dengan melaksanakan operasi pasar untuk menekan harga, serta menggalakkan gerakan pangan lestari, yaitu gerakan menanam sayur, cabai serta beberapa bahan pokok lainnya di halaman rumah.

#### 4. Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka Kemiskinan Kabupaten Maros tahun 2023 sebesar 9,65 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (9,43 persen). Realisasi angka kemiskinan pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD (8,81 Persen) dan target dalam RPJMN (2,80 persen). Dengan demikian capaian kinerja angka kemiskinan Tahun 2023 sebesar 91,30 persen dengan kategori capaian kinerja SANGAT TINGGI.

**Tabel 2.19**  
**Target, Realisasi dan Capaian Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Kemiskinan	Persen	9,43	8,81	9,65	91,30	7,64	2,80

Sumber : BPS Kab. Maros, 2023

Peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2023 disebabkan bencana banjir besar yang terjadi pada bulan Januari hingga Maret, kemudian musim kering berkepanjangan pada bulan April hingga September. Bencana ekstrem tersebut menyebabkan banyaknya lahan sawah gagal panen dan mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Selain itu tingginya laju inflasi yang menyebabkan tingginya harga barang di pasar, termasuk barang kebutuhan pokok juga mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kenaikan angka





kemiskinan adalah Garis kemiskinan tahun 2023 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dan tidak terintegrasi. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masih berjalan sendiri-sendiri tidak berdasarkan satu sumber data. Selain itu belum adanya penentuan prioritas wilayah kemiskinan yang harus dikerjakan dalam satu tahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak terpusat.

Intervensi terkait penanggulangan kemiskinan telah masif dilakukan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Selain itu, beberapa program Pemerintah Kabupaten Maros, antara lain program pemberian bantuan bibit ikan bagi pembudidaya ikan, dan pembangunan jalan produksi, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

#### **MISI 5. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH**

Maksud dari Misi 5 adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik dan menjadi sektor unggulan daerah serta mampu mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari Misi 5 adalah Menurunnya Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat di tiap wilayah, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Realisasi IKLI pada Tahun 2023 sebesar 3,24 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (3,50 poin). Nilai IKLI Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 3,25 poin. Capaian kinerja IKLI



Tahun 2023 sebesar 99,69 persen dengan kategori kinerja SANGAT TINGGI.

**Tabel 2.20**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	3,50	3,25	3,24	99,69	3,26	-

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan yang diprogramkan oleh pemerintah sangat memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. Begitu pun dengan pelayanan telekomunikasi yang mendapatkan nilai indeks kepuasan yang cukup tinggi. Masyarakat menilai bahwa layanan infrastruktur transportasi (darat dan laut), sanitasi, perumahan, dan persampahan tersedia dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pemberian infrastruktur telekomunikasi dan listrik, masyarakat menilai bahwa infrastruktur sudah sangat memadai dan cukup mudah diakses. Pada sembilan kategori tersebut, masyarakat memberikan nilai kinerja sangat baik dan baik atas usaha layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam hal layanan infrastruktur drainase, air minum, dan irigasi, masyarakat menilai bahwa pemerintah masih perlu berupaya lebih keras untuk mendorong ketersediaan dan kemudahan akses untuk infrastruktur tersebut.

#### a. Infrastruktur Jalan

Kepuasan layanan pada infrastruktur jalan di Kabupaten Maros menunjukkan penilaian kinerja dengan nilai rata-rata mutu pelayanan 90,63. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan termasuk dalam kondisi yang SANGAT BAIK. Opini masyarakat terhadap kualitas infrastruktur jalan masih menunjukkan nilai rata-rata 3,49.



Hampir semua jalan sudah banyak yang diaspal dan dibeton, sejalan dengan itu masyarakat juga merasa mutu fungsi jalan baik. Kondisi beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas membutuhkan perawatan kembali agar lebih baik lagi dalam menunjang dan mendukung perekonomian. Masyarakat menilai bahwa kontribusi jalan terhadap perekonomian ini termasuk dalam kondisi yang penting di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros (2023), panjang jalan di Kabupaten Maros secara keseluruhan baik jalan yang berada pada kewenangan negara, provinsi maupun kabupaten adalah 1.406,96 Km. Adapun jumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni 1.032,13 Km. Dari ruas jalan kabupaten tersebut, kondisi jalan bertipe permukaan aspal sepanjang 518,25 Km dan 393,87 Km lainnya dalam keadaan baik. Pada tahun 2021, panjang jalan yang dibangun sepanjang 533 Km. Selain itu, panjang jalan yang ditingkatkan baik struktur/fungsi yakni 38,137 Km. Sementara panjang jalan yang dipelihara 52,624 Km. Pembangunan jalan di Kabupaten Maros dalam beberapa tahun terakhir cukup masif. Selain kuantitas, tingkat kualitas jalan di wilayah ini juga cukup bagus dengan tingkat kemantapan jalan di angka 86,42 persen (BPS 2023). Pada survei ini, masyarakat memberikan persepsi sangat positif terhadap kuantitas dan kualitas jalan dengan nilai kinerja 94,61 dan 87,44. Sementara indikator kesesuaian 89,64 dan efektivitas 89,96 poin, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan nilai kinerja 91,50.

**Tabel 2.21**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Sub Indikator</b>	<b>Total Nilai</b>	<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>Nilai Intervensi Konversi</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>
Ketersediaan	1.616	3,79	94,61	A	Sangat Baik
Kualitas	1.490	3,49	87,44	B	Baik
Kesesuaian	1.531	3,59	89,64	A	Sangat Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.515	3,59	89,96	A	Sangat Baik
Kontribusi pada Perekonomian	1.292	3,66	91,50	A	Sangat Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>18,13</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,63</b>		
<b>IKM</b>				<b>90,63</b>	<b>Sangat</b>



Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
					Baik

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

### b. Infrastruktur Jembatan

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jembatan diperoleh nilai indeks 86,58 dengan mutu pelayanan termasuk kategori BAIK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Jembatan termasuk dalam kondisi yang memuaskan. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Jembatan menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,75. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa infrastruktur Jembatan tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlihat juga pada unsur efektivitas pemanfaatan jembatan di masyarakat dikategorikan dengan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata sebesar 3,64. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas dengan nilai rata-rata sebesar 3,29.

**Tabel 2.22**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Jembatan Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.349	3,75	93,68	A	Sangat Baik
Kualitas	1.168	3,29	82,85	B	Baik
Kesesuaian	1.171	3,32	83,17	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.280	3,64	90,91	A	Sangat Baik
Kontribusi pada Perekonomian	909	3,32	82,94	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>17,32</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,464</b>		
<b>IKM</b>				<b>86,58</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

### c. Infrastruktur Drainase

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Drainase diperoleh nilai



71,93 dengan mutu pelayanan termasuk kategori C. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Drainase termasuk dalam kondisi yang KURANG BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Drainase menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,11. Hal ini menunjukkan responden menyatakan bahwa infrastruktur Drainase telah tersedia secara fisik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas dengan nilai rata-rata sebesar 2,81. Hal ini terkait dengan drainase yang meskipun sudah ada tetapi dari segi kualitas dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan bencana banjir.

Bila menilik dari faktor resiko hingga tahun 2019, bencana banjir di Kabupaten Maros mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur jembatan sepanjang 91,74 Km, juga jumlah bangunan yang terdampak banjir besar 536 infrastruktur bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pelayanan infrastruktur drainase akan berdampak pula pada layanan infrastruktur jalan dan jembatan.

**Tabel 2.23**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Drainase Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.277	3,11	77,87	B	Baik
Kualitas	1.136	2,81	70,29	C	Kurang Baik
Kesesuaian	1.144	2,83	70,79	C	Kurang Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.140	2,87	71,79	C	Kurang Baik
Kontribusi pada Perekonomian	689	2,76	68,90	C	Kurang Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>14,39</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>2,88</b>		
<b>IKM</b>				<b>71,93</b>	<b>Kurang Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

#### d. Infrastruktur Air Minum

Kondisi infrastruktur air minum di Kabupaten Maros terpenuhi melalui beberapa sumber seperti Sumber mata air yang dikelola PDAM dan ada juga



melalui PAMSIMAS. Untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan air minum didasarkan pada lima unsur yakni ketersediaan, kualitas, kesesuaian, efektivitas pemanfaatan dan kontribusi pada perekonomian. Berdasarkan dari hasil survei, terlihat bahwa semua unsur menunjukkan mutu pelayanan yang KURANG BAIK dengan total nilai mutu sebesar 73,74 dengan unsur ketersediaan menunjukkan nilai paling tinggi sebesar 3,04 dan nilai kerja dari unsur kontribusi pada perekonomian menunjukkan paling rendah sebesar 2,82. Dengan demikian, kondisi infrastruktur air minum yang masih dianggap kurang baik ini memberikan indikasi atas harapan tinggi masyarakat pada setiap unsur yang tentunya dilakukan evaluasi pelayanan lebih maksimal lagi mengingat setiap unsur saling mendukung.

Dari data Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bantimurung sebagai salah satu penyuplai air minum di Kabupaten Maros, terlihat jumlah pelanggan hingga tahun 2022 sebesar 20.331. Dari jumlah pelanggan tersebut, PDAM Tirta Bantimurung hanya mampu mengalirkan air sebanyak 5.552.177 m<sup>3</sup> (PDAM Maros, 2023). Sementara berdasarkan Standar Kebutuhan Air Bersih SNI 6728. 1-2015 menyatakan bahwa kota dengan jumlah penduduk 100.000-500.000 jiwa, kebutuhan air bersihnya adalah 100-125 liter/hari/jiwa. Apabila disandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros di tahun 2022 sebanyak 403.774 jiwa (BPS Kab. Maros, 2023), maka jumlah kebutuhan air bersih masyarakat sebanyak 14.737.751 m<sup>3</sup> per tahun. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian penduduk Kabupaten Maros yang belum terjangkau pelayanan jaringan air bersih dari PDAM daerahnya.

**Tabel 2.24**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Air Minum Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.241	3,04	76,04	C	Kurang Baik
Kualitas	1.185	2,93	73,15	C	Kurang Baik
Kesesuaian	1.200	2,96	74,07	C	Kurang Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.207	3,00	75,06	C	Kurang Baik
Kontribusi	732	2,82	70,38	C	Kurang



Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
pada Perekonomian					Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>14,75</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>2,95</b>		
<b>IKM</b>				<b>73,74</b>	<b>Kurang Baik</b>

Sumber : Bappelibangda Kab. Maros, 2023

#### e. Infrastruktur Transportasi Darat

Sistem transportasi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan sistem transportasi dapat membuat mobilitas antar titik dalam suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Sarana transportasi yang lancar dan murah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Maros memiliki 2 jenis transportasi yakni transportasi darat dan transportasi laut. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat diperoleh nilai 84,94 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Transportasi Darat termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Transportasi Darat menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 86,09. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kontribusi pada perekonomian dengan nilai rata-rata sebesar 3,36.

Layanan berkaitan dengan transportasi darat, antara lain panjang dan kondisi jalan, ketersediaan kendaraan bermotor, serta tingkat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil analisis survei, mayoritas masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan infrastruktur transportasi darat. Dalam survei ini, ketersediaan infrastruktur menjadi indikator pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dengan nilai indeks pelayanan sebesar 3,44.



**Tabel 2.25**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Transportasi Darat**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.312	3,44	86,09	B	Baik
Kualitas	1.269	3,38	84,38	B	Baik
Kesesuaian	1.276	3,43	85,75	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.247	3,38	84,79	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	830	3.36	84,01	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>16,99</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,39</b>		
<b>IKM</b>				<b>84,94</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

#### f. Infrastruktur Transportasi Laut

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Laut diperoleh nilai 82,37 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Transportasi Laut termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Transportasi Laut menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur efektivitas dengan nilai rata-rata 3,38. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa infrastruktur transportasi laut yang ada memberikan efektivitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata sebesar 3,21.

Pelayanan transportasi laut terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Maros, mengingat hingga saat ini daerah Maros menjadi salah satu daerah pengembangan Kawasan Industri laut. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sulawesi Selatan (2023), dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemda Kabupaten Maros bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT. KIMAS mendorong ekspansi kawasan industri laut ke Kabupaten Maros, sebab daerah ini memiliki akses yang terbuka melalui transportasi laut. Dibanding dengan daerah lain





di Sulawesi Selatan, jarak Kabupaten Maros dengan pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta Makassar terbilang lebih dekat. Selain itu, pesisir Kabupaten Maros yang masuk dalam perairan Makassar juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota pelabuhan.

**Tabel 2.26**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Transportasi Laut**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	302	3,21	80,32	B	Baik
Kualitas	265	3,27	81,79	B	Baik
Kesesuaian	270	3,33	83,33	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	260	3,38	84,42	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	200	3,28	81,97	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>16,47</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,29</b>		
<b>IKM</b>				<b>82,37</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

#### g. Infrastruktur Irigasi

Kualitas layanan infrastruktur irigasi di Kabupaten Maros menunjukkan nilai 71,42 dengan kategori KURANG BAIK. Meskipun upaya pada unsur kontribusi dan ketersediaan menunjukkan nilai paling tinggi sebesar 2,9 di antara unsur lainnya masih dianggap belum secara maksimal memenuhi kebutuhan air pertanian setiap musimnya. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas sebesar 2,77. Masih cukup banyak daerah pertanian (sawah) yang hanya dapat panen sekali setahun. Harapan masyarakat agar adanya perbaikan pelayanan infrastruktur irigasi sehingga menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan kebijakan pemerintah yang strategis untuk mempertahankan swasembada pangan.

Berdasarkan dokumen pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Maros Tahun 2012-2032, terdapat 108 titik irigasi dengan pelayanan seluas 24.177 hektar. Rincian titik irigasi dengan kewenangan pemerintah pusat mencakup Daerah Irigasi (DI) Bantimurung



dan DI Lekopancing dengan luas pelayanan masing-masing yakni 6.513 hektar dan 3.626 hektar. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulsel bertanggung jawab untuk DI Cambajawayya dengan luas pelayanan 1.000 hektar dan DI Laiya dengan luas pelayanan 1.000 hektar. Adapun kewenangan Pemda Kabupaten Maros meliputi DI yaitu di 105 titik yang meliputi luas total pelayanan kurang lebih 12.308 hektar. Titik DI yang menjadi kewenangan Pemda terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Bontoa. Rendahnya kinerja pelayanan infrastruktur irigasi berdasarkan opini publik salah satunya disebabkan semakin turunnya anggaran pembangunan irigasi dari pemerintah.

**Tabel 2.27**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Irigasi Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	879	2,90	72,52	C	Kurang Baik
Kualitas	788	2,77	69,37	C	Kurang Baik
Kesesuaian	805	2,82	70,61	C	Kurang Baik
Efektivitas Pemanfaatan	807	2,87	71,79	C	Kurang Baik
Kontribusi pada Perekonomian	658	2,91	72,79	C	Kurang Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>14,28</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>2,86</b>		
<b>IKM</b>				<b>71,42</b>	<b>Kurang Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

#### h. Infrastruktur Sanitasi

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Sanitasi diperoleh nilai indeks 81,19 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Sanitasi termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Sanitasi menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur kualitas, kesesuaian, dan



kontribusi pada perekonomian dengan nilai rata-rata 3,27 dan 3,36. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa infrastruktur Sanitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata sebesar 3,08.

Berdasarkan survei opini publik, masyarakat Kabupaten Maros memberikan nilai kinerja BAIK terhadap pelayanan infrastruktur sanitasi dengan nilai indeks kepuasan di angka 81,19. Namun, hasil tabulasi data survei juga menunjukkan bahwa nilai kinerja pada indikator pelayanan berupa ketersediaan infrastruktur masih berada di bawah capaian 80 poin. Rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh akses sanitasi yang belum merata di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil analisis data, persentase kepuasan terhadap ketersediaan layanan sanitasi di Kecamatan Bontoa hanya 37 persen. Jauh berbeda dengan kepuasan responden dari kecamatan lainnya yang rata-rata berada di atas angka 50 persen.

**Tabel 2.28**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.220	3,08	77,02	B	Baik
Kualitas	1.259	3,27	81,75	B	Baik
Kesesuaian	1.258	3,27	81,69	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.243	3,26	81,56	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	712	3,36	82,96	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>16,24</b>			
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,25</b>		
<b>IKM</b>				<b>81,19</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

**i. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman diperoleh nilai indeks 81,92 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Perumahan dan Permukiman termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Perumahan dan Permukiman menunjukkan bahwa skor kinerja



atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur kesesuaian dan efektivitas dengan nilai rata-rata 3,32. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa infrastruktur perumahan dan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kontribusi pada perekonomian dengan nilai rata-rata sebesar 3,23.

Secara umum, persentase rumah layak huni dari total rumah yang ada di Kabupaten Maros di atas 50 persen (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021). Namun, perlu diperhatikan juga bahwa masih ada sekitar 43 persen rumah belum layak huni di Kabupaten Maros. Dalam laporan analisis RPJMD Maros 2021-2026, hunian tidak layak huni disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah perbatasan dengan kota Makassar. Sehingga di daerah perbatasan tersebut, banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tempat tinggal yang representatif dan membangun rumah yang seadanya saja.

Sementara itu, berkaitan dengan infrastruktur permukiman, Pemda saat ini mengupayakan menurunkan rasio kawasan kumuh di Kabupaten Maros. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maros No. 1169/KPTS/050.13/XI/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kab Maros Tahun 2020, luasan kawasan kumuh di Kabupaten Maros sekira 105,56 ha. Kolaborasi untuk menurunkan luasan kawasan kumuh dilakukan oleh Pemda dengan kolaborasi Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta masyarakat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Melalui skema kolaborasi tersebut, dalam kurun waktu 2 tahun beberapa wilayah di Kabupaten Maros yakni 7 kelurahan pada 2 kecamatan mendapatkan manfaat perbaikan. Wilayah tersebut yakni Kelurahan Boribellayya, Raya, Turikale, Taroda, Alliritengngae dan Kelurahan Pettuadde di Kecamatan Turikale serta Kelurahan Allepole dan Kecamatan lau

**Tabel 2.29**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.252	3,25	81,29	B	Baik
Kualitas	1.252	3,26	81,51	B	Baik



Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Kesesuaian	12.69	3,32	83,05	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.253	3,32	83,09	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	787	3,23	80,64	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>16,38</b>		<b>B</b>	
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,25</b>		
<b>IKM</b>				<b>81,92</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

**j. Infrastruktur Persampahan**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Persampahan diperoleh nilai indeks 78,69 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Persampahan termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Persampahan menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,24. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa infrastruktur Persampahan tersedia dengan mudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas dengan nilai rata-rata sebesar 2,93 atau KURANG BAIK. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas persampahan di Maros perlu dibenahi dan ditingkatkan.

**Tabel 2.30**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Persampahan Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.387	3,24	81,02	B	Baik
Kualitas	1.244	2,93	73,35	C	Kurang Baik
Kesesuaian	1.342	3,17	79,13	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.323	3,18	79,51	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	824	3,22	80,47	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>15,47</b>		<b>B</b>	
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,15</b>		
<b>IKM</b>				<b>78,69</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

**k. Infrastruktur Telekomunikasi**

Kepuasan Layanan Infrastruktur Telekomunikasi diperoleh nilai indeks 83,58 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Telekomunikasi termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Telekomunikasi menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur kontribusi pada perekonomian dengan nilai rata-rata 3,42. Hal ini



menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa infrastruktur Telekomunikasi bermanfaat secara ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas dengan nilai rata-rata sebesar 3,28.

**Tabel 2.31**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.433	3,39	84,89	B	Baik
Kualitas	1.353	3,28	82,09	B	Baik
Kesesuaian	1.368	3,30	82,61	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.349	3,31	82,86	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	950	3,42	85,43	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>15,72</b>		<b>B</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,15</b>		
<b>IKM</b>				<b>83,58</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

#### I. Infrastruktur Listrik

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Listrik diperoleh nilai indeks 84,52 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Listrik termasuk dalam kondisi yang BAIK. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur Listrik menunjukkan bahwa skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan dengan nilai rata-rata 3,62. Hal ini menunjukkan responden menyatakan bahwa infrastruktur Listrik tersedia dengan mudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas dengan nilai rata-rata sebesar 3,24.

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Maros meningkat pesat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan 5 persen setiap tahunnya. Selain pertumbuhan yang semakin pesat, pemerintah Kabupaten Maros melalui kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN, sejak tahun 2021 menyasar area desa/dusun terpencil di Kabupaten Maros untuk pemasangan instalasi listrik baru. Selain jumlah



pelanggan yang terus bertumbuh, jumlah daya listrik yang terpasang juga semakin meningkat. Berdasarkan laporan Pemkab Maros, pada tahun 2016 daya terpasang sebesar 175.626.750 Kw, kemudian pada tahun 2017 daya terpasang sebesar 186.914.639 Kw. Pada tahun 2019, daya terpasang sudah mencapai 203.398.189 Kw.

**Tabel 2.32**  
**Kualitas Layanan Infrastruktur Listrik Kabupaten Maros Tahun 2023**

Sub Indikator	Total Nilai	Nilai Rata-Rata	Nilai Intervensi Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Ketersediaan	1.552	3,62	90,50	A	Sangat Baik
Kualitas	1.389	3,24	80,94	B	Baik
Kesesuaian	1.418	3,32	83,02	B	Baik
Efektivitas Pemanfaatan	1.409	3,32	82,88	B	Baik
Kontribusi pada Perekonomian	975	3,42	85,23	B	Baik
<b>Total Nilai Rata-Rata</b>		<b>16,90</b>		<b>B</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,38</b>		
<b>IKM</b>				<b>84,52</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Bappelbangda Kab. Maros, 2023

## MISI 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

Maksud misi 6 adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan, baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, serta mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam. Misi 6 terdiri atas 2 (dua) tujuan, yaitu; (1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan (2) Menurunkan Resiko bencana. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan 1 adalah Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan, untuk Tujuan 2 sasaran yang ingin dicapai adalah Menurunnya Resiko Akibat Bencana.

### 1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan

Untuk mengukur penurunan pencemaran lingkungan maka digunakan 3 indikator, yaitu; (1) Indeks Kualitas Udara, (2) Indeks Kualitas Air, dan (3) Indeks Kualitas Tutupan lahan. Indeks Kualitas Udara (IKAU) didefinisikan





sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan., Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air dilakukan di sungai-sungai yang melintasi kecamatan dalam satu kabupaten, Indeks tutupan lahan (IKTL) merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial. IKTL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Realisasi IKU Kabupaten Maros tahun 2023 sebesar 88,74 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (87,77). Hal ini menunjukkan kualitas udara Kabupaten Maros semakin meningkat pada Tahun 2023. Realisasi IKU tersebut juga melewati target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMD. Capaian kinerja IKU Pada Tahun 2023 sebesar 101,53 persen dengan kategori kinerja SANGAT BAIK. Realisasi IKA Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar 53,64 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (55,45 poin). Hal ini menunjukkan kualitas air di Kabupaten Maros semakin membaik. Realisasi IKA pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 50,30 poin, namun belum mencapai target dalam RPJMN yaitu sebesar 55,40 poin. Capaian kinerja IKA pada Tahun 2023 sebesar 106,64 persen dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK. Realisasi IKTL Tahun 2023 sebesar 53,71 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (53,55 poin). Realisasi IKTL Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD namun belum mencapai target RPJMN sebesar 64,50 poin. Capaian kinerja IKTL tahun 2023 sebesar 102,66 persen dengan kategori capaian kinerja SANGAT BAIK.

**Tabel 2.33**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks	Nilai	87,77	87,40	88,74	101,53	88,00	84,40



	Kualitas Udara	Indeks						
2	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	55,45	50,30	53,64	106,64	50,60	55,40
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks	53,55	52,32	53,71	102,66	55,30	64,50

Sumber : DPPKLH Kab. Maros, 2023

Sumber-sumber pencemaran udara di Kabupaten Maros adalah penggunaan bahan bakar dari transportasi, aktivitas perindustrian, kondisi udara perkantoran, dan keadaan udara disekitaran permukiman. Pencemaran udara yang masih cukup rendah diimbangi atau didorong masih luasnya areal hutan serta RTH, dan sepanjang jalan masih dipenuhi dengan pepohonan, sehingga tingkat pencemaran udara masih dapat ditekan.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air di Kabupaten Maros adalah limbah cair/padat dari domestik, industri dan pertanian. Tingkat pencemaran air masih kategori sedang karena pencemaran sungai dapat normal dengan sendirinya dengan sifat air sungai yang mengalir.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kualitas tutupan lahan berkurang adalah kondisi luas wilayah, luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, RTH (Ruang Terbuka Hijau), Taman Kehati, Tutupan Vegetasi Revelan Lainnya, RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN). Sedangkan faktor yang dapat mendukung pencapaian IKTL adalah pembukaan RTH yang menjadi prioritas pembangunan, dan adanya Perda Alih Fungsi Lahan.



## 2. Menurunnya Resiko Akibat Bencana

Ancaman menimbulkan bencana apabila manusia berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Sebaliknya ancaman tidak menjadi bencana apabila manusia tidak dalam kondisi rentan dan mampu mengatasi akibat yang ditimbulkannya.

Realisasi indeks ancaman bencana tahun 2023 sebesar 16,40 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (18,12 poin). Realisasi tahun 2023 berada di bawah target RPJMD yaitu sebesar 16,65 poin. Capaian indeks ancaman bencana tahun 2023 sebesar 98,50 persen, dengan kategori capaian SANGAT TINGGI.

Indeks Kerugian adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan (Rupiah) akibat kejadian bencana suatu daerah atau wilayah. Realisasi Indeks kerugian tahun 2023 sebesar 6,81 poin, meningkat dibandingkan sedikit berada di bawah target RPJMD yaitu sebesar 6,00 poin. Hal ini menunjukkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada Tahun 2023 semakin meningkat. Indeks kerugian pada Tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 6,65 poin. Capaian indeks kerugian tahun 2023 sebesar 97,22 persen dengan kategori capaian adalah TINGGI.

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Realisasi indeks kapasitas tahun 2023 sebesar 0,67 poin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya (0,67 poin) dan berada dibawah target RPJMD sebesar 0,86 poin. Capaian indeks kerugian tahun 2023 sebesar 73,26 persen, dengan kategori capaian SEDANG

**Tabel 2.34**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ancaman Bencana, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Ancaman Bencana	Nilai Indeks	18,12	16,65	16,4	98,50	12,26	-
2	Indeks Kerugian	Nilai Indeks	6,00	6,65	6,81	102,33	5,60	-
3	Indeks	Nilai	0,00	0,86	0,63	73,26	0,77	-



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Target Nasional (RPJMN)
				Target	Realisasi	Capaian		
	Kapasitas	Indeks						

Sumber : BNPB, 2023

Faktor-faktor yang menyebabkan indeks ancaman bencana Kabupaten Maros masih tinggi adalah cuaca ekstrem, pembukaan lahan di bagian hulu, pembangunan di hilir yang menyebabkan tidak ada pembuangan air. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ancaman bencana di Kabupaten Maros adalah melakukan peran aktif untuk melakukan pencegahan bencana seperti pembentukan desa tangguh bencana dan sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat.

Faktor yang menyebabkan Indeks Kerugian masih cukup tinggi adalah tingkat kerugian yang disebabkan oleh bencana tidak dapat diukur dan diperkirakan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan dana untuk melakukan perbaikan rumah, ataupun penggantian kerugian yang diperoleh masyarakat akibat kejadian bencana.

Capaian indeks kapasitas yang masih rendah disebabkan rekomendasi BNPB terkait penguatan kapasitas kelembagaan bencana memerlukan waktu untuk penyelesaian dan anggaran yang cukup besar, namun telah dilakukan beberapa perbaikan terkait kelembagaan bencana daerah.

### 3.2 PROGRAM DAN ANGGARAN PENDUKUNG

#### MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANANAN PUBLIK

##### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 39 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 20 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 739.210.591.704. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.35**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 1 Sasaran 1**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupateb/Kota	664.675.204.809	Semua PERANGKAT DAERAH
	2 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.426.173.700	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	3 Perekonomian dan Pembangunan	1.837.260.000	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
	4 Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	1.759.469.695	Sekretariat DPRD
	5 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	7.780.079.127	Sekretariat DPRD
	6 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah	673.379.500	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	52.806.000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	8 Pengelolaan Keuangan Daerah	50.372.717.678	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	9 Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.072.214.800	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	10 Pengelolaan Pendapatan Daerah	992.837.760	Badan Pendapatan Daerah
	11 Kepegawaian Daerah	827.997.000	Badan Kepegawaian dan



SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12 Pengembangan Sumberdaya manusia	327.076.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	13 Penelitian dan Pengembangan Daerah	485.765.500	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	14 Penyelenggaraan Pengawasan	1.883.799.000	Inspektorat Daerah
	15 Perumusan kebijaksanaan, Pendampingan dan Asistensi	36.750.000	Inspektorat Daerah
	16 Pengelolaan aplikasi Informatika	3.934.645.300	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	17 Pengelolaan Arsip	37.257.835	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	18 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1.230.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	19 Perizinan Penggunaan Arsip	16.490.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	20 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	17.438.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber : Bapelitbangda Kab. Maros, 2023

## 2. Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran terciptanya pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 21 Perangkat Daerah, dengan



jumlah program pendukung prioritas sebanyak 8 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 8.138.220.120 Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 1 Sasaran 2**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1 Pendaftaran Penduduk	416.529.300	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	2 Pencacatan Sipil	115.429.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	3 Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	430.864.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	4 Pengelolaan Profil Kependudukan	7.924.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	5 Pelayanan Penanaman Modal	84.672.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Stau Pintu dan ketenagakerjaan
	6 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.937.959.900	Kecamatan
	7 Pemenuhan Hak anak (PHA)	118.091.920	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8 Perlindungan Khusus anak	26.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## MISI 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup masyarakat didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap



Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 6 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 13 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 61.833.763.018. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.37**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 1**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1 Pengelolaan Pendidikan	20.482.204.795	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.295.534.771	Dinas Kesehatan
	3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.470.000	
	4 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	80.245.000	
	5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	244.840.000	
	6 Pengendalian Penduduk	28.392.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	7 Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.264.234.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8 Pembinaan Perpustakaan	264.975.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	9 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	737.925.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan





SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	10 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.479.611.609	Olahraga
	11 Pengembangan Bahasa dan Sastra	11.100.000	
	12 Pengelolaan Pendapatan Daerah	992.837.760	Badan Pendapatan Daeah
	13 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.938.393.083	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 2 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 4 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 2.507.773.700. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38  
Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 2

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan	1 Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.426.173.700	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	2 Pengembangan Kebudayaan	36.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3 Pengembangan Kesenian Tradisional	11.800.000	
	4 Pengelolaan Permuseuman	33.000.000	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## 3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan



keagamaan didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 3 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 282.610.000. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.39**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 2 Sasaran 3**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender	1 Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	63.050.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2 Perlindungan Perempuan	167.160.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3 Peningkatan Kualitas Keluarga	52.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

### **MISI 3. MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF**

#### **1. Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat**

Pencapaian sasaran ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 2



Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 3 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 314.283.400. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.40**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 3 Sasaran 1**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Kebutuhan Konsumsi Masyarakat	1 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	252.131.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2 Pengawasan Keamanan Pangan	34.027.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	28.124.500	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## 2. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat

Pencapaian sasaran standar pelayanan minimum masyarakat didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 6 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 12 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 45.218.827.761. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.41**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 3 Sasaran 2**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat	1 Pengelolaan Pendidikan	7.425.518.050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.295.534.771	Dinas Kesehatan



SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.470.000	
	4 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	80.245.000	
	5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	244.840.000	
	6 Pengembangan Perumahan	24.699.700	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
	7 Penanggulangan Bencana	2.512.202.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	161.595.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	9 Pemberdayaan Sosial	275.202.000	Dinas Sosial
	10 Rehabilitasi Sosial	66.383.000	
	11 Perlindungan Dan Jaminan Sosial	995.837.340	
	12 Penanganan Bencana	123.300.000	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

#### MISI 4. MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL

##### 1. Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB

Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 7 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 25 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 26.502.812.634. Rincian program dan



anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.42**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 1**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	1 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.263.320.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	278.500.000	
	3 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94.193.500	
	4 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	190.275.500	
	5 Perizinan Usaha Pertanian	4.396.000	
	6 Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.752.691.850	
Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	7 Pengelolaan Perikanan Budidaya	320.131.600	Dinas Perikanan
	8 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	918.226.800	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	9 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.591.264.040	
	10 Pemasaran Pariwisata	578.946.616	
	11 Pengembangan Ekspor	13.414.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	12 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	288.677.000	
	13 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	4.326.000	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENGAMPU</b>
	14 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	166.429.600	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan
	15 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.691.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	16 Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	11.129.000	
	17 Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	12.536.000	
	18 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	24.360.000	
	19 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UmkM)	160.757.750	
	20 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	8.711.753.078	Dinas Pekerjaan Umum, tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan
Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	21 Pengelolaan Pelayaran	10.700.000	Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	22 Pengelolaan Persampahan	5.984.938.500	Dinas Pekerjaan Umum, tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan
	23 Pengembangan Jasa Konstruksi	97.989.500	Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	24 Kawasan Permukiman	7.355.300	
	25 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	13.810.000	



Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## 2. Menurunnya Jumlah Pengangguran

Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 7 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 25 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 26.502.812.634. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 2**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Menurunnya jumlah pengangguran	1 Penempatan Tenaga Kerja	3.400.000	Dinas Penanaman Modal, elayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## 3. Terkendalinya Laju Inflasi

Pencapaian sasaran terkendalinya laju inflasi didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 4 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 4 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 1.989.429.400. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.44**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 3**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Terkendalinya laju inflasi	1 Pengawasan Keamanan Pangan	34.027.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang	12.491.500	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian



	Penting		dan Perdagangan
3	Perekonomian Dan Pembangunan	1.837.260.000	Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah
4	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	105.650.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

#### 4. Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

Pencapaian sasaran menurunnya jumlah masyarakat miskin oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 10 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 13 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 77.630.841.241. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 4 Sasaran 4**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Menurunnya jumlah masyarakat miskin	1 Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.426.173.700	Bagian Administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	2 Pengelolaan Pendidikan	37.531.282.560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.295.534.771	Dinas Kesehatan
	4 Pengembangan Perumahan	24.699.700	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	5 Perlindungan Dan Jaminan	995.837.340	Dinas Sosial





SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Sosial		
	6 Pemenuhan Hak Anak (PHA)	118.091.920	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8 Pendaftaran Penduduk	416.529.300	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	9 Pencatatan Sipil	115.429.000	
	10 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	444.164.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	11 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	190.275.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	12 Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.752.691.850	Dinas Perikanan
	13 Pengelolaan Perikanan Budidaya	320.131.600	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## MISI 5. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH

### 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 4 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 13 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 35.030.686.889. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.46**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 5 Sasaran 1**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat	1 Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	179.940.000	Dinas Pekerjaan Umum, tata Ruang, Perhuungan dan Pertanahan
	2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	23.920.000	Dinas Pekerjaan Umum, tata Ruang, Perhuungan dan Pertanahan
	3 Penyelenggaraan Jalan	19.690.441.151	
	4 Penyelenggaraan Penataan Ruang	637.701.824	
	5 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	8.711.753.078	
	6 Pengelolaan Pelayaran	10.700.000	
	7 Kawasan Permukiman	7.355.300	Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	8 Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.370.000	
	9 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	13.810.000	
	10 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	277.230.236	Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
	11 Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.934.645.300	
	12 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.263.320.000	
	13 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	278.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**MISI 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA****1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan**

Pencapaian sasaran menurunnya tingkat pencemaran lingkungan didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 7 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 6.324.341.600. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 6 Sasaran 1**

<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENGAMPU</b>
Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	1 Perencanaan Lingkungan Hidup	25.238.000	Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	2 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	136.494.100	
	3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	149.317.000	
	4 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	7.000.000	
	5 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.200.000	
	6 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.154.000	



SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	7 Pengelolaan Persampahan	5.984.938.500	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

## 2. Menurunnya Resiko Akibat Bencana

Pencapaian sasaran menurunnya resiko akibat bencana didukung oleh program dan anggaran yang dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu sasaran tersebut. Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu sasaran tersebut sebanyak 1 Perangkat Daerah, dengan jumlah program pendukung prioritas sebanyak 1 program dan alokasi anggaran sebesar Rp 2.512.202.900. Rincian program dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.48**  
**Program dan Anggaran Pendukung Misi 6 Sasaran 2**

SASARAN RPJMD	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Menurunnya Resiko Akibat Bencana	1 Penanggulangan Bencana	2.512.202.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan diatas, maka capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2023 secara umum dapat dikatakan sangat tinggi, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 103,13 persen. Dari keseluruhan indikator kinerja utama Kabupaten Maros, hanya ada dua indikator yang tidak masuk kategori sangat tinggi, yakni persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan capaian 40,57 persen (Sangat Rendah), dan indikator Indeks kapasitas dengan capaian 73,26 (Sedang). Gambaran capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**

No	Indikator	2023		CAPAIAN
		Target	Realisasi	
1	2	9	10	11
1	Nilai SAKIP	65,00	64,08	98,58
2	Indeks Kepuasan	3,25	3,50	107,69



No	Indikator	2023		CAPAIAN
		Target	Realisasi	
1	2	9	10	11
	Masyarakat			
3	Indeks Pendidikan	63,47	64,26	101,24
4	Indeks Kesehatan	75,96	76,07	100,14
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keagamaan	3,25	3,55	109,23
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,12	3,64	113,19
7	Indeks Pembangunan Gender	90,04	89,20	99,07
8	Inflasi	3,14	2,89	108,65
9	Indeks Harga Konsumen	107,24	113,35	94,61
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Minimum Masyarakat	3,25	3,28	100,92
11	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	5,62	2,28	40,57
12	PDRB Per Kapita	51,03	64,69	126,77
13	Angka kemiskinan	8,81	9,65	91,30
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,25	3,24	99,69
15	Indeks Kualitas Udara	87,40	88,74	101,53
16	Indeks Kualitas Air	50,30	53,64	106,64
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,32	53,71	102,66
18	Indeks Ancaman Bencana	16,65	16,4	98,50
19	Indeks Kerugian	6,65	6,81	97,72
20	Indeks Kapasitas	0,86	0,63	73,26
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>103,13</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Pada Tahun 2023, Kabupaten Maros telah melaksanakan 99 program dengan total anggaran sebesar Rp 987.385.702.239,00 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Secara Umum, besaran anggaran pada tahun 2023 berdasarkan sasaran tiap-tiap misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.50**  
**Jumlah Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Setiap Misi RPJMD**

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD		Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	739,210,591,704.00
		2	Terciptanya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	8,138,220,120.00
2	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat	61,664,485,518.00
		2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keagamaan	2,507,773,700.00
		3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Gender	282,610,000.00
3	Meningkatkan Keterjangkauan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Dasar Secara Inklusif	1	Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Konsumsi Masyarakat	297,269,450.00
		2	Terpenihinya Standar Pelayanan Minimum Masyarakat	45,049,550,261.00
4	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	1	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Daerah Terhadap PDRB	18,297,999,195.00
		2	Menurunnya Jumlah pengangguran	3,400,000.00
		3	Terkendalinya Laju Inflasi	1,972,415,450.00
		4	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin	77,630,841,241.00
5	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Pemerataan Wilayah	1	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat	29,818,342,700.00



No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Anggaran (Rp)
6	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ketahanan Bencana	1   Menurunnya Resiko Akibat Bencana	2,512,202,900.00
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>987,385,702,239.00</b>

Sumber : Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

### c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 ataupun Tahun Terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun - tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 2.51**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2022 dan tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	B
	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A
2	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	63,78	64,26
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks Kesehatan	75,82	76,07
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	A	A
3	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan	Indeks harga konsumen	107,92	113,35
	Terpenuhinya standar pelayanan minimum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B	B
4	Meningkatnya kontribusi	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	1,93	2,28



	lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	PDRB Perkapita	58,31	64,69
	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	5,04	3,64
	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	5,99	2,89
	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	9,43	9,65
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	B	B
6	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	87,77	88,74
		Indeks kualitas Air	55,45	53,64
		Indeks kualitas Lahan	53,55	53,71
7	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana	18,12	16,4
		Indeks Kerugian	6,00	6,81
		Indeks kualitas kapasitas	0,00	0,63





**d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Periode terakhir dokumen RPJMD Kabupaten Maros, Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka menengah Daerah. Perbandingan antara Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.52**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2023 dibandingkan dengan target RPJMD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPJMD
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	A
	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A
2	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	Indeks Pendidikan	64,26	65,97
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan keagamaan	Indeks Kesehatan	76,07	76,45
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	A	A
3	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan	Indeks harga konsumen	113,35	98,91
	Terpenuhinya standar pelayanan minimum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar	B	A
4	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB Pembangunan Desa	Persentase pertumbuhan kondisi lapangan usaha daerah	2,28	7,79
		PDRB Perkapita	64,69	57,44
	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,64	3,52
	Terkendalnya laju inflasi	Laju inflasi	2,89	3,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPJMD
	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	9,43	7,64
5	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	B	A
6	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Udara	87,77	88,00
		Indeks kualitas Air	55,45	50,60
		Indeks kualitas Lahan	53,55	55,30
7	Menurunnya resiko akibat bencana	Indeks Ancaman Bencana	18,12	12,26
		Indeks Kerugian	6,00	5,60
		Indeks kualitas kapasitas	0,00	0,77

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

**a. Struktur Organisasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dilakukan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga pada tahun 2016 telah ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maros.

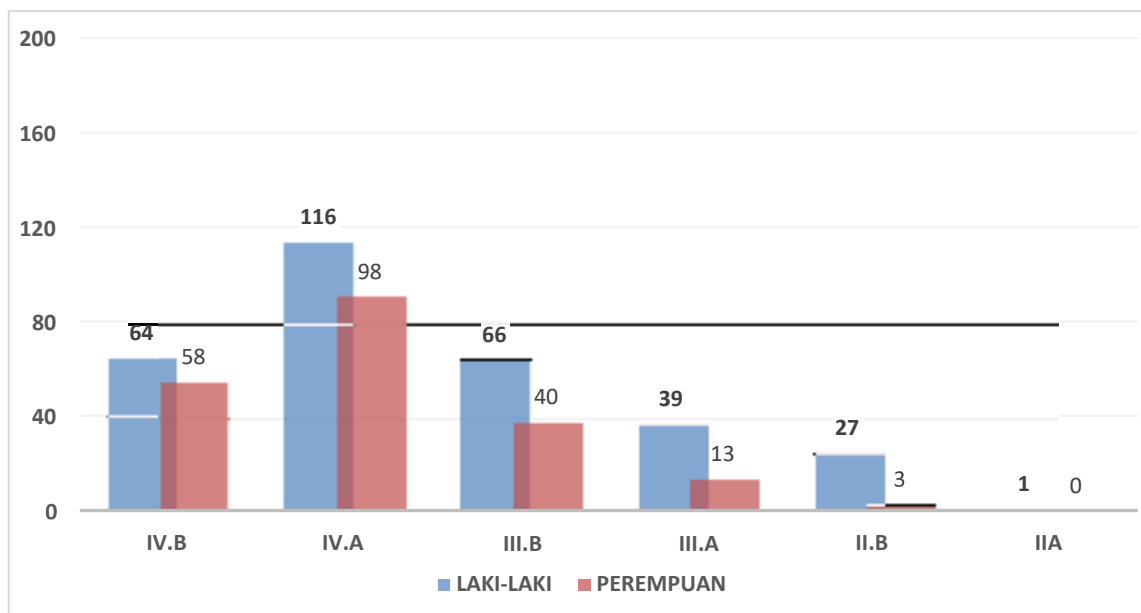
Fungsi aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba, dan dimiliki, melainkan hanya sebatas



digunakan, dirasakan, dibeli, atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang. Jumlah ASN Negeri Sipil dan PPPK berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.666 orang.

Jumlah ASN berdasarkan eselon Kabupaten Maros sebanyak 122 orang yang terdiri dari 1 Orang yang menduduki eselon II-A, 30 orang yang menduduki jabatan pada eselon II-B, 52 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-A, 106 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-B, 214 orang yang menduduki jabatan pada eselon IV-A serta 122 orang ASN yang menduduki jabatan pada eselon IV-B.

**Grafik 2.11**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2024

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros memiliki 26 (Dua Puluh Enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 14 (empat belas)



Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan serta 80 (delapan puluh) Desa.

Berdasarkan uraian jabatan dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diurai sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Terdiri Dari :
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A yang merupakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan dan Pertanahan;
  - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman pertanahan dan lingkungan hidup;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - 6) Dinas Sosial merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan bidang sosial;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan



- pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - 11) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM dan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - 12) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (PTSPK) merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
  - 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata, Pemuda dan olah raga;
  - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - 15) Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan



- pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pembangunan;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - 3) Badan Pendapatan daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulan bencana ;
  - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerinatahn bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari :
- 1) RSUD Salewangang merupakan RSUD Tipe C

Disamping Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Lembaga Penunjang Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros, terdapat pula 3 (tiga) kelompok jabatan Staf Ahli Bupati yakni :

- a. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam;

Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Marusu dengan tipe A
2. Kecamatan Moncongloe dengan tipe A
3. Kecamatan Mandai dengan tipe A
4. Kecamatan Tanralili dengan tipe A
5. Kecamatan Tompobulu dengan tipe A
6. Kecamatan Turikale dengan tipe A
7. Kecamatan Maros Baru dengan tipe A

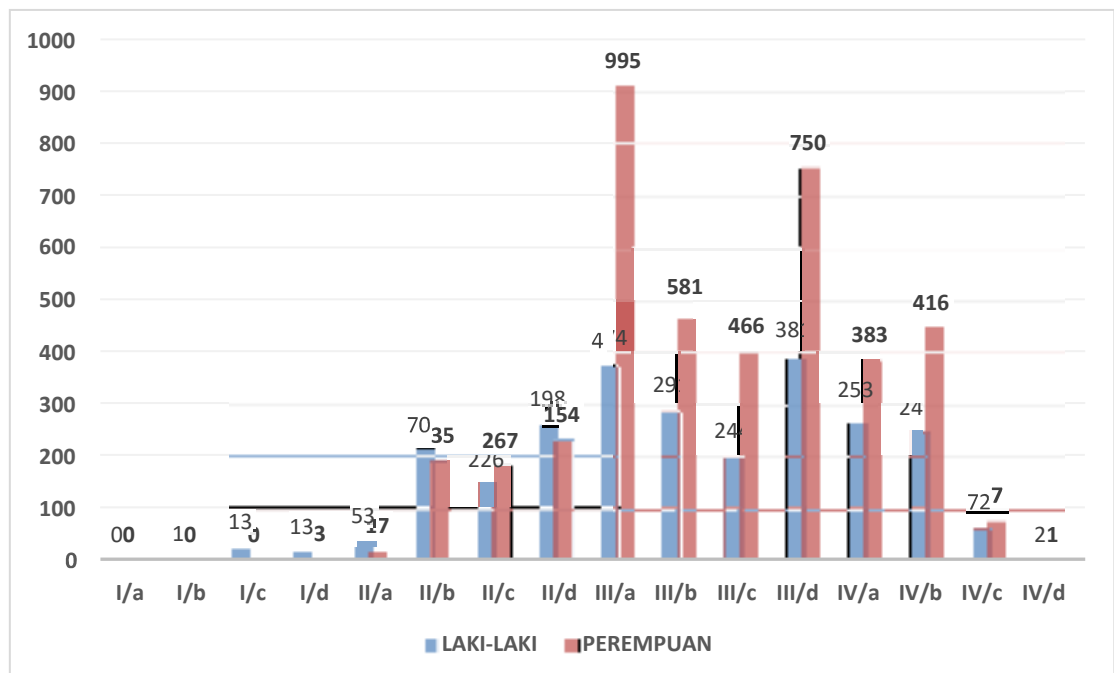


- 8. Kecamatan Lau dengan tipe A
- 9. Kecamatan Bontoa dengan tipe A
- 10. Kecamatan Bantimurung dengan tipe A
- 11. Kecamatan Simbang dengan tipe A
- 12. Kecamatan Cenrana dengan tipe A
- 13. Kecamatan Camba dengan tipe A
- 14. Kecamatan Mallawa dengan tipe A

## 2. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.666 orang. Jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin Kabupaten Maros paling besar terdapat pada golongan III/A dengan jumlah ASN sebanyak 1.424 orang, kemudian diikuti oleh golongan III/D dimana pada golongan tersebut terdapat 1.131 orang pegawai, kemudian golongan III/B dengan jumlah ASN sebanyak 872 orang. Secara lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

**Grafik 2.12**  
**Grafik Jumlah ASN**  
**Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Maros Tahun 2023**



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2024

**f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Secara umum Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maros, namun demikian program/kegiatan tersebut akan selalu dilakukan Review apakah dalam tahun pelaksanaan terdapat program/kegiatan yang harus segera dilaksanakan atau dihentikan yang dinilai berdasarkan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Maros.

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 1</b>		
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	Tujuan : Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang professional, Bersinergi dan Berkinerja Tinggi	
1		Seluruh Perangkat Daerah
Sasaran : Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas		
1		Sekretariat Daerah
2		Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan
3		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8		Seluruh Kecamatan
9		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
10		Bappelitbangda
11		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12		Dispenda
13		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup





NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
14		Dinas Komunikasi Dan Informatika
<b>Misi 2</b>		
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat		
Tujuan : Menciptakan Kualitas SDM yang Mengedepankan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
6		Seluruh SKPD/OPD
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai Budaya Lokal		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Badan Keuangan Daerah
4		Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan
5		Bappelitbangda
6		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
7		Dinas Komunikasi Dan Informatika
8		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan
9		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
13		RSUD La Palalloi
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Seluruh Kecamatan
16		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Gender dan Kepemudaan dalam Pembangunan		
1		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		Balitbangda
3		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
5		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6		Dinas Kesehatan
7		RSUD Salewangang
8		Dinas Sosial
9		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
10		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>MISI 3</b>		
	Sasaran : Terpenuhinya Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumber Daya Ekonomi Daerah	
	Tujuan : Mengoptimalkan Penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1		Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5		Dinas Kesehatan
6		Dinas Sosial
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
8		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
11		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12		Dan Keluarga Berencana
13		Dinas Pemuda Dan Olahraga
14		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
15		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pertanahan
16		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
17		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>MISI : 4</b>		
	SASARAN: Meningkatkan Investasi serta Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha bagi Masyarakat	
	Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Keunggulan Sumber Daya Ekonomi Daerah	
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Badan Keuangan Daerah
5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
8		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
9		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
10		Dinas Perikanan
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Dinas Komunikasi Dan Informatika
16		Dinas Pemuda Dan Olahraga
17		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
19		Seluruh Kecamatan
<b>MISI 5</b>		
	Sasaran : Meningkatkan Taraf Hidup Pelaku Ekonomi Kecil dan Menengah serta Masyarakat Kurang Mampu	
	Tujuan : Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan	
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan
6		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
8		Dinas Perikanan
9		Dinas Sosial
10		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11		Bappeda
12		Balitbangda
13		Seluruh Kecamatan
	Sasaran: Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Perkotaan	
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7		Dinas Koperasi, UKM, Industri Dan Perdagangan
8		Dinas Perikanan
9		Dinas Sosial
10		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11		Bapelitbangda
<b>MISI 6</b>		
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup		
Tujuan : Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3		Badan Keuangan Daerah;
4		Bappeda;
5		Balitbangda;
6		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan;
7		Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
8		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar;
9		Dinas Parieisata, Pemuda dan Olah raga
10		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana		
1		Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		BPBD;
3		Dinas Sosial
4		RSUD La Palalloi
5		Bappelitbangda;
6		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan;



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar;
8		Seluruh Kecamatan

**Program Penunjang Pencapaian Sasaran  
Kabupaten Tahun 2023**

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangan masing- masing. Dalam Pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel Permasalahan dan Solusi  
Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PENDIDIKAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan belum tercapai;	1 Penganggaran untuk mendukung fungsi pendidikan perlu ditingkatkan dalam rangka mengentaskan dan meningkatkan angka melek huruf serta untuk mendukung dan memberikan jaminan kepada anak-anak usia sekolah di Kabupaten Maros dapat bersekolah sampai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
		2 Angka kelulusan belum mencapai 100 % dari semua tingkatan;	2 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
		3 Kapasitas SDM tenaga guru masih perlu ditingkatkan;	3 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
		4 Distribusi penempatan tenaga guru belum merata.	4 Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru se Kabupaten Maros
		5 Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai (Sekolah Dasar)	5 Penyediaan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerataan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal diseluruh wilayah Kabupaten Maros.
		6 Tugas guru sebagai ASN yang wajib bekerja selama 37,5 jam per pekan belum terpenuhi	6 Perlunya adanya regulasi dan penempatan jam-jam belajar untuk memaksimalkan waktu mengajar



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	KESEHATAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan belum tercapai	1 Penganggaran untuk mendukung program yang berkaitan dengan SPM dan Melakukan perhitungan SPM Kesehatan
		2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;	2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan Penciptaan budaya hidup bersih dan sehat dimasyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
		3 Perbaikan gizi balita belum maksimal	3 Peningkatan cakupan pelayanan gizi bagi ibu dan anak
		4 Masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dan Puskesmas yang sudah terakreditasi perlu dilakukan Reakreditasi untuk mencapai penilaian yang semakin baik dari status Dasar, Madya, Utama dan Paripurna	4 Mengusulkan dan Menganggaran akreditasi Puskesmas
		5 Sarana dan prasarana puskesmas harus memenuhi standar SPM	5 Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan.
		6 Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir	6 Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1
		7 Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan	7 Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Stimulasi makanan tambahan pada Ibu Hamil
		8 Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil	8 Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk
		9 Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.	9 Penambahan dan distribusi SDM kesehatan sesuai dengan Abk dan ANJAB.
3	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN	1 Tingkat kerusakan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi masih Tinggi	1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan





NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
	RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	<p>2 Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan</p> <p>3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib</p> <p>4 Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;</p> <p>5 Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai</p> <p>6 Ketersediaan sumber air bersih pada kawasan pesisir masih sangat kurang;</p> <p>7 Masih tingginya RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak;</p> <p>8 Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>9 Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi dalam kondisi yang rusak;</p>	<p>pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana</p> <p>Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang pemahaman pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur</p> <p>Untuk menerbitkan Perbup tentang alih fungsi lahan dan pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai</p>



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	<p>1 Pengelolaan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya dikawasan pesisir;</p> <p>2 Sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai;</p> <p>3 Jumlah RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak masih tinggi;</p> <p>4 Penanganan terhadap kejadian bencana belum sepenuhnya berjalan optimal.</p>	<p>1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi</p> <p>1 Peningkatan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten)</p> <p>1 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan.</p>
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<p>1 Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi;</p> <p>2 Belum optimalnya penerapan perda;</p>	<p>1 Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>1 Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota yang berbasis TIK</p> <p>2 Mensosialisasikan penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu</p>
6	SOSIAL	<p>1 Angka kemiskinan masih tinggi;</p>	<p>1 Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha</p> <p>1 Peningkatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan baik prespektif gender</p> <p>1 Peningkatan akses dan penerimaan manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan kerja</p> <p>1 Peningkatan Peluang Kerja dan Berusaha bagi penduduk kurang</p>



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<p>mampu Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu</p>
		<p>2 Tingkat pengangguran terbukamasih terbilang cukup tinggi;</p>	<p>2 Penumbuhan wirausaha muda Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja 2 Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budayamasyarakat bekerja Peningkatkan pelatihan berbasis kompetensi</p>
		<p>3 Penyanggah masalah kesejahteraan sosial masih tinggi;</p>	<p>3 Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu</p>
		<p>4 Bencana banjir masih sering melanda pada wilayah-wilayah tertentu;</p>	<p>4 Perlunya sosialisasi tentang menjagalingkungan.</p>
7	<b>TENAGA KERJA</b>	<p>1 Angka pengangguran masih relatif tinggi.</p>	<p>1 Menekan angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Dan Meningkatkan investasi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta</p>
		<p>2 Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.</p>	<p>2 Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan kewirausahaan</p>
8	<b>PEMBERDAYA AN</b>	<p>1 Masih adanya kejadian kasus kekerasan dalam rumah</p>	<p>1 Penguatan lembaga perlindungan anak.</p>



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2 Anak jalanan, anak terlantar, anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada.	2 Sosialisasi kepada masyarakat dan generasimuda tentang Narkoba Membuat Pelatihan/keterampilan anak putus sekolah.
9	PANGAN	1 Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal	1 Melakukan sosialisasi Diversifikasi produk pangan lokal
		2 Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local	2 Mengembangkan diversifikasi produk panganolahan
10	PERTANAHAN	1 Penetapan batas wilayahkecamatan belum akurat;	1 Melakukan pengukuran batas wilayah Menetapkan batas wilayah kecamatan lewatPERBUP
11	LINGKUNGAN HIDUP	1 Meningkatnya dampak emisigas rumah kaca;	1 Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasidan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati
		2 Menurunnya ketersediaan dankualitas sumber air baku;	
		3 Meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan;	2 Pengawasan bagi industry/usaha diKabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentangpengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/ berkelanjutan;	3 Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkala
12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL</b>	1 Masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya kepemilikan KTP	1 Menyusun data kependudukan dengan melibatkan pemerintah ditingkat bawah (kelurahan dan desa).
		2 Layanan administrasi kependudukan masih belum berjalan secara efisien dan efektif;	2 System penataan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan dan desa agar setiap hari lebih up date.
		3 Ketersediaan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan belum maksimal	3 Penambahan sarana dan prasarana kependudukan
13	<b>PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA</b>	1 Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan Dana Desa.	1 Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan perencanaan Melaksanakan Evaluasi dan pemantapan penggunaan aplikasi keuangan Desa Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
		2 Perlunya dilakukan evaluasi atas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan.	2 Monitoring dan Evaluasi pengeluaran ADD.
		3 Belum optimalnya perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan.	3 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan Teknologi tepat guna Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakat



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB;	1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
		2 Laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi;	2 Program pemberdayaan keluarga sejaterelebih ditingkatkan. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk Pengendalian angka Total Fertility Rate (TFR)
		3 Masih rendahnya tingkat kapasitas tenaga penyuluh KB;	3 Pelatihan kompetensi untuk tenaga penyuluh dan
		4 Masih kurangnya sarana prasarana layanan KB.	Menambah jumlah sarana dan prasarana UPTD KB.
15	<b>PERHUBUNGAN</b>	1 Layanan transportasi angkutan umum belum memberikan jaminan	1 Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan
		2 Terminal angkutan umum belum berfungsi dengan baik.	
		3 Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat sebagai penggunajalan	
		4 Masih rendahnya ketersediaan rambu- rambu lalu lintas	
16	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	1 Implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi belum optimal.	1 Peningkatan prasarana dan sarana jaringan IT pada instansi, tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan sekolah-sekolah didukung kompetensi sumber daya manusia di bidang teknis IT
		2 Infrastruktur sarana dan prasarana data centre harus senantiasa terpelihara.	
		3 Sarana dan prasarana TIK belum tersedia	
		4 Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi belum tersedia	2 Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan,



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		5 Belum tersedianya jaringan sistem kebencanaan yang terintegrasi	perangkat keras) Program pemeliharaan infrastruktur lebih ditingkatkan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik secara integratif, aman, mudah, murah, dan
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Belum tersedianya data pelaku UMKM yang akurat;	1 Melakukan pencatatan data pelaku UMKM yang sudah terlegalitas (memiliki izin)
		2 Tingkat kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah	2 Menyelenggarakan program pelatihan kompetensi SDM Pelaku Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas SDM Usahamikro dalam usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
		3 Masih tingginya koperasi yang tidak aktif	3 Memfasilitasi kemitraan koperasi dengan perusahaan swasta dan Perbankan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berkoperasi Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi Peningkatan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha
18	PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan investasi masih belum optimal	1 Meningkatkan informasi penanaman modal yang berbasis Informasi Teknologi dalam mendukung iklim investasi di daerah. Melakukan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan Melakukan Pelayanan Perizinan keliling di 14 Kecamatan
		2 Pelayanan perijinan berinvestasi belum efektif	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Masih terbatas sarana dan prasarana olahraga;	1 Meningkatkan anggaran pembangunan sarana olahraga.





NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih relatif rendah;	2 Menggalakkan olahraga di masyarakat dengan penyelenggaraan perlombaan olahraga.
		3 Pembinaan terhadap peningkatan prestasi olahraga masih kurang	3 Meningkatkan pembinaan cabang olahragadengan memberikan insentif bagi cabang olahraga dan atlet.
20	STATISTIK	1 Profil daerah yang berkualitas harus senantiasa tersedia	1 Menyediakan profil daerah yang mudah diakses (pada website daerah)
		2 Ketersediaan Kabupaten dalam angka dan PDRB harus tepat waktu	2 Merekrut tenaga dalam pengambilan data untuk penyusunan data Kabupaten Data Membuat jejaring ke instansi untuk mengirimkan data yang dibutuhkan
21	PERSANDIAN	1 Jaringan komunikasi persandian belum tersedia	1 Membuat Jaringan komunikasi persandian
		2 Belum terdatanya aplikasi OPD secara menyeluruh	2 Mendata aplikasi OPD secara menyeluruh
22	PERPUSTAKAAN	1 Masih rendahnya minat baca masyarakat.	1 Melakukan sosialisasi Pemasyarakatan literasi Kepada masyarakat dan sekolah tentang Penting Membaca Road Show Gerakan gemar membaca Bagi pelajar
		2 Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasaranapenunjang perpustakaan
		3 Regulasi tentang Perpustakaan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi keperputakaan Membuat peraturan Bupati tentang Perpustakaan
23	KEARSIPAN	1 Belum memadainya SDM tentang kearsipan;	1 Perlu penambahan petugas arsip daerah dan peningkatan kompetensinya dalam mengelola arsip.
		2 Sarana prasarana kearsipan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasaranapenunjang kearsipan
		3 Regulasi tentang kearsipan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi kearsipan Membuat peraturan Bupati tentang Kearsipan





NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI		
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Masih tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove.	1	Sosialisasi sangat dibutuhkan kepada masyarakat dan perlu ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami penting Hutan mangrove
		2	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok- kelompok petani pembudidaya dan nelayan.	2	Pembinaan Kelompok petani Pembudidayaan dan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
		3	Masih rendahnya pendapatan petani.	3	Bantuan dana dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan Bantuan Pemasaran untuk hasil olah ikan. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan
		4	Sarana prasarana jalan produksi masih belum optimal	4	Menyediakan sarana dan prasarana jalan produksi
25	KEBUDAYAAN	1	Nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat harus senantiasa dijaga dan dilestrakan.	1	Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah.
		2	Ketersediaan dan SDM pelakubudaya masih sangat terbatas		
26	PARIWISATA	1	Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata	1	Perlu adanya dukungan penambahan event/kegiatan pariwisata
		2	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tempat-tempat wisata belum maksimal	2	Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat baik itu pelatihan/kursus bahasa, pembuatan produk dan kursus pendukung lainnya
		3	Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum optimal	3	Lebih meningkatkan promosi wisata baik ditingkat nasional maupun manca negara.
27	PERTANIAN	1	Berkurangnya lahan / areal persawahan akibat alih fungsilahan	1	Perlu dibuat regulasi Peraturan daerah tentang penguatan lahan pertanian dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan akibat perkembangan kota maros. dan Cetak sawah baru
		2	Kontribusi sektor pertanian terhadap	2	Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan produksi padi dengan



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
			melakukan penerapan
		3 Wabah antraks masih sering terjadi;	3 Sosialisasi pencegahan wabah antraks
		4 Produksi dan produktivitas perkebunan masih rendah	4 Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur pertanian Pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan bagi kelompok tani
28	PERDAGANGAN	1 Adanya perdagangan bebas yang menjadi tantangan bagi daerah;	1 Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagang tentang perdagangan bebas dan Bimbingan teknis tentang Daya Saing Pemanfaatan Inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk usaha
		2 Sarana prasarana pasar tradisional belum memadai;	2 Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional
		3 Sarana prasarana pasar harus selalu terpelihara dan dalam kondisi yang Baik	3 Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemeliharaan sarana dan prasarana kepada pedagang pasar serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ditingkatkan
29	PERINDUSTRIAN	1 Terbatasnya lahan bagi industri berskala menengah dan besar;	1 Membuat regulasi Pengembangan Sentra Industri sebagai cikal bakal kawasan industri Maros yang terintegrasi dengan sumber bahan baku lokal dan pemasaran produksi hasil industri



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Industri- industri potensial harus senantiasa dikembangkan	2 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku sektor industri kreatif. Pengembangan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
		3 Belum terpromosinya industri-industri kecil;	3 Melakukan promosi hasil produksi masyarakat pelaku IKM (Industri kecil menengah) Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Membangun Show Room Untuk Hasil Olahan Masyarakat Pelaku IKM
30	TRANSMIGRASI	1 Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relatif rendah dan ketidakpastian transmigrasi;	1 Menyelenggarakan Bimbingan dan fasilitasi serta sosialisasi ketransmigrasian
		2 Semakin rendahnya transmigrasi umum dan transmigrasi swakarya Mandiri	
32	KEPEGAWAIAN	1 Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;	1 Peninjauan kembali terhadap kesesuaian lembaga/struktur OPD dengan tugas pokok dan fungsinya. Uji Kompetensi Jabatan struktural dan Fungsional Administrasi Mutasi ASN Peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, pemberian reward, dan penerapan punishment.
		2 Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja;	2 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN Penegakan Disiplin Aparatur



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3 Jumlah ASN yang lebih besar daripada beban kerja yang terdapat pada setiap unit kerja utamanya yang berposisi sebagai tenaga administrator dan pengarsipan, sedangkan disisi lain ASN yang berposisi pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu belum mencukupi untuk memenuhi beban kerja yang ada.	3 Penyusunan Dokumen Analisi Beban Kerja Perekrutan/penerimaan CPNS dan P3K untuk jabatan fungsional Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan Data dan Informasi yang terpilah sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan Daerah.
33	PERENCANAAN	1 Integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal;	1 Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
		2 Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;	2 Peningkatan kapasitas tenaga perencana, baik di Bappeda maupun yang ada di masing-masing OPD melalui Diklat/Bimtek perencanaan
		3 Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah	3 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan lainnya
		4 Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	
		5 Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	4 Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah



NO	URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
34	KEUANGAN	1 Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD pada tahun sebelumnya	1 Mempersingkat Regulasi Pemungutan pajak Membuat Peraturan Tentang Mekanisme pajak BPHTB Pencatatan kembali Pajak Per-Tahun Melakukan Monitoring dan Evaluasi Melakukan sosialisasi Pajak
		2 Kurang penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	2 Dibuatkan aplikasi pelayanan pemungutan pajak (secara Online) Dibuatkan SOP standar pelayanan
		3 Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual	3 Memberikan pelatihan kompetensi tentang manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis akrual



### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementrian/Lembaga yang dialokasikan untuk Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN.

##### 3.1. Dasar hukum Penyelenggaraan tugas Pembantuan

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

### **3.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan**

#### **3.2.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Maros menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka penguatan perekonomian dalam sektor pembangunan sarana dan prasarana Pasar.

#### **3.2.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros**

Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 tidak melakukan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi

##### **a. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.**

Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Adapun beberapa tugas pembantuan yang dimaksud untuk kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Turikale yaitu Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dan Administrasi kegiatan Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.

Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar rakyat mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.000.000.000 dengan realisasi Rp. 2.913.417.868 (97.11%). Pembangunan Pasar Rakyat Turikale sebesar Rp. 2.895.795.000 dengan realisasi Rp. 2.809.343.000 (97,01%) dan Administrasi kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 104.205.000 dengan realisasi Rp. 104.074.868 (99,88%).

Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :



**Tabel 3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023**

NO	KEMENTERIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN				
	Kementerian Perdagangan	Keg. Pembangunan Pasar Rakyat Turikale	3.000.000.000	2.913.417.868	97.11
		Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	2.895.795.000	2.809.343.000	97.01
		Administrasi kegiatan Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat	104.205.000	104.074.868	99,88

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, 2023

### 3.3. Permasalahan dan Kendala

Tugas pembantuan pada hakekatnya merupakan tugas untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap penerapan kebijakan yang bersifat operasional. Oleh karena itu, berbagai petunjuk pelaksanaan harus dipersiapkan oleh pihak yang menugaskan. Agar pelaksanaan tugas pembantuan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu disusun rencana tindakan (*action plan*) yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari masalah yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintah.

### 3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Diharapkan untuk tahun 2023 ini, pemerintah melalui Kementerian tetap menganggarkan ataupun menyalurkan anggaran tugas pembantuan sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang bisa mendorong dan membantu daerah-daerah untuk dapat meningkatkan seluruh aspek yang berdampak baik kepada Masyarakat.





## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pencapaian dan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pusat masing-masing bidang SPM dan diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mengintegrasikan program kegiatan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat penting karena indikator-indikator yang terdapat pada setiap bidang SPM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Pencapaian ini juga memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta secara teknis dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Di bawah ini akan diuraikan kompilasi masing-masing bidang SPM yang terdiri atas kriteria indikator yang belum, sudah memenuhi dan melampaui dari target nasional yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisa dalam pengumpulan data dan informasi sesuai dengan indikator bidang masing masing SPM. Hasil analisis untuk kriteria setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM dan setiap indikator sebagai berikut :

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 dalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah



Target Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.1**  
**Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	(%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	14.764	14.764	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	68.345	68.345	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	420	420	100

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

### 3. Anggaran

Alokasi Anggaran untuk pemenuhan SPM urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.4.2**  
**Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pendidikan Anak Usia Dini	8.533.781.000	7.771.276.944	91,06	APBD
2	Pendidikan Dasar	60.290.352.900	59.787.160.426	99,17	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	4.812.850.000	3.195.069.824	66,39	APBD
<b>Total Anggaran SPM</b>		<b>73.636.983.900</b>	<b>70.753.507.194</b>	<b>96,08</b>	
<b>Total Anggaran PD</b>		<b>453.410.896.057</b>	<b>415.919.725.977</b>	<b>91,73</b>	
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM</b>		<b>0</b>	<b>17,01</b>		

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023



## 4. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut :

**Tabel. 4.3**  
**Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan**

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	41	26	67
2	GOL. III	27	33	60
3	GOL. II	7	5	12
4	GOL. I	1	0	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>140</b>

Sumber data : BKPSDM , 2023

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel. 4.4**  
**Daftar Guru PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis PAUD**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK PAUD		TOTAL
		TK/KB	RA	
1	Bantimurung	45	2	47
2	Camba	30	0	30
3	Cenrana	39	0	39
4	Lau	45	7	52
5	Mallawa	31	0	31
6	Mandai	78	5	83
7	Maros Baru	52	4	56
8	Bontoa	64	4	68
9	Marusu	49	4	53



10	Moncongloe	58	4	62
11	Simbang	53	7	60
12	Tanralili	68	5	73
13	Tompobulu	30	1	31
14	Turikale	78	15	93
<b>JUMLAH</b>		<b>720</b>	<b>58</b>	<b>778</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

**Tabel. 4.5**  
**Daftar Penilik PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah**

No.	Wilayah Kecamatan	Penilik PAUD		JUMLAH
		L	P	
1	Turikale	-	1	1
2	Maros Baru	1	-	1
3	Mandai	-	1	1
4	Bontoa	1	-	1
5	Lau	-	1	1
6	Tanralili	1	-	1
7	Tompobulu	1	-	1
8	Moncongkoe	1	-	1
9	Bantimurung	-	1	1
10	Simbang	1	-	1
11	Cenrana	1	-	1
12	Camba	1	-	1
13	Mallawa	1	-	1
14	Marusu	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023



**Tabel. 4.6**  
**Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Maros**

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA		Total
		PAUD/KB	RA	
1	Bantimurung	17	1	18
2	Camba	16	0	16
3	Cenrana	17	0	17
4	Lau	16	3	19
5	Mallawa	14	0	14
6	Mandai	29	5	34
7	Maros Baru	18	2	20
8	Bontoa	25	1	26
9	Marusu	16	1	17
10	Moncongloe	23	0	23
11	Simbang	21	4	25
12	Tanralili	30	2	32
13	Tompobulu	12	1	13
14	Turikale	33	7	40
<b>JUMLAH</b>		<b>287</b>	<b>27</b>	<b>314</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

**Tabel. 4.7**  
**Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Maros**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	1025	993	2018
2	Camba	171	179	350
3	Cenrana	592	620	1212
4	Lau	588	587	1175



5	Mallawa	600	596	1196
6	Mandai	145	160	305
7	Maros Baru	667	752	1419
8	Bontoa	741	763	1504
9	Marusu	398	435	833
10	Moncongloe	206	219	425
11	Simbang	266	276	542
12	Tanralili	562	565	1127
13	Tompobulu	466	436	902
14	Turikale	942	870	1812
<b>JUMLAH</b>		<b>7369</b>	<b>7451</b>	<b>14820</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

## 2) Pendidikan Dasar

Jumlah guru di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Daftar Guru SD Kabupaten Maros**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK SD		TOTAL	JUMLAH PENDIDIK SMP		TOTAL
		L	P		L	P	
1	Bantimurung	40	167	207	30	67	97
2	Camba	33	91	124	31	44	75
3	Cenrana	29	85	114	20	38	58
4	Lau	22	103	125	27	84	111
5	Mallawa	37	89	126	19	25	44
6	Mandai	34	144	178	35	99	134
7	Maros Baru	36	117	153	15	43	58
8	Bontoa	47	145	192	21	45	66
9	Marusu	56	103	159	25	43	68



NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK SD		TOTAL	JUMLAH PENDIDIK SMP		TOTAL
		L	P		L	P	
10	Moncongloe	23	67	90	27	34	61
11	Simbang	35	107	142	23	50	73
12	Tanralili	38	138	176	10	30	40
13	Tompobulu	34	77	111	14	24	38
14	Turikale	28	154	182	28	96	124
<b>JUMLAH</b>		<b>492</b>	<b>1587</b>	<b>2079</b>	<b>325</b>	<b>722</b>	<b>1047</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

**Tabel. 4.9**  
**Daftar Pengawas SD Se-kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah**

No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
1	Mallawa	1	1	2
2	Camba	-	1	1
3	Cenrana	1	1	2
4	Simbang	1	1	2
5	Bantimurung	3	-	3
6	Turikale	3	-	3
7	Tompobulu	1	-	1
8	Maros Baru	1	-	1
9	Lau	-	1	1
10	Bontoa	-	2	2
11	Marusu	1	-	1
12	Mandai	-	2	2
13	Tanralili	1	1	2
14	Moncongloe	1	-	1



No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

**Tabel. 4.10**  
**Daftar Pengawas SMP Kabupaten Maros Berdasarkan Bidang Studi**

No.	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
1	Matematika	1	-	1
2	IPA	1	-	1
3	IPS	1	-	1
4	Bahasa Inggris	1	-	1
5	Bahasa Indonesia	1	-	1
6	Pendidikan Pancasila	1	-	1
7	PAI	1	-	1
8	SeniBudaya dan Prakarya	1	-	1
9	Informatika/TIK	1	-	1
10	MuatanLokal	1	-	1
11	Penjaskes	-	1	1
12	BK	-	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

Secara umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Maros dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel.4.11**  
**Jumlah Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Uraian	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombongan Belajar
1		246	<b>43.501</b>	235	<b>1.723</b>
2		27	3.592		





NO	Uraian	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombongan Belajar
3		75	15.708	75	576
4		44	4.660		
<b>TOTAL</b>		<b>391</b>	<b>67.465</b>	<b>310</b>	<b>2.299</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

### 3) Pendidikan Kesetaraan

Daftar Tutor Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel. 4.12**  
**Daftar Tutor per-PAKET Kabupaten Maros**

No	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket A			Tutor Paket B			Tutor Paket C		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Camba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cenrana	2	5	7	4	5	9	5	5	10
4	Lau	1	-	1	7	6	13	5	5	10
5	Mallawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Mandai	1	1	2	2	5	7	2	7	9
7	Maros Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bontoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Marusu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Moncongloe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Simbang	-	4	4	4	6	10	5	7	12
12	Tanralili	2	3	5	2	3	5	3	4	7
13	Tompobulu	1	4	5	1	6	7	2	8	10
14	Turikale	-	-	-	3	4	7	4	5	9
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>67</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023



Gambaran Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut :

- Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

**Tabel. 4.13**  
**Lembaga Yang Menyenggarakan Pendidikan Kesetaraan**  
**Di Kabupaten Maros**

NO	LEMBAGA	KECAMATAN	STATUS LEMBAGA	
			NEGERI	SWASTA
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	Bantimurung	√	-
2	PKBM MAWAR	Lau	-	√
3	PKBM MATTIRO SAWE	Mandai	-	√
4	PKBM TANRALILI	Tanralili	-	√
5	PKBM TOMPOBULU	Tompobulu	-	√
6	PKBM DELIA CENRANA	Cenrana	-	√

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

- Warga belajar

**Tabel 4.14**  
**Jumlah Peserta Per-PAKET Kabupaten Maros Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK				TOTAL
		PAKET A	PAKET B	Paket C IPA	PAKET C IPS	
1	Bantimurung	0	0	7	7	14
2	Camba	0	0	0	0	0
3	Cenrana	4	5	10	9	28
4	Lau	3	16	15	24	58
5	Mallawa	0	0	0	0	0
6	Mandai	14	8	17	11	50
7	MarosBaru	0	0	0	0	0
8	Bontoa	0	0	0	0	0



No.	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK				TOTAL
		PAKET A	PAKET B	Paket C IPA	PAKET C IPS	
9	Marusu	0	0	0	0	0
10	Moncongloe	0	0	0	0	0
11	Simbang	6	20	15	14	55
12	Tanralili	4	6	12	8	30
13	Tompobulu	0	0	0	4	4
14	Turikale	6	10	8	10	34
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>273</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

➤ Ruang kelas dan Rombongan Belajar

**Tabel 4.15**  
**Jumlah Ruang Kelas SPNF dan PKBM Kabupaten Maros**

No.	Wilayah Kecamatan	Ruang Belajar	Rombongan Belajar
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	7
2	PKBM MAWAR	3	3
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	7
4	PKBM TANRALILI	3	3
5	PKBM TOMPOBULU	6	6
6	PKBM DELIA CENRANA	7	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

5. Hasil Capaian

Realisasi target pencapaian SPM Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel. 4.16**  
**Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	14.764	14.215	96,28
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	67.465	67.465	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	420	420	100

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

6. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum tersedianya data By Name By NIK</li> <li>Struktur Pendataan yang belum terstandarisasi</li> <li>Adanya perbedaan data dari beberapa Indikator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pendataan Peserta Didik</li> <li>Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan</li> <li>Verifikasi data berdasarkan indikator yang ada</li> </ul>
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Maksimalnya Sasaran Pengampu SPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran data sasaran SPM</li> </ul>



No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan by name by adress</li><li>• Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD</li><li>• Perhitungan kebutuhan penanganan sosial bagi anak putus sekolah belum memadai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memaksimalkan Data yang bersumber dari Pendataan Anak Tidak Sekolah “Pasti Beraksi” melalui Aplikasi SIPBM ATS Kemendes.</li></ul>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal</li><li>• Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemetaan Program Kerja Prioritas Pengampu SPM</li></ul>
4.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah</li><li>• Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah / lokasi pemenuhan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah</li></ul>
	Pelaporan		
	Lain-lain		

## B. Bidang Urusan Kesehatan

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi



- h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- i. Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.17**  
**Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	6.168	6.168	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.168	6.168	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.004	6.004	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	28.094	28.094	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	62.647	62.647	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	164.945	164.945	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	31.353	31.353	100



8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14.464	14.464	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.960	2.960	100
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	884	884	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.895	5.895	100
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7.490	7.490	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2023

### 3. Anggaran

Anggaran SPM urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.18**  
**Anggaran SPM urusan kesehatan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.364.121.699	1.181.855.000	86,64	DAU dan DAK NF
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	342.919.699	116.260.000	33,90	DAU dan DAK NF



3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	9.240.000	0	0,00	DAU
4	Pelayanan kesehatan Balita	511.975.000	267.705.000	52,29	DAK NF
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	555.030.000	531.730.000	95,80	DAK NF
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	302.590.000	259.220.000	85,67	DAK NF
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	355.145.200	295.655.000	83,25	DAK NF
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	0	0	0,00	DAK NF
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	330.388.000	330.294.375	99,97	DAK NF
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	217.080.000	203.620.000	93,80	DAK NF
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	959.370.000	310.420.000	32,36	DAK NF
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	361.590.000	347.070.000	95,98	DAK NF
13	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin)	4.546.583.811	4.507.155.596	99,13	DAU
14	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai)	2.945.726.000	2.846.808.022	96,64	DAK Non Fisik





15	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas)	1.200.360.800	1.198.184.800	99,82	DAK Fisik
16	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (USG, Antropometri dan Gadar Matneo)	5.870.942.000	5.859.349.400	99,80	DAK Fisik
<b>Total Anggaran SPM (1)</b>		19.873.062.209	18.255.327.193	91,86	DAU dan DAK
<b>Total Anggaran Perangkat Daerah (2)</b>		177.610.222.326			
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM (1 : 2 x 100%)</b>		<b>11,19 %</b>			

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2023

### 3. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut :

**Tabel. 4.19**  
**Daftar Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maros**

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	12	13	25
2	GOL. III	14	32	46
3	GOL. II	6	7	13
4	GOL. I	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	<b>52</b>	<b>84</b>

Sumber data : BKPSDM , 2023



#### 4. Hasil Capaian

Hasil Capaian atau Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.20**  
**Realisasi Capaian SPM urusan kesehatan**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	6.168	6.168	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.168	6.168	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.004	6.004	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	28.094	28.094	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	62.647	62.647	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	164.945	164.945	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	31.353	31.353	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14.464	14.464	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan	2.960	2.960	100



	Melitus	kesehatan standar			
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	884	884	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.895	5.895	100
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7.490	7.490	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2023

#### 5. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Maros pada Tahun 2023, dapat dilihat pada hasil capaian yang 100%.

### C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.



## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.21**  
**Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	227	227	100
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	180	180	100

Sumber data : Dinas PU, tata ruang, perhubungan dan pertanahan Kab.Maros , 2023

## 3. Anggaran

Anggaran SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.22**  
**Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.569.551.000	6.567.545.552	99,97	APBD (DAU)
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	1.879.770.000	1.860.560.640	98,98	APBD (DAU)



<b>Total Anggaran SPM</b>	8.449.321.000	8.428.106.192	99,75	APBD (DAU)
<b>Total Anggaran PD</b>	231.256.600.540	213.522.857.641	92,33	
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM</b>	3,65			

Sumber data : Dinas PU, tata ruang, perhubungan dan pertanahan Kab.Maros , 2023

#### 4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.23**

#### Daftar Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	6	4	10
2	GOL. III	69	47	116
3	GOL. II	25	4	29
4	GOL. I	2	0	2
	<b>JUMLAH</b>	102	55	157

Sumber data : BKPSDM , 2023

#### 5. Hasil Capaian

Hasil Capaian atau Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.24**

#### Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	227	227	100



2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	180	180	100
---	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

Sumber data : Dinas PU, tata ruang, perhubungan dan pertanahan Kab.Maros , 2023

## 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Adanya perbedaan data pada saat di lapangan	Keakuratan data lapangan
2	Penghitungan Kebutuhan	Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update	Data dasar tersedia
		Belum adanya data base keberfungsian dari sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun	Penyusunan data base keberfungsian sarana prasarana air minum dan sanitasi
3	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM	Perencanaan lebih dioptimalkan berbanding lurus dengan pendanaannya
		Perlunya penganggaran yang cukup besar untuk menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi	Anggaran bidang air minum dan sanitasi di optimalkan
4	Pelaksanaan	Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah	Pelatihan untuk perangkat daerah
		Sarana prasarana bidang sanitasi belum berfungsi secara optimal	Pelatihan untuk kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi
5	Pelaporan	Format laporan yang selalu berubah-ubah	-



No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
6	Penyiapan Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Untuk anggaran yang direncanakan berbeda dengan realisasinya	Dalam penganggaran kegiatan untuk program pendukung SPM lebih diprioritaskan

#### D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.25**  
**Target SPM Urusan Perumahan Rakyat**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%	KET
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	57	57	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	-	-	-	Tidak Adanya Program Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 yang mengakibatkan adanya warga terkena relokasi

Sumber data : Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2023

### 3. Anggaran

Anggaran urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.26**  
**Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	100	Provinsi





2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-	-	-
<b>Total Anggaran SPM</b>		Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	100	
<b>Total Anggaran PD</b>		<b>Rp. 9.562.826.086</b>	<b>Rp. 7.658.743.665</b>		
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM</b>					

Sumber data : Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2023

#### 4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.27**  
**Daftar Pegawai Dinas PRPKPLH Kab. Maros**

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	2	2	4
2	GOL. III	23	25	52
3	GOL. II	16	9	25
4	GOL. I	15		15
	<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>92</b>

Sumber data : BKPSDM , 2023

#### 5. Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.28**  
**Hasil capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan	%	KET
----	-----------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---	-----



			Layanan	Layanan		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	57	57	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	-	-	-	Tidak Adanya Program Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 yang mengakibatkan adanya warga terkena relokasi

Sumber data : Dinas PR, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2023

## 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi Jauh</li> <li>Sulitnya berkoordinasi dengan Aparat Desa</li> <li>Pengumpulan Data ditingkat Desa Masih Kurang</li> </ol>	Menyiapkan Standarisasi permintahan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat
2.	Penghitungan Kebutuhan	Data yang Masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasinya	Perhitungan Kebutuhan Rumah Korban Bencana Harus Disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah Masyarakat
		Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan	Menyesuaikan jumlah kebutuhan pemenuhan rumah korban bencana



3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.	Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM.
		Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana	Mengalokasikan dana/ Anggaran
	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendistribusian Material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda</li><li>2. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi.</li><li>3. Minimnya sumber daya yang tersedia</li></ol>	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
	Pelaporan	-	-
	Lain-lain	-	-

## E. Bidang Urusan Trantibumlinmas

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 pada 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### • Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros terdiri dari :

##### a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Adapun mutu pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban Umum meliputi

- standar operasional prosedur Satpol PP
- standar sarana prasarana Satpol PP;
- standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan



- standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, meliputi:
  - layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
  - layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
  - layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
  - layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
  - layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.29**  
**Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	86	86	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	222	222	100

*Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2023*

## 3. Anggaran

Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2023 sebagai berikut :



**Tabel 4.30**  
**Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	383,221,392	337,674,000	88.11 %	APBD dan Dana Bagi Hasil
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	510,963,000	488,873,807	95.68 %	APBD
<b>Total Anggaran SPM</b>		<b>894.184.000</b>	<b>826.547.807</b>	<b>92.44%</b>	APBD dan Dana Bagi Hasil
<b>Total Anggaran PD</b>		<b>14.401.931.358</b>	<b>14.087.398.403</b>	<b>97.82%</b>	APBD dan Dana Bagi Hasil
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM</b>		<b>6.21%</b>	<b>5.87%</b>		APBD dan Dana Bagi Hasil

Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2023

#### 4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.31**  
**Daftar Pegawai**

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	7	1	8
2	GOL. III	38	10	48
3	GOL. II	45	5	50
4	GOL. I	3	-	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>93</b>	<b>16</b>	<b>109</b>

Sumber data : BKPSDM , 2023

#### 5. Hasil Capaian



Hasil capaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 4.32 Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	86	86	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	222	222	100

*Sumber data : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , 2023*

#### 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
	Pengumpulan Data	a. Tidak tersedianya data (tidak terdokumentasi secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat; b. Kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir;	a. Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal



Penghitungan Kebutuhan	<p>a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;</p> <p>b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor</p> <p>c. Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Damkar masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai).</p>	<p>a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran;</p> <p>b. Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas</p>
Perencanaan Dan Penganggaran	<p>a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p>	Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;
Pelaksanaan	<p>a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan trantibumlinmas;</p> <p>b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar</p>
Pelaporan	-	-



Lain-lain	<p>a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran;</p> <p>b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran;</p> <p>c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;</p> <p>d. Biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran masih terpusat di bagian keuangan daerah sehingga dalam pengurusan perbaikan menjadi terhambat</p>	<p>a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran;</p> <p>b. Perbaiki jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran;</p> <p>c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran;</p> <p>d. Sebaiknya biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran di kelola langsung oleh instansi bersangkutan sehingga proses perbaikan menjadi cepat dan dapat di gunakan apabila terjadi kebakaran</p>
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## • Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros terdiri dari :

#### a. Pelayanan Informasi rawan bencana, meliputi :

- penyusunan kajian risiko bencana;
- Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

#### b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi :

- penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- pembuatan rencana kontinjensi;
- pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;





- pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, meliputi

- respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- respon cepat darurat bencana;
- aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.33**  
**Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	398.866	398.866	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	115713	115713	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	41.250	41.250	100

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2023

3. Anggaran

Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana



Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.34**  
**Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	99.450.000	85.770.000	86,24	APBD
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.600.000	61.790.000	94,19	APBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	199.597.000	192.958.100	96,67	APBD
<b>Total Anggaran SPM</b>		<b>364.647.000</b>	<b>340.518.100</b>	<b>92,36</b>	
<b>Total Anggaran PD</b>		<b>17.472.261.758</b>	<b>16.769.068.418</b>	<b>95,98</b>	
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM</b>		<b>17.107.614.758</b>	<b>16.428.550.318</b>	<b>96.03</b>	

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2023

#### 4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.35**  
**Daftar Pegawai**

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	4	2	6
2	GOL. III	14	7	21
3	GOL. II	9	1	10
4	GOL. I	0	0	0
5	GOL. V (PPPK)	1	0	1
6	SATGAS	34	21	55
	<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>93</b>

Sumber data : BKPSDM , 2023



## 5. Hasil Capaian

Hasil capaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.36**  
**Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	398.866	398.866	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	115.713	115.713	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	41.250	41.250	100

Sumber data : BPBD Kab.Maros, 2023

## 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Kurangnya personil Satgas Bencana	Proses Pendataan Korban Bencana tidak berjalan dengan baik



2.	Penghitungan Kebutuhan	Jumlah Kerugian tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan	dibutuhkan orang yang berkompeten untuk menghitung jumlah kerugian dilapangan
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Anggaran Terbatas	Pemangku kepentingan harus memanfaatkan anggaran skala prioritas terkait pemenuhan SPM
4.	Pelaksanaan	Perubahan Anggaran 2022	Data yang diterima dari responden kurang lengkap
5.	Pelaporan	Kurangnya keterampilan atau pengalaman dalam pengumpulan data sehingga berdampak pada data yang di kumpulkan	Dibutuhkan tenaga yang professional dalam pengumpulan data
6.	Lain-lain		

## F. Bidang Urusan Sosial

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.37**  
**Target SPM Urusan Sosial**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	117	117	100
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	24	24	100
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	103	103	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	31	31	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2019	2019	100

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2023

### 3. Anggaran

Anggaran urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :



**Tabel 4.38**  
**Anggaran SPM Urusan Sosial**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	4.191.000	4.191.000	100	APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	6.500.000	6.500.000	100	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	8.500.000	8.055.500	98	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	55.941.850	54.785.500	98	APBD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	0	0	0	Bantuan Kemensos
<b>Total Anggaran SPM</b>		<b>75.132.850</b>	<b>73.532.000</b>	<b>98</b>	APBD
<b>Total Anggaran SKPD</b>		<b>6.964.480.017</b>	<b>6.721.591.118</b>	<b>97</b>	APBD
<b>Persentase Alokasi Anggaran SPM</b>		<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2023

#### 4. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Urusan Sosial digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.39**  
**Daftar Pegawai**

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	8	1	9
2	GOL. III	7	18	25
3	GOL. II	5	6	11
4	GOL. I	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>

Sumber data : BKPSDM , 2023



## 5. Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.40**  
**Hasil capaian SPM Urusan Sosial**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	117	117	100
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	24	24	100
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	103	103	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	31	31	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2019	2019	100

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2023



## 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Letak Lokasi Jauh, Terkendala Jaringan Seluler Masih Kurang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengaktifkan Tugasdan Fungsi Fasilitator pada tiap Desa/ Kelurahan</li><li>- Menambahkan Biara atau Insentif petugas pengumpul data</li></ul>
2.	Penghitungan Kebutuhan	Terbatasnya Pagu Anggaran untuk Memenuhi Indikator Capaian SPM pada DPA	Mengidentifikasi sumber pendanaan yang sah selain dari APBD (CSR dunia usaha, Basnas maupun bantuan dari Provinsi dan Pemerintahan Pusat.
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum Terakomodirnya Beberapa Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Menjalin kerjasama dan kordinasi dengan seluruh pihak terkait ( Organisasi social, DuniaUsaha maupun OPD lain).
4.	Pelaksanaan	Terkadang di dapati sasaran / Klien untuk pemenuhan SPM tidak di dukung oleh keluarga/ wali dalam Proses Pemenuhan SPM	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan Pendampingan dalam pemberian Pelayanan</li><li>- Koordinasi dengan Aparat Pemerintah di Desa /Kelurahan</li></ul>
5.	Pelaporan	Pelaksanaan Kegiatan Terkadang tidak sesuai rencana ( Jadwal)	Tetap melakukan pelaporan sesuai jadwal meskipun belum ada kegiatan yang di laksanakan.
6.	Lain-lain	Capaian SPM Dinas Sosial tidak Sepenuhnya menggunakan Anggaran APBD Kabupaten. Tetapi sebagian juga di biyai oleh Anggaran APBN / Kemensos RI	Tetap menyusun rencana dan penganggaran pemenuhan SPM dan menjadikannya sebagai Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial dalam Penyusunan APBD Kabupaten.





Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut :

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

**Tabel. 4.41**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Pendidikan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>			
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>8.533.781.000</b>	<b>7.771.276.944</b>
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	334.925.000	325.675.362
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	520.500.000	388.685.204
3	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	712.487.000	628.733.378
4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	0
5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1.825.200.000	1.620.000.000
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.476.975.000	4.265.925.000
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	228.965.000	196.465.000
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	217.604.000	200.000.000
9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	43.475.000	43.450.000
10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	129.250.000	67.110.000
11	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	44.400.000	35.233.000
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		<b>42.917.658.300</b>	<b>42.677.319.537</b>
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.810.062.000	3.802.908.713
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.461.134.000	3.454.270.181



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru / Penjaga Sekolah	404.500.000	400.173.203
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	15.174.639.500	15.164.698.931
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	1.220.723.000	1.202.660.746
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	279.311.000	278.429.944
7	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	1.011.517.000	1.009.190.103
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	517.250.000	497.190.550
9	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	378.000.000	368.604.728
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.854.970.800	5.814.233.750
11	Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.969.189.000	3.964.341.800
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.000.000.000	2.988.100.000
13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	44.250.000	44.250.000
14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	9.145.000	9.145.000
15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	279.550.000	279.550.000
16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000
17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	277.855.000	277.855.000
18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16.150.000	15.200.000
19	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.147.112.000	2.044.216.888
20	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.100.000	29.100.000
21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	33.200.000	33.200.000
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>17.372.694.600</b>	<b>17.109.840.889</b>
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	630.000.000	611.828.100



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	538.341.000	463.861.339
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	749.464.000	734.642.200
4	Pembangunan Laboratorium	1.247.184.000	1.243.295.100
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	848.748.000	831.987.450
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.169.354.700	1.137.000.100
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	94.500.000	92.708.000
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	210.000.000	204.381.950
9	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	367.500.000	356.586.000
10	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	315.000.000	309.022.000
11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.314.392.400	5.284.753.750
12	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.764.641.000	2.763.855.400
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.875.000.000	1.836.500.000
14	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.447.000	45.447.000
15	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.710.000	8.710.000
16	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	327.820.000	327.820.000
17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	500.000.000	492.400.000
18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMP	164.860.000	164.860.000
19	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	135.800.000	134.250.000
20	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	34.650.000	34.650.000
21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	31.282.500	31.282.500
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>4.812.850.000</b>	<b>3.195.069.824</b>
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal / Kesetaraan	3.383.300.000	3.186.569.824



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Non formal / Kesetaraan	773.500.000	-
3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non formal / Kesetaraan	8.650.000	8.500.000
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan	44.150.000	-
5	Pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan	586.100.000	0
6	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	17.150.000	0

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

## B. Bidang Urusan Kesehatan

**Tabel. 4.42**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Kesehatan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
<b>Kegiatan :</b>			
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.364.121.699	1.181.855.000
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	342.919.699	116.260.000
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	9.240.000	0
4	Pelayanan kesehatan Balita	511.975.000	267.705.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	555.030.000	531.730.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	302.590.000	259.220.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	355.145.200	295.655.000
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	0	0
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	330.388.000	330.294.375
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	217.080.000	203.620.000



	(ODGJ) berat		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	959.370.000	310.420.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	361.590.000	347.070.000
<b>Kegiatan :</b>			
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah</b>			
1	Pengadaan Obat, Vaksin	4.546.583.811	4.507.155.596
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.945.726.000	2.846.808.022
3	Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas)	1.200.360.800	1.198.184.800
4	Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (USG, Antropometri dan Gadar Matneo)	5.870.942.000	5.859.349.400

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.Maros , 2023

### C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

**Tabel. 4.43**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Pekerjaan Umum**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>			
<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	293.976.000	293.976.000
2	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	149.353.000	149.353.000
3	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.048.550.000	2.047.260.302
4	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	962.030.000	961.397.550
5	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.424.160.000	2.424.130.000
6	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	691.482.000	691.428.700

KABUPATEN MAROS TAHUN 2023



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>			
<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.879.770.000	1.860.560.640

Sumber data : Dinas PUTRPP Kab.Maros , 2023

#### D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

**Tabel. 4.4**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Perumahan Rakyat**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program BTT Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
<b>Kegiatan Menunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp.310.000.000	Rp.310.000.000

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.Maros , 2023

#### E. Bidang Urusan Trantibumlinmas

**Tabel. 4.45**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Trantibumlinmas 1**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>			
<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota</b>			
1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	207,180,000	203,580,000
2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	21,900,000	21,870,000



3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	27,010,000	26,650,000
4	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5,920,000	1,620,000
5	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	20,000,000	0
<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60,105,000	44,838,000
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7,845,000	7,845,000
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	28,129,392	27,039,000
<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>			
1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	5,132,000	4,232,000
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>			
<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	242,820,000	231,360,000
2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	10,200,000	10,150,000
3	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	181,998,000	174,145,000
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	51,000,000	49,959,000
5	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1,200,000	464,807
<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>			
1	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	9,150,000	9,100,000
<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			
1	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	14,595,000	13,695,000



**Tabel. 4.46**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Trantibumlinmas 2**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program PenanggulanganBencana</b>			
<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten</b>			
1	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten	59.450.000	45.770.000
2	Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten	40.000.000	40.000.000
<b>Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			
1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	37.200.000	36.790.000
2	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	28.400.000	25.000.000
<b>Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			
1	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	53.127.000	52.843.100
2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	146.470.000	140.115.000
<b>Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>			
1	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	14880000	0
2	Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	12.368.226.000	11.934.380.600

Sumber data : BPBD Kab.Maros , 2023



**F. Bidang Urusan Sosial**

**Tabel. 4.47**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM urusan Perumahan Rakyat**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program Program Rehabilitasi Sosial</b>			
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 55.941.850,-	Rp 54.785.500,-
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 19.191.000,-	Rp 18.746.500,-
<b>Program Penanganan Bencana</b>			
<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
1	Penyediaan makanan	0	0
2	Penyediaan sandang	0	0
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0
5	Pelayanan dukungan Psikososial	0	0

Sumber data : Dinas Sosial Kab.Maros , 2023



## BAB V

### P E N U T U P

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa tahun yang lalu yang telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang pada akhirnya mendorong meningkatnya partisipasi publik. Hal ini sangat diperlukan dan merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maros kepada publik yang menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Pembahasan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diuraikan secara lengkap pada BAB I menggambarkan tentang informasi tentang profil daerah Kabupaten Maros secara umum, perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan umum penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. diuraikan secara lengkap pada BAB II. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dijelaskan pada BAB III menguraikan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun penerapan dan pencapaian Standar



Pelayanan Minimal yang dijelaskan pada BAB IV menguraikan tentang pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yaitu : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Maros.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maros tahun 2023 diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari sumber pendanaan lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah mampu mendorong perkembangan pembangunan di Kabupaten Maros. Banyaknya program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan mendesak sementara sumber pendanaan masih terbatas sehingga, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Kabupaten Maros telah melalui tahapan review dan Evaluasi Mandiri terhadap seluruh capaian indikator kinerja kunci urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Maros **Nomor 094/13/A.4/ITDA** tanggal 23 Februari 2024 untuk melakukan Review dan Evaluasi terhadap Seluruh Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Maros Tahun 2022 yang berlangsung dari tanggal 26 Februari s/d 29 Maret 2024 di Ruang Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini belum dapat memuaskan semua pihak dan menyelesaikan semua masalah yang ada, namun dengan berbagai usaha dan upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten



Maros saat ini telah membawa perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 ini kami buat untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2024, dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini benar-benar menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara adil dan bijaksana dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, dan Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

